



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN
DALAM MENDUKUNG KAMPANYE MILITER DI PERAIRAN LAUT
ANDAMAN DAN CORONG SELAT MALAKA
(Studi di : Pangkalan TNI AL Sabang, Periode 2010 – 2012)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

Oleh:

**YANUAR HANDWIONO
NPM. 120120104079**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA
NOVEMBER 2013**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yanuar Handwiono.

NPM : 120120104079.

Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer.

Judul Tesis : Analisis Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dalam Mendukung Kampanye Militer di Perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka (Studi : di Pangkalan TNI AL Sabang Periode 2010 – 2012).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Laksma TNI (Purn) Dr. dr. Harmin Sarana,
M.M., Sp.B., Sp.KL

Letkol Laut (KH) Dr. Abd. Rivai Ras,
M.M., M.S., M.Si

Jakarta Oktober 2013

Mengetahui
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan

Dr. U.H. Harahap, M.Si

Marsekal Muda TNI

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yanuar Handwiono.
NPM : 120120104079.
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer.
Judul Tesis : Analisis Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dalam Mendukung Kampanye Militer di Perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka (Studi : di Pangkalan TNI AL Sabang Periode 2010 – 2012).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1: Laksma TNI (Purn) Dr.dr.Harmin S,MM,
Sp.B, Sp.KL (.....)

Pembimbing 2: Letkol (KH) Dr. Abdul Rivai Ras M.M, M.S, Msi (.....)

Penguji : Laksma TNI Dr.Ir.A. Djonie Gallaran, M.M (.....)

Penguji : Dr.Ir. Eddy Herjanto S.E, M.Sc (.....)

Penguji : Kol.Czi Harangan Sitorus S.I.P, M.Sc, M.si(Han)(..... ..)

Ditetapkan di : Jakarta.

Tanggal : Desember 2013.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, November 2013

(Yanuar Handwiono)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Handwiono
NPM : 1 2012 04 079
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Sekolah : Kajian Pertahanan dan Strategis
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS
TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KAMPANYE
MILITER DI PERAIRAN LAUT ANDAMAN DAN CORONG SELAT MALAKA
(Studi : di Pangkalan TNI AL Sabang Periode 2010-2012)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, November 2013

Yang menyatakan

(Yanuar Handwiono)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas bimbingan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik dalam pengungkapan, pemilihan kata-kata maupun pembahasan dan penyajian materi tesis ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Yang Terhormat Letnan Jenderal TNI Ir.Drs Subekti M.Sc., M.P.A selaku Rektor Universitas Pertahanan.
- (2) Marsekal Muda TNI Dr. Usra H. Harahap, M.Si. selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.
- (3) Kolonel Czi Harangan Sitorus, S.I.P, M.Sc, M.Si (Han). Selaku Ketua Program Studi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan.
- (4) Laksma (Purn) Dr.dr.Harmin Sarana,M.M, Sp.B, Sp.KL selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
- (5) Letnan Kolonel (KH) Dr Abdul Rivai Ras M.M, M.S, Msi,selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
- (6) Para staf pengajar dan staf administrasi Program Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan yang telah memberikan landasan teori dan pengetahuan serta wawasan melalui kegiatan belajar mengajar serta pemahaman dasar pemikiran analitis dalam melaksanakan penelitian ilmiah untuk kepentingan akademis.
- (7) Komandan, Perwira Staf dan segenap anggota Pangkalan TNI AL Sabang, yang telah banyak membantu dalam memberikan data, masukan serta saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

- (8) Untuk keluargaku, terutama istri dan anakku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan perhatiannya yang begitu besar sehingga penulis senantiasa termotivasi untuk mencapai cita – cita dan memenuhi harapan keluarga.
- (9) Rekan-rekan mahasiswa Program Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan Indonesia, alumni SESKO TNI XXXIX/2012 yang telah menunjukkan arti dari persahabatan dan kerjasama yang baik selama mengikuti studi di Universitas Pertahanan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan implementasi ilmu pertahanan dan ilmu pengetahuan secara umum.

Jakarta, November 2013

(Yanuar Handwiono)

ABSTRAK

Nama : Yanuar Handwiono
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Judul : Analisis Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dalam Mendukung Kampanye Militer di Perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka (Studi : di Pangkalan TNI AL Sabang Periode 2010 – 2012)

Peningkatan gelar kekuatan Angkatan laut India di wilayah kawasan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka yang ditandai dengan implementasi strategi “Neclace of Diamonds” yang merupakan jawaban atas implementasi strategi String of Pearls oleh Cina pada kawasan tersebut, merupakan gambaran arti penting dan nilai strategis kawasan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka. Pangkalan TNI AL Sabang yang merupakan sarana pertahanan laut Indonesia pada kawasan tersebut, menjadi sangat penting keberadaannya terutama dalam mengantisipasi peningkatan konflik pada kawasan tersebut yang dapat berupa suatu gelar kampanye militer Pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan teritorial dan kedaulatan nasionalnya di wilayah tersebut. Untuk penyiapan dukungan kampanye militer tersebut sangat dipengaruhi oleh sinergitas perencanaan serta pengelolaan tata ruang pertahanan wilayah nasional pada wilayah tersebut, khususnya dari aspek penyelenggaraan pertahanan di laut. Tesis ini meneliti sinergitas tata ruang pertahanan nasional dalam mendukung gelar kampanye militer dengan mengambil studi penelitian Pangkalan TNI AL Sabang periode 2010-2012. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini yaitu pendekatan kualitatif dikombinasikan dengan deskriptif analitis.

Kata kunci:

Dinamika Lingkungan Strategis Kawasan Andaman dan Corong Selat Malaka, Kampanye Militer, Tata Ruang Pertahanan.

ABSTRACT

Name : Yanuar Handwiono
Program : Strategy and Military Campaign
Title : Analysis Region of Defense Spatial in Support of Military Campaign
In the Andaman Sea and Mallaca Strait Funnel (Study : Sabang
Indonesian Naval Base in 2010-1012 period)

The increased of deployments Indian naval forces in the Andaman Sea and Mallaca straits choke points that is marked with the implementation of “Necklace of Diamonds” strategy as a response to the implementation of “String Pearls Strategy” by China in the region which illustrated the importance and strategic values of the Andaman Sea and Mallaca strait choke point (Funnel). The existence of the Indonesian Naval base Sabang, as Indonesian naval defense facility on that region becomes very important especially in the anticipation of potentially increased conflict in the region which can be a military campaign by the Indonesian Government in order to protect its territorial and national interest in the region. The preparation to support the military campaign is strongly influenced by the synergy of planning as well as the management of territorial defense spatial in the region, particularly from the aspect of organizing defense at sea. This thesis examines the synergy of national defense spatial in support the military campaign by taking research studies at Indonesian Navy, Sabang Naval Base in 2010-1012 period. The research method used in this thesis is the qualitative approach combined with descriptive analytical.

Keywords:

Strategic dynamic Regional Andaman Sea and Mallaca Funnel, Military Campaign, Defense Spatial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

1. BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup	11

2. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Teori Sinergitas.....	12
2.1.2 Definisi Tata Ruang.....	13
2.1.3 Peran dan Fungsi Pangkalan TNI AL	18
2.1.4 Syarat Umum pangkalan TNI AL	20
2.1.5 Teori Kampanye Militer	21
2.2 Kerangka Pemikiran	25
2.3 Hipotesis Penelitian	27

3. BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Teknik pengumpulan Data	29
3.2.1 Dokumentasi	29
3.2.2 Observasi.....	29
3.2.3 Wawancara	29
3.3 Teknik Analisis Data.....	30
3.4 Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	31

3.5 Sumber Data	32
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33

4. BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Kepentingan Ekonomi, Politik di Perairan Andaman dan Corong Selat Malaka	34
4.1.2 Gambaran Strategi Negara Kawasan Asia Selatan Dalam Penguasaan perairan Alur Selat Malaka, Andaman, Sabang.....	35
4.1.2.1 Aceh dan Sabang sebagai Bagian Geostrategi AS dan Cina di Kawasan Asia Tenggara	40
4.1.2.2 Perimbangan Kekuatan AL India dengan Negara – negara Asia Selatan Lainnya	41
4.1.3 Jalur Penguasaan Ekonomi Cina dan India di Perairan Laut Andaman dan Sabang	46
4.1.3.1 Gelar kekuatan Angkatan Laut Cina di Kawasan Samudera Hindia dan Laut Andaman	51
4.1.3.2 Gelar Kekuatan TNI AL di Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka.....	57
4.1.4 Kondisi Pangkalan TNI AL Sabang Saat ini	65
4.1.4.1 Fasilitas Pelabuhan	65
4.1.4.2 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan.....	66
4.1.4.3 Fasilitas Perbekalan	68
4.1.4.4 Fasilitas Pergudangan	68
4.1.4.5 Fasilitas Alat Apung	68
4.1.5 Gambaran Umum Wilayah Sabang	69
4.1.5.1. Kondisi Geografis.....	69
4.1.5.2. Dukungan Sumber Daya Listrik dan Logistik Cair	70
4.1.5.3 Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.....	73
4.1.5.4 Tata Ruang Wilayah Sabang	88
4.1.5.5 Rencana Pengembangan Kawasan Pelabuhan Sabang..	90
4.1.6 Deskripsi Tata Ruang	94
4.1.6.1 Tata ruang Wilayah Pertahanan	94

4.1.6.2 Tata Ruang Wilayah Nasional	96
4.2 Analisis	99
4.2.1 Pengembangan Kemampuan Pangkalan TNI AL Sabang....	99
4.2.2 Sinergitas Tata Ruang Sabang Dihadapkan Dengan Pengembangan Kemampuan Pangkalan TNI AL Sabang.....	100
4.2.3 Sinergitas Kepentingan Sarana Labuh dan Dermaga di Sabang	107
4.2.4 Sinergitas Peningkatan Sarana Perbaikan	114
4.2.5 Sinergitas Peningkatan Dukungan Logistik	117
4.2.6 Pembahasan Hasil Penelitian	122
4.2.7 Pengujian Hipotesa	127
4.3.2	
5. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	129
5.2 Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Perbandingan Strategi “ <i>String of Pearls</i> ” China dengan Strategi <i>Necklace of Diamonds</i> ” India.....	2 Gambar
---	----------

2	: <i>Oil Shipping Lanes</i> (OSL) China	3
Gambar 3	: Kedudukan Kampanye Militer dalam Tataran Politik	24
Gambar 4	: Kerangka Pemikiran	27
Gambar 5	: Peta Kawasan Asia Selatan	37
Gambar 6	: Interaksi Aktor Non Negara Yang Berpeluang Membuat Destabilisasi Kawasan.....	37
7	: Kooperasi antar Negara yang berpotensi merusak stabilitas Kawasan... ..	39
8	: <i>Necklace of Diamonds</i> India	49
Gambar 9	: Lokasi stasiun udara Angkatan Laut India NAS Baaz di Campbell Bay	49
Gambar 10	: Gelar Kekuatan TNI di wilayah NKRI	57
Gambar 11	: Area Operasi Patkor Indindo 2012	60
Gambar 12	: Area Operasi OPS MSSP 2012	62
Gambar 13	: Area Operasi Patkor Optima Malindo 2012.....	63
Gambar 14	: Area Operasi Patkor Indo-thai 2012	64
Gambar 15	: Area Operasi Patkor Malindo 2012	65
16	: Dermaga Lanal Sabang.....	66
Gambar 17	: Dermaga Umum Sabang.....	75
Gambar 18	: Dermaga BPKS Baru.....	76
Gambar 19	: Dermaga Pertamina Sabang.....	77
20	: Dermaga Distrik Navigasi Sabang	78
Gambar 21	: Dermaga PSB Pasiran Sabang.. ..	79
22	: Dermaga Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Sabang	80
23	: Dermaga Satrad TNI AU Sabang.....	81
Gambar 24	: Dermaga Gapang Sabang.....	81
Gambar 25	: Dermaga Balohan Sabang Gang Away dan Dholpin.....	82
Gambar 26	: Dermaga Airud Jaboi	84
Gambar 27	: Dermaga TPI Jaboi	85
Gambar 28	: Dermaga Iboh.....	85
Gambar 29	: Area Kawasan Yang Terkena Area Pembangunan Pelabuhan.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	: Rencana Jadwal Penelitian	33
1.4	: Data Alpeng Lanal Sabang.....	69

Tabel 2.4	: Letak Geografis Sabang	70	Tabel
3.4	: Jumlah Daya Tersambung, Langganan, Kwh Terjual dan Pendapatan Menurut Golongan Tarif Pada PLN Ranting Sabang Tahun 2010.....	71	
Tabel 4.4	: Perkembangan Bidang Pembangkitan Dan Distribusi Pada PT.(PERSERO) PLN Di Kota Sabang Tahun 2001-2010.....	71	Tabel
5.4	: Keadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang Tahun 2010.....	72	
Tabel 6.4	: Jumlah Air Minum Yang Disalurkan Oleh PDAM Kota Sabang Tahun 2010	73	
Tabel 7.4	: Jumlah Kunjungan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Perbulan Pada Pelabuhan di Kota Sabang Tahun 2010.....	87	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selaras dengan semakin berkurangnya peran dominasi kekuatan Armada Angkatan Laut AS dihadapkan dengan perkembangan pembangunan kekuatan Armada Angkatan Laut India dan China dikawasan Asia Selatan sebagai kekuatan baru Asia menampilkan situasi unik di kawasan ini. Tiga kekuatan Armada Angkatan Laut ini sangat berarti dan sensitif satu sama lain, masing– masing pihak berupaya untuk memainkan satu atau lebih peran di kawasan untuk dapat menjadi sangat berpengaruh bahkan dominan dalam memberikan efek kepada pihak ketiga atau bahkan kepada pihak di luar tiga kekuatan besar ini. Armada Angkatan Laut India yang di kawasan tersebut masuk dalam kategori “*Kapabe*” telah berhasil membangun kemampuannya untuk menuju pada implementasi “*Blue Ocean Strategy*”¹ dan sangat berambisi untuk dapat mengisi kekosongan ruang di regional Asia Selatan yang secara bersamaan tumbuh dengan hadirnya kekuatan modern Armada Maritim Cina yang juga semakin meningkatkan pembangunan kekuatan dan kemampuannya serta kehadirannya di kawasan dengan berdalih mengawal strategi ekonomi nasionalnya.

Hal ini tentunya dapat menjadi pemicu terjadinya eskalasi ancaman keamanan maritim yang sangat berpotensi untuk timbul dalam kurun waktu 20 tahun kedepan sebagai dampak dari peningkatan konflik kepentingan nasional negara-negara di kawasan Asia Selatan. Salah satu indikasinya adalah adanya implementasi strategi *String of Pearls* atau “*Rangkaian Mutiara*” yang diterapkan China di sepanjang kawasan perbatasannya, impementasi strategi di kawasan tersebut berhadapan

¹ W.Chan Kim, Renee Mauborgne, Harvard Business School Publishing Corpration, 2005, “*Blue Ocean Strategy*”.

dengan strategi yang diterapkan India yang dinamakan strategi “*Necklace of Diamonds*” atau strategi “Kalung Intan”²



Gambar 1: Perbandingan Strategi “*String of Pearls*” China dengan Strategi “*Necklace of Diamonds*” India. (Sumber : <http://yourage.wordpress.com/2012/05/18/chinanatousuk-naval-bases-around-india-have-a-look/>) Target UPSC. CHINA,NATO,US,UK *Naval Bases around India – Have a look.* Diunduh Mei 18, 2012.

Sejauh ini dari sisi implementasi strateginya, Cina terlihat masih konsisten mengejar kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan negara ketiga seperti Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Thailand, yaitu melalui upaya memproyeksikan negara tersebut dengan proyek infrastruktur mega raksasa yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pendukung kekuatan maritimnya, dan program ini bagi China memiliki arti yang sangat penting dan juga sangat memiliki nilai strategis. Sebagai “*outcome*”nya negara-negara ini dapat diharapkan berperan untuk mengurangi dominasi AS di kawasan ini³. Selain itu, fokus Cina tentang kepentingan ekonomi dan perdagangan melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dan *Oil Shipping Lanes* (OSL), menjadikan negeri

² Rosenfeld, Julia.M, Center for US Naval Analyses, 2010, “*Exploring The China-India Relationship, Roundtable Report*”. hal 44.

³ Quarterdeck, vol.5, No. 10, april 2012

ini sangat peka terhadap adanya perkembangan pertumbuhan kekuatan maritim di sepanjang rute pendekat SLOC tersebut.



Gambar 2: *Oil Shipping Lanes* (OSL) China (Sumber : <http://www.chinabriefing.com/news/2009/03/18/china%E2%80%99s-string-of-pearls-strategy.html>) Chris Devonshire-Ellis. China's String of Pearls Strategy. Diunduh 18 Maret 2009

Hal lain yang senantiasa membuat Beijing cepat curiga adalah, bila Armada Angkatan Laut India melakukan manuver laut di luar IOR (*Indian's Ocean Regional*), serta ambisi modernisasi unit-unit serta sistem kesenjataan armada kapal perangnya. Dua aktor yang nampaknya ingin diakui peranannya di kawasan Asia Selatan ini bukan saja berpotensi mengancam stabilitas keamanan maritim negara-negara sekitarnya, akan tetapi juga berpotensi meningkatkan eskalasi keamanan maritim di kawasan Asia Selatan dan Laut Andaman.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara memiliki integritas untuk turut menciptakan stabilitas keamanan kawasan selain juga untuk mengamankan kepentingan nasional yang tidak terlepas dari kemungkinan terkena distorsi dari menguatnya konflik di kawasan Asia Selatan tersebut. Dalam mengamankan serta

mengantisipasi eskalasi konflik di kawasan Asia Selatan dari aspek gelar kekuatan maritim khususnya di wilayah Laut Andaman dan Selat Malaka bagi kepentingan nasional Indonesia tentunya memerlukan penerapan strategi gelar pertahanan maritim secara terpadu yang tidak hanya ditentukan oleh dispersi gelar Armada Angkatan Laut akan tetapi juga kemampuan unsur pangkalan sebagai sarana dukungan gelar operasional terdepan "*Forward Deployment Service*" yang sangat ditentukan oleh pemberdayaan kemampuan pangkalan pada setiap tahapan kampanye militer.

Guna mencapai kemampuan dukungan pertahanan oleh unsur pangkalan pada wilayah terdepan, diperlukan sinergitas antar fungsi-fungsi pemerintahan khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan jalur potensi konflik kepentingan tersebut seperti wilayah Sabang dan Aceh, khususnya dalam aspek perencanaan tata ruang wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sekaligus sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional. Dengan demikian, gagasan dalam pengembangan serta pengelolaan tata ruang wilayah pertahanan negara yang meliputi upaya untuk mensinergikan tataran wilayah pertahanan dengan sistem tata ruang nasional, propinsi, kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan aspek kepentingan kesejahteraan daerah (*Province Prosperity*) dan kepentingan nasional (*National Interest*) secara berimbang dengan aspek kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (*National Defense and Security*).

Dari sisi tinjauan dari perspektif Penataan Ruang Wilayah Pertahanan di daerah, adalah sangat mendesak untuk menekankan pentingnya perwujudan integrasi dan sinergisme peran dan posisi institusi pertahanan negara pada khususnya pada tingkat kementerian yang harus mampu untuk mengakomodasikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan kewilayahan di daerah.

Adapun beberapa hal penting yang dirasakan perlu untuk mendapatkan atensi atau catatan dalam konteks sinergitas penataan ruang pertahanan yaitu *Pertama*, penataan ruang wilayah pertahanan

merupakan subsistem dari penataan ruang nasional, yang harus bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. *Kedua*, penataan ruang wilayah pertahanan merupakan amanat dari perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi senantiasa terkait dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain maupun pemerintah daerah. Dan *Ketiga*, sehubungan dengan aspek kelembagaan di daerah serta otonomi daerah, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah propinsi, kabupaten/kota sehingga keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan sejak tahap perencanaan di daerah⁴.

Secara konstitusional, Undang-undang Pertahanan Negara telah mengamanatkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah meliputi segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana dalam penyelenggaraannya berlandaskan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, selain itu penyelenggaraan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Adapun pengertian pertahanan negara adalah keikutsertaan segenap bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan negara, serta pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan Negara. Keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan kekuatan sendiri sebagai dasar pertahanan negara.

Dengan demikian, sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut maka pada hakekatnya Indonesia sebagai negara kepulauan dari aspek penyelenggaraan pertahanan sangat ditentukan oleh kemampuan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara sebagai tulang punggung pertahanannya. Hal tersebut berlandaskan pada

⁴ Workshop Sinergitas Tata Ruang Wilayah Pertahanan dengan Sistem Tata Ruang Nasional, Selasa (8/11), di kantor Kemhan Jakarta

pertimbangan bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pertahanan negara bagi negara kepulauan, sangat ditentukan oleh kemampuan proyeksi kekuatan pertahanan melalui laut dan udara di seluruh wilayah kedaulatannya, melalui kekuatan pangkalan serta komposisi sistem kesenjataan yang dilengkapi dengan teknologi yang handal serta kemampuan profesionalisme militer yang baik. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, negara harus mempersiapkan serta menyediakan tata ruang pada lokasi strategis sesuai konstelasi geografis Indonesia untuk dijadikan sebagai lokasi sarana pangkalan serta instalasi-instalasi militer, yang juga merupakan bagian dari sarana pendukung kawasan strategis nasional.

Adapun kawasan strategis nasional adalah merupakan salah satu dasar dari klasifikasi penataan ruang, yang merupakan implementasi dari amanat dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana pada penyelenggaraannya bertujuan untuk dapat mewujudkan ruang wilayah nasional yang berlandaskan kepada ketahanan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Undang-undang ini juga mengamanatkan agar pada penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan peraturan pemerintah, demikian halnya dalam undang-undang no 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang juga mengamanatkan tentang wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pangkalan, instalasi militer dan daerah latihan militer adalah termasuk dalam aset-aset pertahanan negara, dimana lokasinya dapat berada di darat, udara dan di laut kedaulatan dan yurisdiksi nasional.

Tinjauan lain dari sisi landasan hukum, adalah seperti yang sudah diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan*

*rakyat, sebagai kekuatan pendukung*⁵. Bila ditinjau dari pemahaman sistem pertahanan yang bersifat semesta, sesuai yang tercantum pada pasal 2 UU N0 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, secara substansial sistem pertahanan semesta diselenggarakan dengan melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Dengan demikian, khususnya dalam konteks Tata Ruang Wilayah Pertahanan adalah merupakan suatu desain strategis untuk mewadahi kepentingan pertahanan negara baik yang bersifat statis maupun dinamis yang dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyelenggaraannya harus senantiasa dikoordinasikan secara integratif dengan berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah dalam suatu sinergitas yang selaras dan berimbang.

Dari sisi penyelenggaraan pertahanan negara di laut, TNI AL sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengemban tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan menjaga keutuhan wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10, UU No. 3 Tahun 2002, Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam mewujudkan terjaminnya keutuhan dan kedaulatan negara RI atas seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional serta terjaminnya kepentingan bangsa Indonesia di dan atau lewat laut, memerlukan kemampuan TNI AL untuk dapat menyelenggarakan implementasi strategi berupa pengerahan dan penggelaran kekuatan ke mandala operasi di berbagai wilayah perairan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi.

Dalam implementasi strategi pertahanan laut, terutama dalam mendukung penyelenggaraan kampanye militer diwujudkan dalam pengerahan dan penggelaran kekuatan, dimana salah satu bentuknya secara fisik adalah berupa gelar operasional. Implementasi strategi ini tentunya berlandaskan pada pemikiran serta pertimbangan dari berbagai aspek yang meliputi kekuatan atau aset sistem kesenjataan yang dimiliki,

⁵ UUD 1945 pasal 30 ayat (2)

pertimbangan strategis antara kondisi geografis, strategi pilihan dan taktik yang dikembangkan turut ditentukan oleh kemampuan dukungan operasional dan logistik pangkalan-pangkalan TNI AL dalam mendukung unsur-unsur yang akan dioperasikan.

Bagi TNI AL, pangkalan adalah merupakan salah satu komponen dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), sehingga dalam implementasi strategi pertahanan di laut peran pangkalan dalam mendukung satuan/unsur operasional memiliki arti yang sangat penting dalam rangka mendukung upaya mengatasi serta mengantisipasi segala bentuk ancaman di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Terjaminnya keamanan perairan dari ancaman menuntut peran aktif TNI AL, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi Pangkalan. Pangkalan memiliki arti/fungsi logistik maupun strategik bagi armada Angkatan Laut.⁶

Dari aspek logistik operasional, pangkalan TNI AL memiliki fungsi sebagai titik dukungan pembekalan, perbaikan dan perlindungan serta rekreasi (*Rest, Repair, Replenishment and Recreation*) . Sedangkan dari aspek strategis, pangkalan juga memiliki fungsi sebagai sarana pendukung utama dalam menjamin kehadiran armada angkatan laut (*Naval Presence*) di sepanjang perairan perbatasan dan yurisdiksi nasional serta garis alur perhubungan laut strategis dapat terselenggara secara optimal. Tentunya untuk dalam melaksanakan perannya sebagai sarana pertahanan negara di laut, tidak terlepas dari aspek penyiapan tata ruang wilayah pertahanan sehingga dapat secara optimal terselenggara fungsi dukungan operasi militer yang dapat berupa kampanye militer dengan memanfaatkan seluruh potensi wilayah pertahanan yang tersedia.

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan diatas, maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan mengkaji aspek penyelenggaraan dukungan serta fungsi pangkalan TNI AL khususnya dari perspektif sinergitas perencanaan tata ruang wilayah pertahanan dalam mendukung penyelenggaraan peran dan fungsi pangkalan TNI AL untuk dapat mendukung upaya mengantisipasi kemungkinan meluasnya potensi

⁶ Kariso, Max. (1987), *Pangkalan Angkatan Laut*. Seskoal. Jakarta. Hal. 7

konflik kepentingan negara-negara kawasan Asia Selatan di wilayah perairan Laut Andaman hingga titik corong (*Choke Point*) menuju Selat Malaka dengan judul : “*Analisis Peran Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dalam Mendukung Kampanye Militer di Perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka*”.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan pangkalan tidak hanya memiliki peran dalam aspek logistik sebagai titik dukungan pembekalan, perbaikan dan perlindungan, akan tetapi juga memiliki nilai strategik, yaitu menjamin ketahanan lama (*sustainability*) gelar dan kehadiran unsur armada TNI AL (*naval presence*) di sepanjang garis perhubungan laut dan wilayah yurisdiksi nasional maupun dalam mendukung suatu gelar kampanye militer. Bagi TNI AL, pangkalan juga merupakan salah satu komponen dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), sehingga perlu mendapat perhatian terutama dari aspek arti penting peran pangkalan dalam mendukung upaya mengantisipasi ancaman di wilayah perairan Indonesia. Dalam mengoptimalkan fungsi pangkalan, untuk mendukung satuan operasional, sangat dipengaruhi oleh sinergitas dalam penetapan tata ruang pertahanan mulai dari tingkat nasional sampai dengan kewilayahan pada tingkat daerah.

Sistem Tata Ruang Nasional telah disusun dengan tujuan untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional⁷. Akan tetapi tujuan tersebut masih dirasakan belum dapat diwujudkan secara ideal, terutama ditinjau dari perspektif peran dan fungsi pangkalan TNI AL terutama dalam upaya pengembangan fasilitas pangkalan dihadapkan dengan prioritas pembangunan serta perkembangan tata ruang daerah. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis wilayah perairan Andaman dan Selat Malaka sehingga perlu adanya suatu perencanaan tata ruang pertahanan yang

⁷ UU No.26 Tahun 2007, pasal 2 titik (i) “*Penataan Ruang*”

dapat mendukung upaya mengantisipasi kemungkinan meluasnya potensi konflik kepentingan negara-negara adi daya di wilayah perairan Laut Andaman hingga titik corong (*Choke point*) menuju Selat Malaka sehingga dengan berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan analisa studi terhadap wilayah Kerja Pangkalan TNI AL Sabang. maka rumusan pertanyaan penelitian (*research question*) ini adalah sebagai berikut :

“ *Bagaimana Sinergitas Tata Ruang Wilayah Pertahanan Pangkalan TNI AL di Sabang dalam Mendukung Gelar Kampanye Militer TNI di Perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka?*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sinergitas Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam mendukung penyelenggaraan Peran dan fungsi Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang yang merupakan salah satu sarana pendukung utama gelar Kampanye Militer TNI, TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah perairan Andaman dan Corong Selat Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis, baik untuk pengembangan konsep maupun sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

a. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian lanjutan yang terkait dengan sinergitas implementasi perundangan maupun peraturan pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah dihadapkan dengan kebutuhan Tata Ruang Wilayah Pertahanan.

b. Manfaat praktis

Memberikan gambaran faktual terhadap implementasi tata ruang wilayah pertahanan serta implikasinya terhadap penyelenggaraan peran dan fungsi Pangkalan TNI AL.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan tesis ini meliputi kegiatan pelaksanaan penelitian di wilayah kerja Pangkalan TNI AL Sabang, dan Koarmabar Jakarta serta terutama Kawasan Pelabuhan Sabang,

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Sinergitas

Menurut James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert Jr. 1996⁸, sinergitas adalah hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi, terutama bila dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan, dimana dari tingkatan komunikasi tersebut akan menghasilkan tiga tingkatan (level) kerjasama yang meliputi *Defensif* yakni tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/defensif. *Respectful* yakni tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat akan memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. *Synergistic* yaitu, dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (*simbiosis mutualisme*), yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan *output* (keluaran) yang jauh lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Ketiga tingkatan tersebut satu sama lain menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu pendekatan sifat sinergitas berdasarkan pendekatan tingkat hubungan kepercayaan dan pola komunikasi yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan suatu keadaan atau keluaran (*output*).

Menurut Hanssens dan Johansson (1991)⁹, pada teori sinergitas ini, inti dari ide sinergi (*synergy*) adalah keseluruhan lebih baik daripada jumlah bagian-bagian (*the whole is more than the sum of the parts*). Merujuk pendapat tersebut, sinergi merupakan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh perpaduan kelompok yang terpisah yang berasal dari satu negara yang sama, dimana masing-masing melakukan tindakan-tindakan yang independen di dalam satu yang dituju. Intinya adalah perpaduan

⁸ Whileminus.W.,Managemen James A.F.Stoner, R.Edward Freeman, 1994 Intermedia hal .45.

⁹ Website <http://www.scribd.com/doc/72932026/Kajian-2007>

potensi untuk meraih hal yang sama, suatu kegiatan yang disinergikan akan mampu mendatangkan hasil yang baik untuk semua pihak.

Dari kedua pendapat di atas, dapat disampaikan bahwa teori sinergitas adalah hubungan antara dua pihak yang akan menghasilkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi. Disamping itu, pengertian sinergitas adalah menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan tujuan hasil atau *output* yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik dan maksimal dengan mendatangkan keuntungan berlipat ganda atau bersifat penjumlahan sebagai kelipatan lebih besar yang merupakan gabungan dari potensi yang ada dalam sinergitas tersebut.

2.1.2 Definisi Tata ruang

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum dan merupakan barang publik yang dapat tereksplorasi bila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya, dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada, karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Ruang perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara normal. Ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁰

¹⁰ Ir Imam S.Ernawi, MCM, M.Sc, 2008, Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU N.26 Th 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Konsep tata ruang dapat diartikan sebagai metode-metode yang digunakan dalam sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Sedangkan perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional sampai pada tingkat internasional seperti Uni Eropa dan ASEAN.

Bila ditinjau dari penataan ruang itu sendiri adalah, suatu konsep pemikiran atau gagasan yang mencakup penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya yang dapat berkaitan dengan ruang atau lokasi dalam suatu wilayah atau kawasan. Untuk meningkatkan manfaat suatu wilayah atau kawasan secara maksimal diperlukan perhatian yang teliti terhadap berbagai aspek kehidupan seperti struktur sosial, perlindungan lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian pada potensi ekonomi di lingkungan tersebut. Dari tinjauan ini, dapat diartikan bahwa pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang lebih optimal.

Salah satu definisi awal tata ruang yaitu dari *European Regional/Spatial Planning Charter* (disebut juga *Torremolinos Charter*), yang kemudian diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (*Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning/CEMAT*), yang berbunyi: "Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama."¹¹

Akan tetapi bila ditinjau dari aspek dimensi maka pengertian penataan ruang tidak hanya berdimensikan perencanaan pemanfaatan

¹¹ <http://www.coe.int/CEMAT>

ruang saja, akan tetapi lebih dari itu bahkan meliputi dimensi pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari sisi karakteristik penataan ruang karena terkait dengan ekosistem, sehingga upaya penataan ruang harus senantiasa melalui pendekatan secara sistem tanpa harus dibatasi oleh batas-batas kewilayahan dan sektor¹².

Dari sisi keterpaduan penanganan secara lintas sektoral dan lintas wilayah dengan skala propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala Pulau untuk keterpaduan lintas propinsi, keterlibatan peran serta masyarakat adalah mulai sejak tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang juga dijelaskan bahwa, Penataan Ruang adalah suatu langkah pendekatan spasial (Geospasial) untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang secara substansi terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang satu sama lain juga merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Perencanaan tata ruang dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan rencana tata ruang yang terutama meliputi penentuan lokasi produksi, pusat-pusat permukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya. Adapun pemanfaatan adalah merupakan tahapan dari penjabaran rencana tata ruang kedalam bentuk program investasi pengembangan dan kerangka waktu pelaksanaan. Sedangkan yang terakhir adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi aspek pengawasan dan termasuk didalamnya pemantauan serta penertiban pemanfaatan dan penggunaan ruang, agar pemanfaatan ruang dapat terlaksana sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang adalah satu hasil perencanaan tata ruang yang merupakan salah satu alat pembangunan daerah. Penataan ruang itu sendiri dilakukan secara melalui mekanisme hirarkis mulai dari tingkat nasional, propinsi,

¹² UU No. 24 tahun 1992

kabupaten/kota. Adapun muatan dan kegunaan ketiga rencana tersebut secara umum adalah :¹³

- a. Pada tingkat nasional; dikenal Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang berupa arahan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang negara dan memperlihatkan kawasan potensial, kawasan yang dilindungi, sistem kota, sistem prasarana dan sistem transportasi.
- b. Pada tingkat propinsi; disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang berupa arahan kebijakan pemanfaatan ruang propinsi dan meliputi arahan pengelolaan kawasan (kawasan lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu); arahan pengembangan kawasan potensial, arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas serta arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
- c. Pada tingkat kabupaten/kota; disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) berupa strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang memperlihatkan pengelolaan kawasan-kawasan (lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, tertentu), pengelolaan sistem (sistem kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan) dan pengelolaan sistem prasarana wilayah dan transportasi serta penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

Dari sisi implementasi, tata ruang di Indonesia mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah tersebut telah dikembangkan antara lain oleh Ir. Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan

¹³ UU No. 26 tahun 2007, Bab IV Pasal 8.

infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah, selain itu dikembangkan juga oleh DR. Ir Poernomosidhi (era transisi) yang turut memberikan kontribusi berupa lahirnya konsep hirarki kota-kota yang berupa hirarki prasarana jalan melalui penetapan Orde Kota.

Konsep tata ruang selanjutnya adalah oleh Ruslan Diwiryono (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007). Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang dalam tata ruang itu sendiri juga merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya¹⁴. Tata ruang adalah juga merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, sehingga dapat dikatakan bahwa Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Rencana tata ruang adalah merupakan hasil dari perencanaan tata ruang dan Wilayah dimana ruang adalah wadah yang merupakan suatu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dari pemanfaatan ruang tersebut.

¹⁴ PP Nomor 26 Tahun 2008, hal 4

2.1.3 Peran dan Fungsi Pangkalan TNI AL

Dari aspek peran dan fungsinya, Pangkalan TNI AL/Lanal memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL serta kotama TNI AL lainnya dan menyelenggarakan pembinaan potensi maritim untuk dapat digunakan sebagai kekuatan pengganda (*Force multiplier*) penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara di laut serta tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan kebijakan Kasal. Adapun fungsi dari Pangkalan TNI AL dalam melaksanakan tugas pokok tersebut meliputi tugas – tugas sebagai berikut¹⁵ :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program pembinaan kemampuan pangkalan beserta sarana dan pasarana pendukungnya dalam jajarannya berdasarkan rencana dan program Komando Armada.
- b. Menyediakan fasilitas labuh dan pangkalan bagi kapal, pesud dan Marinir dan satuan Operasi TNI AL lainnya yang melaksanakan tugas di wilayah kerja pangkalan.
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kapal, pesud maupun kendaraan lain sesuai kemampuan, serta dukungan fasilitas kendaraan bagi unsur-unsur TNI AL.
- d. Melaksanakan dukungan pembekalan bekal umum, bekal teknik dan bekal khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan serta penyaluran sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- e. Melaksanakan perawatan personel termasuk perorangan, perumahan, pelayanan dan dukungan kesehatan, angkutan, rekreasi, penegakan serta pembinaan tata tertib dan disiplin, pembinaan mental dan jasmani serta bantuan hukum, serta penyidikan kasus-kasus pidana.

¹⁵ Skep Kasal Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, “Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut”. Bab II.

- f. Membina kekuatan dan kemampuan jajaran Lantamal meliputi perencanaan, penyusunan, pelatihan, penyiapan dan pelaksanaannya.
- g. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut.
- h. Melaksanakan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut berdasarkan rencana dan program Komando Armada RI.
- i. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan Komsos TNI dalam daerah kewenangannya meliputi ¹⁶:
 - 1) Pembinaan kemampuan dan kekuatan karyawan TNI AL di lingkungan Pangkalan dalam rangka mendukung peran TNI dan TNI AL.
 - 2) Pembinaan Keluarga Besar TNI/ TNI AL di lingkungan Pangkalan dalam rangka membantu pembinaan Keluarga Besar TNI/TNI AL.
 - 3) Pembinaan Komunikasi Sosial TNI/TNI AL di lingkungan Pangkalan dalam rangka membantu pembinaan Komsos TNI/TNI AL.
 - 4) Pembinaan Pangkalan dalam rangka membantu pembinaan sistem dan metode peran TNI/TNI AL.
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan instansi lainnya baik dalam maupun di luar TNI AL untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok.
 - 6) Menyelenggarakan pengawasan melekat di lingkungan Pangkalan dalam rangka mencapai berhasil guna dan berdaya guna yang optimal terhadap sumber daya yang ada di wilayah kewenangannya.

¹⁶ Ibid, hal 8.

- 7) Mengelola kelestarian lingkungan hidup terhadap instansi yang berada di bawah kewenangannya agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.
- 8) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Syarat umum Pangkalan TNI Angkatan Laut

Keberadaan gelar pangkalan TNI AL memiliki nilai yang sangat strategis dalam hal mendukung setiap kegiatan satuan operasi yang digelar, sehingga mampu melaksanakan tugas operasi dalam waktu yang relatif lama dan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, dihadapkan dengan kenyataan kondisi geografis yang ada, pangkalan TNI AL harus memenuhi beberapa syarat umum antara lain¹⁷ :

- a. Kondisi lingkungan dimana pangkalan tersebut berada yaitu: kondisi geografis, kondisi sumber daya, kondisi tingkat kemampuan ekonomi daerah dimana pangkalan tersebut berada, kondisi sosial Budaya, dan kondisi iklim dan cuaca.
- b. Sesuai dengan fungsinya sebagai pendukung, yaitu:
 - 1) Dapat menjamin dispersi kapal, pesawat udara maupun pasukan Marinir untuk melaksanakan tugas-tugas operasionalnya;
 - 2) Dapat menjamin kesiapsiagaan operasional setiap komponen SSAT secara terus menerus;
 - 3) Dapat menciptakan situasi yang menguntungkan bagi kapal, pesawat udara maupun pasukan Marinir sendiri ataupun kawan, serta sebaliknya mempersulit gerakan lawan;
 - 4) Mempunyai pertahanan dan perlindungan yang memadai;

¹⁷ Ibid, Bab III.

- 5) Mempunyai fasilitas-fasilitas sesuai syarat-syarat operasional pangkalan.

2.1.5 Teori Kampanye Militer¹⁸

Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, serentak untuk mencapai sasaran strategi dan operasi pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan serta melibatkan komando permanen dan komando non permanen/bentukan. Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan bertujuan untuk menanggulangi setiap ancaman nyata baik yang didasarkan pada rencana kontinjensi yang dirumuskan melalui perencanaan strategis maupun untuk menghadapi ancaman yang bersifat mendadak dan tidak disiapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dapat dijelaskan hubungan kampanye militer dengan pemerintahan sebagai berikut¹⁹ :

- a. Hubungan kampanye Militer dengan Politik Luar Negeri.
 - 1) Dalam keadaan perang, penyelenggaraan politik luar negeri (diplomasi) bersifat mendukung penyelenggaraan kampanye militer, sedangkan kampanye militer menunjang politik luar negeri.
 - 2) Kemajuan yang dicapai dalam kampanye militer akan memperkuat upaya diplomasi.
 - 3) Penyelenggaraan politik luar negeri (diplomasi) merupakan upaya menggalang kekuatan internasional untuk mendapatkan dukungan politik dalam rangka penyelenggaraan kampanye militer.
- b. Hubungan Kampanye Militer dengan Politik Dalam Negeri.
 - 1) Politik dalam negeri yang tepat dapat meredam timbulnya krisis dari dalam sehingga tidak akan terjadi kontinjensi.

¹⁸ Sesko TNI, Naskah Departemen, 2012, "Teori Kampanye Militer".

¹⁹ Ibid, Hal 5.

- 2) Politik dalam negeri memiliki peran penggalangan kekuatan rakyat dalam rangka menunjang kampanye militer.
 - 3) Politik dalam negeri merupakan penggalangan kekuatan politik bangsa untuk dapatkan dukungan politik dalam rangka penyelenggaraan kampanye militer.
- c. Hubungan Kampanye Militer dengan Ekonomi Nasional.
- 1) Perencanaan kampanye militer sangat tergantung dari kemampuan ekonomi negara, yaitu berkaitan erat dengan besar kecilnya Pendapatan Nasional.
 - 2) Penyiapan kekuatan ideal untuk melaksanakan suatu kampanye militer belum dapat terpenuhi mengingat pemusatan anggaran pembangunan yang tertuju pada pembangunan bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
 - 3) Pelaksanaan kampanye militer perlu pengerahan dana yang cukup besar, di sisi lain pemerintah tetap dituntut untuk mampu menjamin biaya sosial yang tertuju pada kepentingan masyarakat dimasa perang.
- d. Hubungan Kampanye Militer dengan Perkembangan Budaya Bangsa.
- 1) Bangsa yang sedang berjuang menghadapi suatu konflik, atau pimpinan perjuangan dalam membangun negara, maka faktor "Will" (kemauan yang keras) merupakan faktor yang terpenting dalam mendorong keberhasilan.
 - 2) Bangsa Indonesia, mempunyai peluang besar meningkatkan keadaran masyarakat dalam hal bela negara dan keyakinan atas kekuatan ideologi bangsa.
 - 3) Eksploitasi kondisi sosial oleh pihak lawan dapat menghancurkan potensi bangsa dalam perwujudannya dapat melemahkan kemampuan ekonomi, kepemimpinan nasional

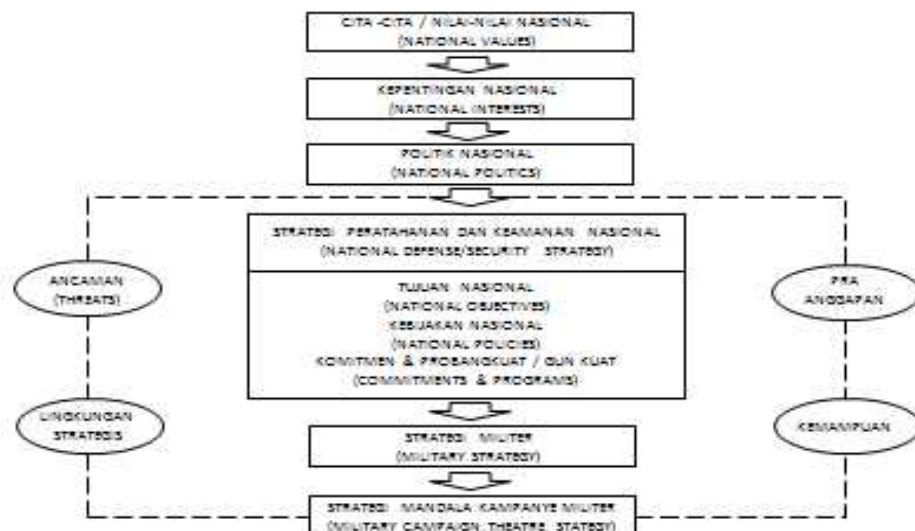
dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembinaan budaya penting untuk dipelihara dan dilestarikan.

Adapun Kampanye Militer diarahkan untuk menghancurkan pusat kekuatan musuh (*center of gravity*) yang mempunyai niat untuk melakukan invasi, yang dicapai melalui upaya terpadu dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional yang diselaraskan dengan efek yang ditimbulkan dari kekuatan militer (Kekuatan darat, laut, udara dan Pasukan khusus). Kampanye militer itu sendiri merupakan seni yang menghubungkan strategi medan pertempuran (taktik) dengan strategi militer (yang merupakan bagian dari strategi nasional) maupun tujuan operasi militer yang dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang ditentukan. Pada pelaksanaan rangkaian operasi militer tersebut, berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem politik nasional karena strata strategi militer itu sendiri merupakan bagian dari *grand strategy* atau strategi raya/ nasional yang memuat kepentingan nasional (cita-cita dan tujuan nasional).

Dengan dasar pertimbangan hal tersebut, maka penyelenggaraan kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dalam pengerahan kekuatan TNI serta dipadukan dengan kekuatan nasional lainnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang telah ditentukan. Dengan demikian, tentunya agar dapat diselenggarakan secara optimal, diperlukan pemahaman yang utuh tentang kedudukan Kampanye militer dalam konteks politik nasional maupun strategi beserta kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh masing-masing strata.

Kedudukan kampanye militer dalam strata perang berkaitan dengan kewenangan dan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan perang (kampanye militer/operasi gabungan) untuk menghadapi ancaman. Kedudukan atau strata kampanye militer diatur secara nasional dalam strata perang/strategi, dimana strata perang tertinggi adalah Strategi Nasional/strategi raya. Strategi Nasional/ Strategi Raya (*Grand/National Strategy*) merupakan ilmu dan seni dalam memberdayakan dan

menggunakan seluruh kekuatan nasional dalam rangka memenangkan perang. Strategi Nasional dapat berisi strategi diplomasi, strategi ekonomi, strategi militer dan strategi lainnya yang digunakan dalam pencapaian sasaran yang berupa cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional. Kedudukan dan hubungan kampanye militer dalam tataran politik nasional adalah merupakan seni yang menghubungkan strategi medan pertempuran (taktik) dengan strategi operasional yang dirancang dalam rangka pencapaian baik untuk tujuan strategi militer (yang merupakan bagian dari strategi nasional/raja) maupun tujuan operasi militer yang dilaksanakan dalam kurun dan ruang waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik nasional serta kemampuan ekonomi dan budaya nasional, sehingga diperlukan satu kesatuan pemahaman yang utuh tentang kedudukan dan hubungan kampanye militer dalam konteks politik nasional. Adapun kedudukan kampanye militer dalam tataran politik nasional dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut²⁰ :



Gambar 3. Kedudukan Kampanye Militer dalam Tataran Politik

²⁰ Sesko TNI, Naskah Departemen, 2012, "Teori Kampanye Militer", Hal 9.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada tatanan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional masih dirasakan perlu untuk diadakan peningkatan pemahaman serta koordinasi dan sinergitas antar instansi pada tingkat nasional maupun daerah sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang tersebut di atas, senantiasa perlu dijadikan sebagai prioritas serta landasan agar dalam implementasi perencanaan tata ruang dapat terselenggara sesuai dengan klasifikasi penataan ruang yang disusun berdasarkan tata wilayah administrasi yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer (saling melengkapi satu sama lain, saling bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya).

Dari konteks penyelenggaraannya, penyelenggaraan penataan ruang harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan dalam kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional diantaranya peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan mengacu berbagai peraturan tersebut maka Tata Ruang Wilayah menjadi kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman agar kepentingan pertahanan dan kepentingan kesejahteraan dapat berjalan secara simultan dalam suatu sinergi yang proporsional dan berimbang.

Sebagai komponen utama alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI AL memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan keutuhan wilayah laut nasional, serta untuk mewujudkan terjaminnya keutuhan dan kedaulatan negara atas seluruh

perairan yurisdiksi nasional serta terjaminnya kepentingan bangsa Indonesia di dan atau lewat laut. Adapun penggunaan kekuatan TNI AL adalah dengan cara pengerahan dan penggelaran kekuatan ke mandala operasi sesuai eskalasi ancaman yang dihadapi, harus menggabungkan pengamatan antara geografi, strategi dan taktik serta memperhitungkan kemampuan pangkalan-pangkalan yang akan digunakan dalam mendukung unsur-unsur yang akan dioperasikan di wilayah mandala operasi tersebut²¹.

Dengan demikian, dari aspek Sinergitas Tata Ruang Nasional dalam mewujudkan peran dan fungsi Pangkalan TNI Angkatan Laut yang merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan terdepan, perlu didukung dengan konsep tata ruang pertahanan yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional Pangkalan yang diutamakan pada kemampuan untuk mendukung satuan/unsur operasional TNI AL dalam setiap upaya mengantisipasi ancaman di wilayah perairan Indonesia sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang - undang.

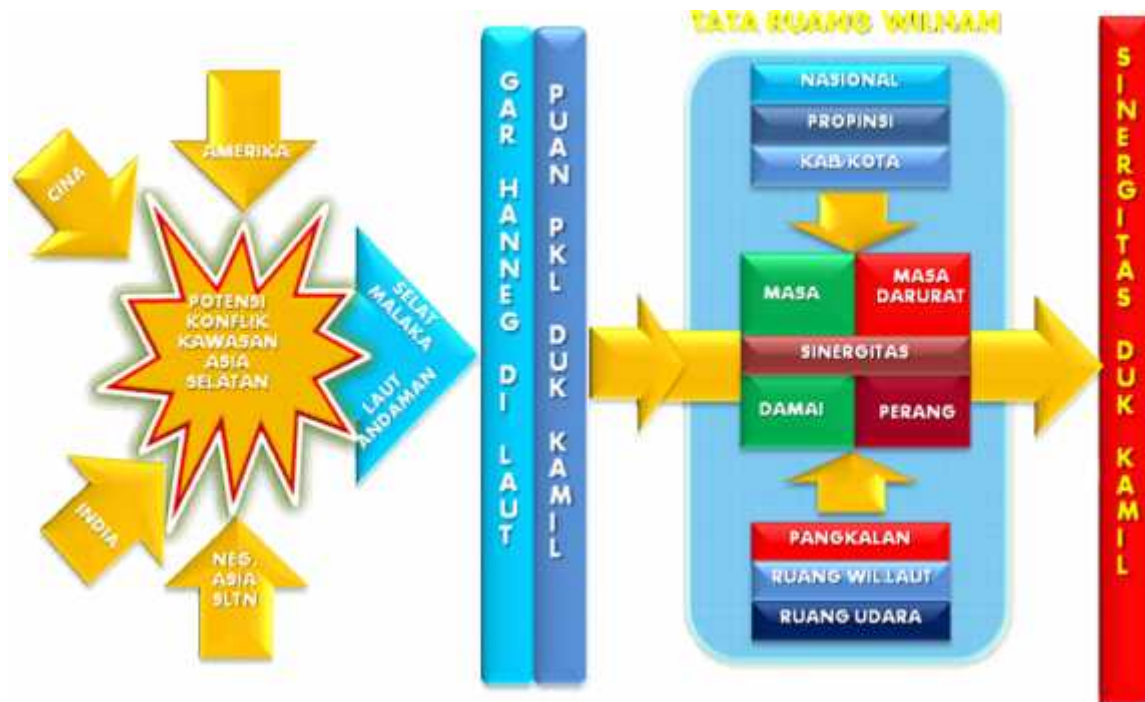
Konsep tata ruang tersebut harus dapat mencakup aspek penyelenggaraan pertahanan negara di laut pada masa damai, dimana wilayah pertahanan negara dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Maupun penyelenggaraan tugas – tugas TNI AL dalam keadaan perang, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang. Dengan demikian tentunya semakin jelas bahwa Penataan ruang wilayah pertahanan yang diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional, propinsi, atau kabupaten/kota memiliki arti yang sangat penting dalam turut serta menjamin terselenggaranya pertahanan dan keamanan negara secara optimal²².

²¹ Op.Cit.

²²<http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen>

Sebagai gambaran rinci dari kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut ini :

Gambar 4: Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian.

Hipotesis yang merupakan jawaban sementara dimana kebenaran dari jawaban tersebut harus dibuktikan melalui pengujian hipotesis, maka sesuai dengan rumusan masalah seperti pada uraian bab terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah :

“Bahwa kondisi implementasi tata ruang wilayah pertahanan sangat signifikan mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan fungsi pangkalan TNI AL dalam mendukung kampanye militer TNI AL.”

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, desain ini digunakan sebagai pendekatan peneliti untuk dapat memberikan gambaran, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi dan dihadapi oleh pangkalan TNI AL di Sabang. Dengan kata lain, desain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada”.²³

Secara umum, ciri-ciri metode penelitian deskriptif analisis sebagai berikut :²⁴

- a. Bersifat mendeteskikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual;
- b. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail guna mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung;
- c. Mendeteskikan subyek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan;
- d. Metode penelitian deskriptif analisis *tidak menguji hipotesa*, melainkan hanya *mendeteskikan informasi* apa adanya *sesuai dengan variabel yang diteliti*.

Desain penelitian deskriptif analitis juga merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian sehingga penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan atau pengolahan data statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 26.

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 45 - 47.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 **Dokumentasi.** Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian, seperti yang dilakukan peneliti di Perpustakaan Unhan, Mabes TNI AL dan melalui penjelajahan (*browsing*) di internet. Undang-undang /peraturan-peraturan pendukung seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional. Data juga akan diambil dari peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

3.2.2 **Observasi.** Penelitian dilaksanakan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti, di Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang. Penelitian secara langsung akan mengungkap kondisi nyata dilapangan serta mencatat aturan-aturan yang ada terkait dengan tujuan penelitian, sehingga akan mendapatkan data-data untuk menjawab permasalahan yang muncul.

3.2.3 **Wawancara.** Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data serta informasi yang digali dari sumber informasi melalui percakapan atau tanya jawab. Tujuan dari wawancara, adalah untuk mengungkap data dan informasi dari sumber langsung yang sifat datanya berhubungan dengan makna-makna yang berada dibalik perilaku atau situasi sosial yang terjadi. Distribusi checklist pertanyaan/questioner untuk pendalaman dilakukan wawancara parsial untuk memperkuat obyektivitas data, meliputi wawancara dengan Panglima Armada Barat; Dirwilhan; Kadisfaslanal;

Danlanal Sabang; Kafasharkan Sabang, Walikota Sabang, Ketua DPRD Sabang, Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Sabang, Kepala Dinas Tata Kota Sabang (BPKS) dan Kepala Adpel Sabang.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur dengan inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, serta membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, yang disampaikan secara bebas namun dapat menggali data dan informasi yang diharapkan. Dari kegiatan wawancara yang diharapkan adalah dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, selain pihak yang diajak wawancara juga diminta/memberikan pendapat dan ide-idenya.

3.3. Teknik Analisis Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data kualitatif mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yakni²⁵:

- a. **Reduksi data**, yaitu memilih dan memilah data-data pokok sesuai dengan fokus penelitian. Data yang didapatkan akan dipilih serta dipilah sesuai dengan fokus apa yang menjadi penelitian sehingga menghasilkan data yang dapat menjawab permasalahan.
- b. **Display/penyajian data**, yakni langkah menyajikan data dalam bentuk : kata, kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel, dan matriks. Penyajian data dilaksanakan dengan merangkai kata-kata dari data yang didapatkan sehingga menjadi kalimat yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang didukung dengan gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel dan matriks yang dapat disajikan dengan benar.
- c. **Verifikasi Data**, yaitu data yang terkumpul, diuji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji. Verifikasi data diperlukan sehingga hasil analisis data yang

²⁵ Dr. Basrowi, M.Pd.& Dr. Suwandi, M.Si., PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", hal.209

didapatkan akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan, tentunya bila data yang ada adalah data yang baik dan benar.

3.4 Rencana Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara, antara lain²⁶ :

- a. **Perpanjangan Observasi**, yakni melakukan pengamatan terhadap obyek kajian secara mendalam, memerlukan waktu yang lama sehingga akan dapat diketahui validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Meningkatkan ketekunan, yakni menekuni data yang diperoleh secara cermat, hati-hati, dan cermat sehingga akan dapat memilah dan memilih data yang valid dan kredibel.
- b. **Triangulasi**, yakni *cross-check data* atau pemeriksaan silang antara data, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu. Triangulasi merupakan pengecekan data-data dari berbagai sumber yang didapatkan dengan berbagai cara. Mengecek kebenaran data dengan membandingkan dari sumber informasi lain dicek silang dengan menggunakan triangulasi, dengan tujuan untuk membandingkan tingkat kebenaran data dengan kenyataan sebenarnya. Triangulasi ini menguntungkan peneliti dalam dua hal, yaitu: *pertama*, Mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada metode dan sumber informasi tertentu; *kedua*, Meningkatkan validitas kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang lebih luas.
- c. **Analisis negatif**, yakni pengecekan adanya responden yang menjawab atau menanggapi pertanyaan dalam wawancara secara berbeda dengan sebagian besar responden lainnya sehingga perlu ditelusuri motif dan alasannya. Jawaban negatif adalah fakta yang menyimpang dari jawaban responden lainnya, yang ditemukan saat

²⁶ <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/03/teknik-pemeriksaan-keabsahan-data.html>

penggalian data. Data negatif ini dapat digunakan untuk menguji dan membandingkan tentang kebenaran yang didapatkan dari yang lain, dengan data yang didapatkan.

d. **Menggunakan *member check***, yakni meminta dan mengkonfirmasi kepada informan untuk melihat dan membaca kembali rangkuman hasil wawancara yang dilakukan peneliti sehingga informan dapat memberikan persetujuan terhadap isi wawancara tersebut. *Member check* dalam penelitian dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada para informan yang telah memberikan informasi pada peneliti. Dalam diskusi peneliti menyampaikan temuan-temuan yang akan dituangkan dalam penulisan thesis kepada pemberi informasi.

e. **Interpretasi Data**, yakni mencari pemahaman, pemaknaan dan penghayatan terhadap data yang telah diolah. Teknik analisis data seperti ini sering disebut dengan teknik analisis *verstehen* (pemaknaan).

3.5 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah terdiri dari : sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara temu muka dan wawancara serta diskusi, serta data hasil pencatatan langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang bukan diupayakan secara langsung oleh peneliti. Data tersebut dapat berupa dokumen perundangan, jurnal, catatan, tabulasi data, serta peta yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan TNI AL Sabang, adapun waktu penyusunan tesis ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan September 2013 dengan rincian kegiatan sesuai **Tabel.1.3** berikut ini :

Tabel 1.3: Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2013									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pengajuan Judul & Penyusunan Proposal	x	x								
2.	Observasi Awal		x	x							
3.	Seminar Usulan Penelitian			x							
4.	Revisi Usulan Penelitian				x						
5.	Studi Lapangan				x	x	x				
6.	Pengolahan Data						x	x			
7.	Penyusunan Draft Tesis						x	x	x		
8.	Ujian Sidang Tesis										x
9.	Perbaikan Naskah Tesis										x

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kepentingan ekonomi dan politik di perairan laut Andaman dan Corong Selat Malaka.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki kelebihan dari sisi posisi geografis yang berada pada posisi strategis dunia, dimana 4 (empat) dari 11(sebelas) *Sea Lanes of Communications* (SLOCs) dunia berada di wilayah perairan Indonesia, sehingga perairan laut Indonesia memiliki arti penting baik bagi kepentingan sendiri maupun kepentingan dunia dan menjadi urat nadi jalur transportasi perdagangan dunia lewat laut (*Seaborn Trade*)²⁷. Perkembangan lingkungan strategi yang terjadi di lingkup internasional, regional maupun nasional tentunya sangat mempengaruhi dinamika kemaritiman di Indonesia, sehingga secara tidak langsung kemampuan hidrografi Indonesia menjadi semakin dirasakan peranannya secara faktual di setiap lini aktifitas kelautan.

Menurut Ir. Teguh Irwanto, *Offshore North West Java* (2013) bahwa jasa layanan hidrografi (*hydrographic services*) menjadi mengemuka manakala tuntutan kebutuhan industri perminyakan lepas pantai meningkat²⁸. Hal ini menjadi indikasi bahwa aktifitas hidrografi menjadi begitu penting untuk mendukung berbagai kepentingan yang menyangkut laut dan pantai sebagai “ekonomi biru”. Istilah “ekonomi biru” merupakan seluruh kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan laut, pelabuhan dan wilayah pesisir. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di laut bergantung pada pengetahuan tentang batimetri dan kondisi alamiah dasar laut, pengetahuan akan bahaya rintangan yang ada serta pengetahuan akan pasang surut dan arus.

²⁷ Dishidros TNI AL, Makalah Pengajak, Sarasehan Hari Hidrografi Dunia 2013, “*Hydrography-Underpinning The Blue Economy*”. Jakarta, Juni 2013

²⁸ Ibid, hal. 5

Pengumpulan dan diseminasi informasi hidrografi merupakan tugas para surveyor hidrografi dan ahli kartografi nautika di seluruh dunia. Pekerjaan yang mereka lakukan ini menjadi hal yang paling mendasar dari seluruh aktifitas yang diperlukan untuk membangun dan mewujudkan “Ekonomi Biru (*Blue Economy*)”²⁹. Tingginya kebutuhan data Hidrografi juga memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan serta pemanfaatan media laut sebagai sarana transportasi dan eksplorasi. Melalui data hidrografi batas negara serta perencanaan strategi kemaritiman disusun dan dikembangkan, demikian halnya dengan perencanaan tata ruang wilayah perairan, dan wilayah pertahanan.

4.1.2 Gambaran strategi negara-negara kawasan Asia Selatan dalam penguasaan jalur perairan Selat Malaka-Andaman-Sabang.

Kawasan Asia Selatan selama ini dikenal sebagai pengeksport instabilitas bagi kawasan di sekitarnya, konflik di Srilangka, Afghanistan, Pakistan dan India, turut mewarnai stabilitas di kawasan sekitarnya. Mencermati dua negara raksasa khususnya China yang lebih memandang pragmatik hubungan bilateralnya dengan India dilandasi pemikiran bahwa kemajuan India masih bisa diatasi China³⁰, serta memosisikan India dalam tataran hirarkis kedua yakni sebagai “negara tetangga”. Konstruksi perbatasan darat China-India secara garis besar disebut garis McMahon atau dikenal sebagai LAC (*line of actual control*) meskipun Beijing pada tahun 1914 tidak mau menandatangani³¹ wilayah perbatasan yang memanjang dan dibangun dari Ladakh di Kashmir ke selatan dan ke timur sepanjang 2100 mil darat, dipotong Nepal dan Bhutan merupakan produk isu perbatasan darat yang tidak pernah terselesaikan.

²⁹ www.themaritimealliance.org, *The Maritime Alliance based on The National report: State of the US , Ocean and Coastal Economies, 2009* dalam Surat Direktur IHO Nomor 13/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Persiapan Hari Hidrografi Dunia 2013.

³⁰ Rosenfield, Julia.M, Center for US Naval Analyses, 2010, “*Exploring The China-India Relationship, Roundtable Report*”.hal.2.

³¹ Kumar, hal 13,

Fokus China tentang ekonomi dan perdagangan melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) membuat negeri ini sangat peka terhadap kekuatan maritim yang tumbuh di sepanjang rute pendekat alur SLOC tersebut, dan membuat Beijing cepat curiga bila India melakukan manuver laut di luar IOR (*Indian's Ocean Regional*) ditambah ambisi modernisasi unit-unit armada IN-nya. Dua aktor yang nampaknya ingin diakui peranannya di kawasan Asia selatan ini bukan saja mengkhawatirkan negara sekitarnya, tetapi juga berpotensi meningkatkan suhu keamanan maritim dan Amerika tentu saja tidak mau kehilangan dominasi pengaruh meskipun sudah lama meninggalkan kawasan ini.

Kawasan Asia selatan membentang mulai dari Afghanistan, memotong Pakistan, anak benua India, terus ke Nepal, Bhutan dan turun ke Bangladesh dan Sri Lanka³². Masing-masing memiliki sejarah panjang yang diwarnai konflik, pertikaian bahkan perang yang tidak kunjung usai. India memiliki isu perbatasan darat yang tak pernah selesai juga termasuk pertikaian energi air bersih dengan Pakistan maupun China.

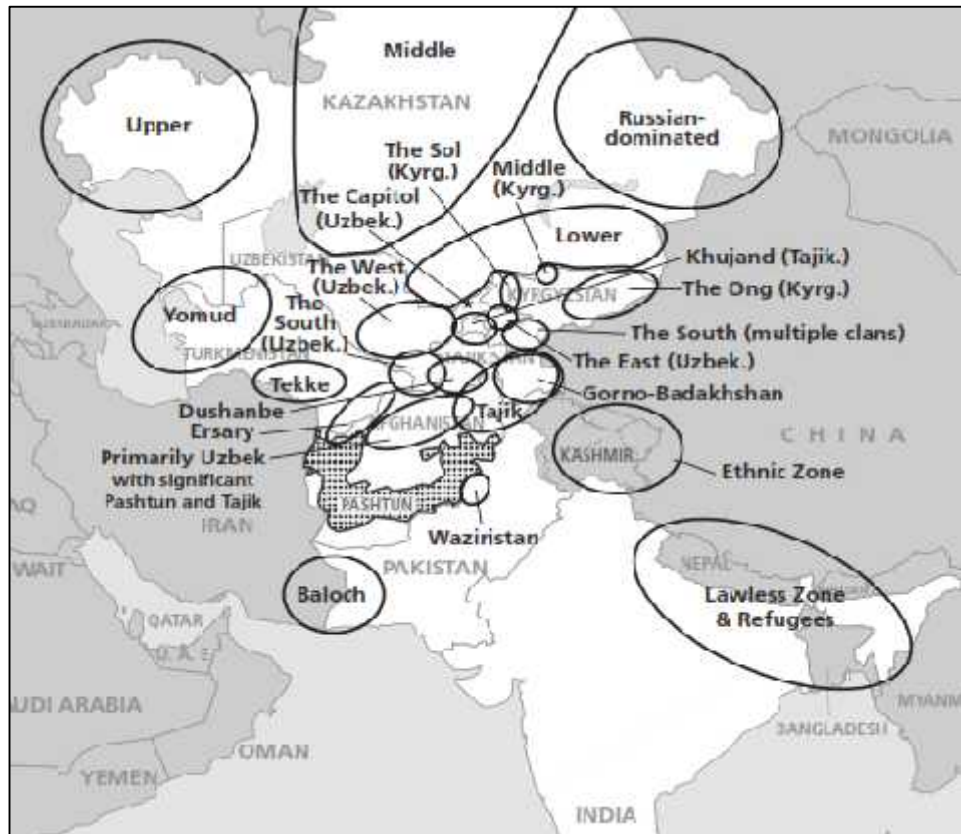
Terorisme, insurgensi dan perang saudara berlangsung di Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, India dan Pakistan, dan faktor ini sangat kritikal menambah parahnya isu keamanan mengingat hadirnya aktor non-negara di dalam maupun di luar yang berinteraksi dan membantu gerakan tersebut. Kehadiran kelompok-kelompok ilegal bersenjata tersebut memonopoli kekerasan di negara tersebut, dan mengkooptasi aparat keamanan untuk melibatkan diri bagi kepentingan kelompok ilegal itu³³. Beberapa negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, Nepal, Bhutan dan Bangladesh sering disebut-sebut telah melakukan manajemen perbatasan yang tidak semestinya baik terhadap garis batasnya dan maupun pada wilayah teritorialnya.

Di luar itu semua ada aktor-aktor yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi kawasan ini seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel, Iran, AS dan lain-lainnya, termasuk Jepang dan Korea selatan, dua aktor

³² Peters, John.E, et-all, 10 persons, Project US Air Force, RAND, 2006, "*War and Escalation in South Asia*".

³³ Ibid, hal.18

terakhir ini lebih banyak terlibat dalam isu komersial³⁴ bahkan China dinilai sebagai tetangga yang potensial mempengaruhi iklim kawasan ini. Pemetaan umum entitas pertikaian dalam tanda lingkaran didemonstrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5. Peta kawasan Asia selatan³⁵

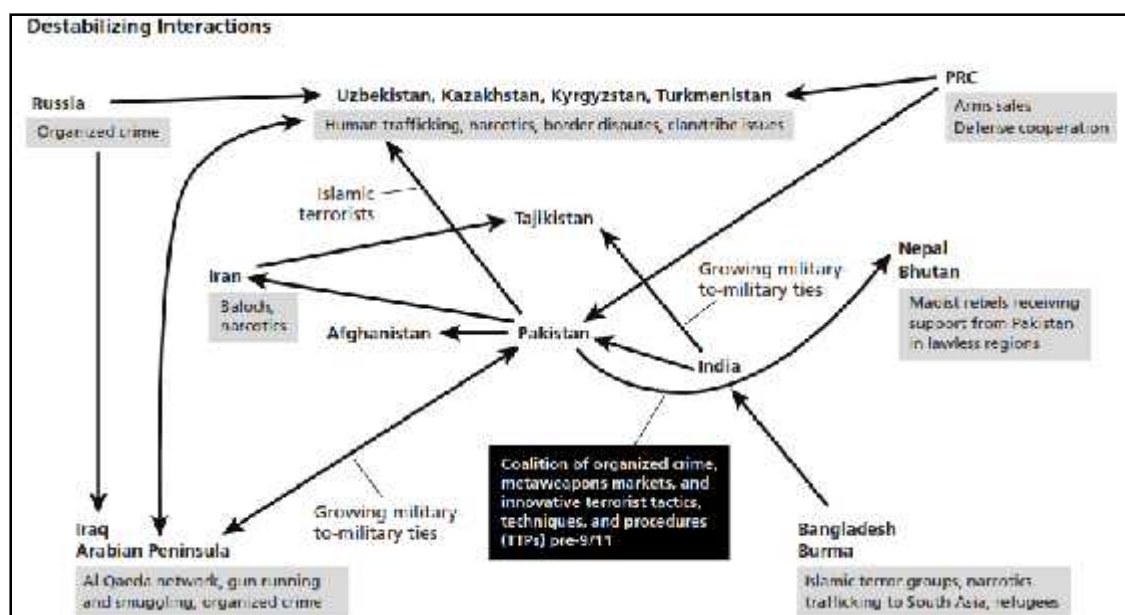
Analog dengan aktor asimetrik atau aktor non-negara lainnya yang cukup berpengaruh terhadap stabilitas kawasan ini, bisa jadi sangat dekat dengan isu pertikaian antar aktor. Sesungguhnya setiap aktor di kawasan ini menghadapi beberapa format besar perselisihan etno-religi, terorisme,

³⁴ Ibid, hal 3,

³⁵ Sumber: Ibid, Hal 28

atau insurgensi, dan semua potensi tersebut mampu melibatkan dirinya lebih jauh ke dalam isu antar aktor dan membuat kawasan ini menjadi semakin berbahaya. Bila dikumpulkan ada beberapa aktor yang berinteraksi dengan kawasan ini baik dengan cara melibatkan diri, atau berkompetisi baik perdagangan maupun militer dengan masing-masing insentifnya.

Menjadi kekhawatiran bila kelompok-kelompok anti pemerintah tersebut sukses dengan kampanye mereka, maka negara akan turun derajatnya menjadi negara yang gagal (*failed-state*) atau bahkan runtuh (*collapse state*) sama sekali dan sebaliknya derajat “khaos” (*chaos*) seperti itu sangatlah dinantikan sekali oleh kelompok ilegal tersebut seperti teroris, dan aktor non-negara ilegal (*traffickers*) dan bentuk organisasi kejahatan internasional lainnya³⁶ Bahasan ini dapat divisualisasikan dalam sketsa (model) dinamik yang menggambarkan interaksi destabilisasi seperti gambar di bawah ini.

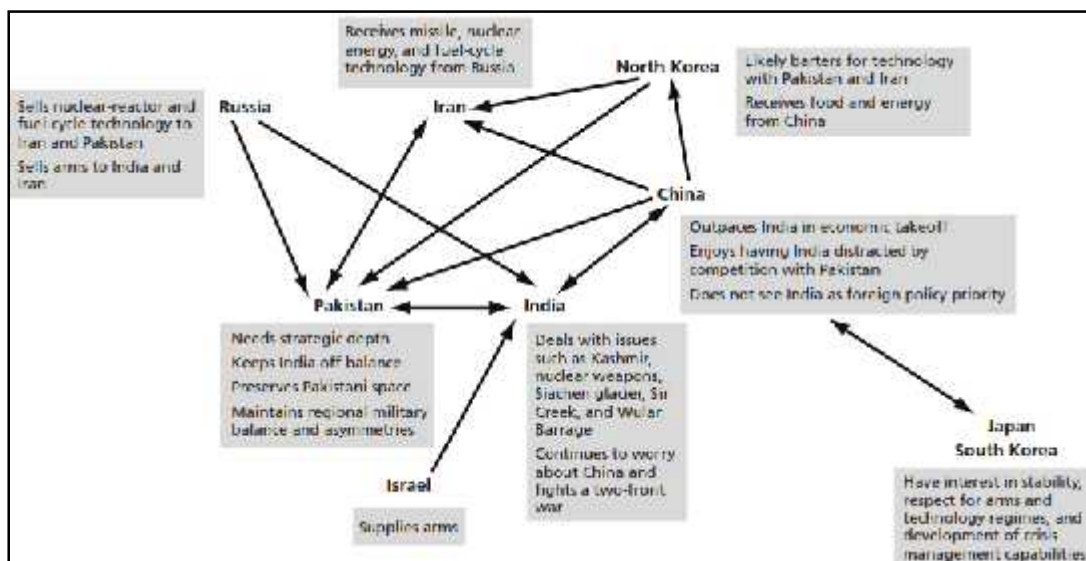


Gambar 6 : Interaksi aktor non negara yang berpotensi membuat destabilisasi kawasan³⁷

³⁶ Ibid, hal 24

³⁷ Ibid, hal 56

Termasuk di dalam entiti ini adalah kelompok yang hidup bermasyarakat di dalam negara seperti suku, golongan, agama (*tribal, clan*), yang bisa saja mengatas namakan kepentingan politik atau demokrasi dengan mengangkat isu-isu tertentu seperti Pashtun atau Baloch, dalam situasi tertentu kelompok-kelompok tersebut bisa menggunakan milisia atau kelompok berseragam dan dipersenjatai. Berikutnya di bawah ini menggambarkan hubungan antar aktor yang berpotensi merusak stabilitas kawasan.



Gambar 7: Kooperasi antar Negara yang berpotensi merusak stabilitas Kawasan³⁸

Meskipun AS belum dilibatkan dalam model ini, bisa saja konflik AS versus Iran sekarang ini dengan skenario terburuk yakni pecahnya perang Iran baik dengan Israel dan atau AS akan memperkaya model ini. Dengan mencermati Gambar 4.2., dengan pertumbuhan dan interaksi kelompok ilegal ditambah 'Gambar 4.3.' tentang interaksi kekuatan teknologi dan nuklir memberikan peluang terciptanya instabilitas kawasan Asia Selatan.

³⁸ Ibid, hal 60.

4.1.2.1 Aceh-Sabang menjadi bagian dari Geostrategi AS dan Cina di kawasan Asia Tenggara (Ancaman dominasi kekuatan AL Cina).

Wilayah Propinsi Aceh (termasuk Sabang) merupakan pintu masuk Selat Malaka, jalur teramai di dunia sekaligus menjadi jalur strategis banyak negara di kawasan timur dalam *supply* energi maupun barang-barang industri dan manufaktur dagang. Secara geografis, nilai Aceh sangat tinggi bagi negara-negara penguasa ekonomi dunia baru khususnya AS, India dan China dalam upaya mendukung rencana strategisnya di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka juga merupakan jalur laut menuju Laut Cina Selatan, tempat paling ramai di dunia yang juga merupakan kawasan yang sangat rawan konflik dimana lebih dari 10 negara “membagi” kepentingannya di kawasan tersebut.

Sejak kehilangan pangkalannya di Philipina, praktis AS “kehilangan” pamor di kawasan Asia Tenggara, dan kedudukannya dengan cepat digantikan oleh Cina. Cina sendiri pada perkembangan terakhir semakin menunjukkan dominasinya di kawasan Asia sebagai entitas tunggal kawasan tersebut. Beberapa kali telah terjadi konflik di Laut Cina Selatan dengan negara-negara yang berada di kawasan tersebut, dan yang terakhir adalah antara militer laut Cina dan Philipina. Sehingga secara geostrategis, AS tentunya menilai bahwa presentasi negaranya di kawasan Asia Tenggara sangatlah diperlukan dan menjadi prioritas, sebagaimana kebijakan baru pemerintahan Obama yang akan menjadikan kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara sebagai prioritas geostrategisnya³⁹.

Inilah ancaman potensial yang mengintai wilayah bagian ujung barat NKRI di kemudian hari, bahwa salah satu bagian dari wilayah provinsi Aceh seperti halnya Sabang, akan sangat memungkinkan untuk dijadikan salah satu pangkalan AS ataupun negara adidaya dibagian selatan Asia (India) ataupun China dalam membangun perimeter strategisnya di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Sabang menjadi daerah

³⁹ www.kompasiana.com/raflihasan. Rafli Hasan, Opini, *Ada Bau Busuk di Tengah Upaya Go Internasional Aceh*. Diunduh tanggal 10 Juli 2013 pukul 12.25 Wib

yang sangat strategis bagi penempatan pasukan maupun penjaga keamanan di kawasan.

4.1.2.2 Perimbangan kekuatan AL India dengan Negara-negara Asia Selatan lainnya

Pembangunan kekuatan militer India tidak lepas dari permusuhan negara itu dengan Pakistan, sehingga di masa lalu pembangunan ditujukan untuk menghadapi tetangga serumpunnya itu. Kedua negara telah beberapa kali terlibat perang, yaitu 1947, 1965 dan 1971, yang juga melibatkan Angkatan Laut. Seiring dengan perubahan konteks strategis, pembangunan kekuatan laut India sejak 1990-an bukan saja sekedar ditujukan untuk menghadapi Pakistan, namun melampaui hal tersebut, yaitu ingin menegaskan otoritas politik dan militer India terhadap Samudera India. Pembangunan kekuatan laut India, sebagaimana dinyatakan dalam *The Indian Navy's Vision Document* ditujukan untuk mempromosikan lingkungan yang tenang dan damai di kawasan Samudera India untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, diplomasi dan militer India⁴⁰.

Saat ini, India tengah membangun kekuatan lautnya menuju status *blue water navy*. Pembangunan itu juga ditunjang oleh kinerja pertumbuhan ekonomi negara itu yang berkisar antara 7 % s.d. 8 % dalam tiga tahun terakhir turut berkontribusi terhadap peningkatan anggaran pertahanan. Pada tahun 2006, anggaran pertahanan India meningkat 9,2 % menjadi Rs 908 milyar atau US\$ 20,5 milyar⁴¹. Untuk mencapai status *blue water navy*, para perencana strategis di Angkatan Laut India sangat dipengaruhi oleh pemikiran Alfred Thayer Mahan, khususnya aspek geopolitik. Apabila di masa lalu Mahan memandang strategisnya Samudera Pasifik dari aspek geopolitik dan geo ekonomi, India di abad

⁴⁰ Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Navy), *The Indian Navy's Vision Document*, May 2006

⁴¹ The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2007*. London: 2007 The International Institute for Strategic Studies, 2007, hal.308

ke-21 menerjemahkannya sebagai strategisnya Samudera India dari kedua aspek yang telah disebutkan sebelumnya⁴²

Guna menegaskan dari klaim India terhadap Samudera India, Angkatan Laut India terus meningkatkan frekuensi penyebaran ke negara-negara di sekitar perairan itu. Sebagai contoh, pada Agustus 2008 Gugus Tugas Angkatan Laut India melaksanakan penyebaran di Laut Merah dan sepanjang pantai timur Afrika untuk jangka waktu dua bulan. Gugus Tugas itu terdiri dari satu kapal perusak INS Delhi, dua kapal fregat kelas Talwar yaitu INS Talwar dan INS Godavari dan satu kapal bantu INS Aditya. Selain melaksanakan diplomasi Angkatan Laut, Gugus Tugas itu juga akan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Laut Prancis dan beberapa negara lain di sekitar Laut Merah dan pantai timur Afrika.

Dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan laut India, dalam 10 tahun terakhir pemerintah India telah menerbitkan sejumlah dokumen yang merupakan acuan bagi pembangunan kekuatan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut merefleksikan pandangan pemerintah dan Angkatan Laut India mengenai peran dan postur Angkatan Laut ke depan. Beberapa dokumen dimaksud antara lain *The Strategic Defence Review: The Maritime Dimension – A Naval Vision* (May 1998), *The Indian Maritime Doctrine* (April 2004), *the Indian Navy's Vision Statement* (May 2006), *Roadmap to Transformation* (October 2006), and *Freedom to Use the Seas: India's Maritime Military Strategy (IMMS)* (September 2007).

Dalam *The Indian Maritime Doctrine*, hal yang digarisbawahi adalah kebutuhan untuk mengendalikan *choke points*, pulau-pulau penting dan jalur-jalur perdagangan vital⁴³. Terkait dengan kebutuhan tersebut, Angkatan Laut India menekankan diplomasi Angkatan Laut sebagai salah satu tugas utamanya di masa damai. Adapun wilayah penyebaran kekuatan laut India dalam rangka diplomasi Angkatan Laut terbentang

⁴² Scott, Dr. David, "India's Drive for a Blue Water Navy", *Journal of Military and Strategic Studies*, Winter 2007-2008, Vol.10, Issue 2, hal.2-3

⁴³ Scott, Dr. David, "India's Drive for a Blue Water Navy", *Journal of Military and Strategic Studies*, Winter 2007-2008, Vol.10, Issue 2, hal.2-3

dari Teluk Persia hingga Selat Malaka yang ditetapkan sebagai kawasan kepentingan India yang sah⁴⁴.

Luasnya kawasan kepentingan India yang sah merupakan salah satu pendorong mengapa India membangun kekuatan lautnya menuju status *blue water navy*. Dengan status *blue water navy*, Angkatan Laut India mempunyai kemampuan untuk diproyeksikan di sekitar Samudera India sebagaimana dinyatakan oleh Laksamana Mehta. Pada tahun 2005, alokasi anggaran bagi Angkatan Laut India untuk personel, operasi dan pemeliharaan sebesar Rs 60,3 milyar, selanjutnya pada 2006 meningkat menjadi Rs 67,1 milyar⁴⁵. Sedangkan alokasi anggaran Angkatan Laut bagi pengadaan dan konstruksi pada 2005 sebesar Rs 87,5 milyar dan meningkat menjadi Rs 90,5 milyar (US\$ 2,0 milyar) pada tahun 2006⁴⁶. Dengan alokasi dana pengadaan sebesar itu, Angkatan Laut India melakukan pengadaan enam kapal selam kelas Scorpene dari Prancis yang direncanakan akan diserahkan pada 2012 dan 2017. Keenam kapal selam itu dibangun di galangan Magazon Dockyard Limited, Mumbai di bawah program transfer teknologi dari Prancis.

Selama ini kekuatan kapal selam India ditunjang oleh kapal selam *Kilo Class* yang kini tengah menjalani program *overhauled* dan kelas U-209 dari Jerman. Sepanjang sejarah, India merupakan negara operator kapal selam buatan Uni Soviet/Rusia dan baru pada tahun 1980-an melirik kepada kapal selam buatan Barat. Pada tahun 2009, India akan memperkuat pula armada kapal selamnya dengan kapal selam nuklir kelas Akula yang dibangun di galangan Magazon Dockyard Limited, Mumbai dan dipersenjatai dengan rudal nuklir balistik.

Ambisi menuju *blue water navy* India ditunjang pula dengan pembelian bekas kapal induk Rusia kelas Admiral Gorskhoval senilai US\$ 1,5 milyar pada 2004, yang kini namanya menjadi INS Vikramaditya dan akan dilengkapi dengan pesawat tempur MiG-29K. Eksistensi INS Vikramaditya nantinya akan menggantikan kapal induk INS Viraat yang

⁴⁴ Ibid, hal. 3

⁴⁵ The International Institute for Strategic Studies, Op.cit hal.309

⁴⁶ Ibid

telah berusia lebih dari 50 tahun. Saat ini program *overhauled* INS Vikramaditya di Rusia yang dijadwalkan berlangsung dari 2004 sampai dengan 2008 mengalami sejumlah masalah dan berakibat pada pembengkakan biaya. Diperkirakan INS Vikramaditya baru bisa bergabung dengan armada India pada 2012, setelah pada 2010 akan menjalani *sea trial* selama 18 bulan⁴⁷.

Seperti dijelaskan sebelumnya, India pada 2022 mempunyai ambisi memiliki tiga kapal induk. Tiga kapal induk itu masing-masing akan beroperasi di Laut Arab, Teluk Benggala, dan Samudera India dalam tiga *Carrier Battle Group*. Dua kapal induk lainnya dibangun di Chochin Shipyard, dikenal sebagai *Indigenous Aircraft Carrier (IAC)*. Menurut rencana, kapal induk pertama buatan India akan diluncurkan pada 2010, sedangkan kapal induk kedua akan diluncurkan tujuh tahun kemudian.

Dibandingkan dengan daya jangkau kapal induk India yang dioperasikan saat ini, INS Vikramaditya akan mampu beroperasi sejauh 22.530 km (14.000 mil laut), adapun dua kapal induk lainnya dirancang untuk beroperasi sejauh 12.070 km (7.500 mil laut)⁴⁸. Sebagai perbandingan, INS Viraat daya jangkauya “cuma” 8.050 km (5.000 mil laut)⁴⁹. Dengan daya jangkau yang lebih jauh tersebut, tidak diragukan lagi bahwa India memang merupakan kekuatan *blue water navy* dalam beberapa tahun mendatang, yang mana Angkatan Laut India akan menjadi instrumen kebijakan luar negerinya.

Untuk kapal kombatan atas air, Angkatan Laut India tengah melaksanakan sejumlah pengadaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini Yantar Shipyard di Kaliningrad, Rusia tengah membangun tiga kapal fregat kelas Talwar pesanan India senilai US\$ 1,6 milyar yang direncanakan diserahkan pada 2012⁵⁰. Sedangkan 38 kapal lainnya,

⁴⁷ <http://india-defence-com/reports-3880> Russia Valuing INS Vikramaditya Aircraft Carrier Deal At US\$ 2.7 billion”,

⁴⁸ Scott, Op.cit hal.17-18

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ <http://india-defence-com/reports-3471> “India, Russia Sign Contract for Construction of Three Frigates for Indian Navy”,

termasuk satu kapal induk, tiga fregat, tiga perusak, empat korvet anti kapal selam, tengah dibangun di sejumlah galangan di seluruh India.

Pada September 2007, India menerima kapal jenis *Landing Platform Dock* (LPD) eks USS Trenton dari Amerika Serikat. Penjualan kapal perang itu menandai era baru dalam hubungan kedua negara, khususnya pada tingkat Angkatan Laut. Seperti diketahui, hubungan Angkatan Laut India dan Amerika Serikat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seperti terlihat dalam Latihan Bersama Angkatan Laut bersandi Malabar. Pada tingkat strategis, India bersama Amerika Serikat, Jepang dan Australia tergabung dalam *Quadrilateral Security Partnership*.

Peran kekuatan udara Angkatan Laut tidak dapat diabaikan pula, karena India tengah melakukan pengadaan sejumlah pesawat patroli maritim jarak menengah dan jauh. Selain itu, dilakukan pula pembelian helikopter berbasis di kapal perang, yang sebagian besar mengandalkan pada kerjasama dengan Rusia. Dengan kekuatan udara yang memadai, Angkatan Laut India akan mampu mandiri dalam melindungi konvoi dalam penyebaran jauh ke luar wilayahnya.

Peran industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung pembangunan kekuatan Angkatan Laut India sangat besar. Kebijakan luar negeri India yang dekat dengan semua kekuatan besar dunia seperti Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendukung terciptanya atmosfer bagi terjadinya alih teknologi pertahanan. Seperti diketahui, sebagian pembangunan kapal perang India yang dibeli dari luar negeri dilaksanakan di dalam negeri berdasarkan perjanjian alih teknologi dengan negara penjual.

Selain itu, besarnya peran industri pertahanan dalam negeri India juga tak lepas dari kebijakan pemerintah India sejak awal kemerdekaannya yang mendorong dan sekaligus melindungi industri tersebut. Sebagai hasilnya, industri pertahanan India saat ini telah menjadi industri berkelas dunia dan mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, industri tersebut mampu mendorong industri-industri pendukung yang

berperan sebagai *vendor*, sehingga efeknya dirasakan oleh kalangan pelaku usaha di India beserta ribuan tenaga kerja.

Dalam meninjau pembangunan kekuatan laut India, hendaknya tidak dilewatkan pula penerapan *Revolution In Military Affairs* (RMA). Untuk kepentingan operasi, Angkatan Laut India telah menerapkan *Network-Centric Warfare*. Melalui penerapan tersebut, kemampuan Angkatan Laut India untuk mengawasi perairan Samudera India dan sekaligus manuver armada kapal perangnya, semakin meningkat. Dengan demikian, kemampuan *Battlespace Awareness* Angkatan Laut India makin meningkat dan menjangkau wilayah-wilayah di luar wilayah kedaulatannya, tidak hanya di Samudera India namun termasuk dalam rantai “kalung mutiara” melalui Selat Malaka.

Dengan adanya keinginan Angkatan Laut India menuju *blue water navy*, maka hal ini berarti Angkatan Laut India akan melaksanakan *long distance naval operations*. Dengan memperhatikan *legitimate area of interests*–nya, wilayah perairan yurisdiksi Indonesia akan menjadi salah satu sasaran operasi kekuatan laut India, karena aspirasi India sesungguhnya melampaui Samudera India itu sendiri.

Sulit untuk dibantah bahwa India sangat berambisi untuk menyebarkan kekuatannya hingga di Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik sekitar kawasan Asia Timur. Salah satu parameternya adalah keinginan mengoperasikan kapal selam nuklir, yang dipastikan wilayah operasinya melampaui Samudera India. Dengan demikian maka perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka akan menjadi tempat perlintasan kekuatan laut India dari Samudera India menuju Samudera Pasifik dan sebaliknya.

4.1.3 Jalur penguasaan ekonomi Cina dan India terhadap aspek pengamanan jalur SLOT dan SLOC di Perairan Laut Andaman dan Sabang.

India dan Cina, berusaha untuk mengembangkan ekonomi pesat memerlukan pasokan berlimpah dan teratur banyak sumber daya. Konsumsi minyak China naik dua kali lipat antara tahun 1995 dan 2005, dan diperkirakan akan tumbuh lebih cepat antara tahun 2005 dan 2015 melebihi konsumsi AS. Akibatnya permintaan untuk minyak dan gas akan terus meningkat. Demikian pula, rekening konsumsi energi India untuk sekitar 3,5% dari dunia, sehingga konsumen terbesar kelima, dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan keinginan untuk menjadi negara adidaya akan memaksa untuk meningkatkan pasokan energi primer oleh setidaknya 3 sampai 4 kali dan kapasitas pembangkit listrik sebesar 5 sampai 6 kali pada 2031

Hingga saat ini, hampir 80% dari perdagangan Cina, khususnya minyak, dan 97% dari perdagangan India adalah melalui jalur laut dari Samudera Hindia. Selain itu dua pertiga dari perdagangan minyak dunia dan sepertiga dari kargo curah dibawa melalui wilayah ini⁵¹.

India menganggap Samudera Hindia sebagai danau sendiri dan membenarkan legitimasi di perairan ini. Di sisi lain, meningkatnya kepentingan ekonomi dan kebutuhan untuk melindungi jalur perdagangan di wilayah ini telah membuat China meningkatkan kehadiran angkatan lautnya. Untuk tujuan ini Cina telah bekerjasama dan mengembangkan pelabuhan laut di sejumlah negara pantai sekitar India. Port ini dapat digunakan baik untuk keperluan sipil dan militer.

Disisi lain, secara signifikan, 85 % impor minyak China dan 60 % eksportnya dilakukan lewat Teluk Aden yang melalui Samudera India. Di sinilah India mendapatkan manfaat strategis yang sangat besar atas China. Dengan “kapal induk yang tak dapat tenggelam” yang berada di sepanjang semenanjung Cochin, Vizag, Vishakapatnam dan Goa, dan jangkauan luas yang diberikan oleh Komando Andaman dan kepulauan

⁵¹ <http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>

Lakshadweep, India siap untuk mendominasi kawasan Samudera India bila India memainkan kartunya dengan benar⁵².

Selain itu, India perlu membangun hubungan strategis jangka panjang dengan negara-negara Afrika Timur termasuk Komoro, Mauritius, Seychelles, Mozambik, dan Madagaskar. India telah memiliki stasiun pengawas teknologi tinggi di Madagaskar dan kehadiran angkatan laut yang terbatas di Seychelles dan Maladewa, terutama untuk tujuan pengintaian zona-zona ekonomi eksklusif dan patroli anti pembajakan laut⁵³. Mengingat bahwa kelompok kapal induk dan armada kecil angkatan laut rentan terhadap serangan peluru kendali yang akurat, dan dengan menjoroknya daratan India ke bentangan Samudera India, dalam skenario perang panas, India dapat mencapai dominasi kawasan ini yang menjangkau dari Tanduk Afrika ke pantai laut Australia tanpa membahayakan aset-aset udara dan angkatan lautnya.

India telah mencoba untuk melawan menyeimbangkan strategi ini dengan yang disebut “Kalung Berlian” (*Necklace of Diamonds*) Dalam strategi ini, mereka sedang membangun hubungan militer dengan negara-negara kunci di India dan Samudera Pasifik dengan Australia, Indonesia, Vietnam, Jepang, dengan negara-negara tetangga kita di Asia Selatan di sepanjang jalur perdagangan Cina. Tahun lalu India menugaskan NAS Baaz, stasiun udara angkatan laut pertama India di Campbell Bay, pulau paling selatan dari Andaman dan Nicobar kelompok Islands. Hal ini akan meningkatkan kapasitas pengawasan tidak hanya di Selat Malaka, tetapi juga Selat Sunda dan Lombok.

⁵²<http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/departments/voice/2013/04/01/feature-pr-17>, Brig. Purn. D S Sarao / Angkatan Darat India. *Perairan Rumit: Sengketa Laut China Selatan dan India*. Forum, asia Defence, Diunduh pada tanggal 27 Juli 2013 pukul 19.30 WIB.

⁵³ Ibid



Gambar 8: Strategi India “Necklace of Diamonds”⁵⁴



Gambar 9: Lokasi stasiun udara Angkatan Laut India NAS Baaz di Campbell Bay⁵⁵

⁵⁴ <http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>

⁵⁵ <http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>

Skenario di atas menjelaskan bahwa Samudera Hindia adalah salah satu daerah inti yang rawan terjadinya konflik, kekuatan militer Cina di kawasan tersebut membuktikan bahwa mereka punya kepentingan dalam upaya peningkatan devisa negaranya serta mengandalkan juga kekuatan diplomatiknya di beberapa negara. Posisi India yang berada di kawasan Selatan juga berupaya untuk memproyeksikan sebagai salah satu kekuatan utama dengan mengembangkan hubungan dengan negara-negara pesisir di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi inti dari persaingan Strategis antara India dengan China.

Kondisi ini telah menjadi isu penting saat ini sebagai bentuk persaingan di abad 21 dan kelangsungan peradaban masa depan yang sangat tergantung oleh dominasi kedua negara tersebut (India dan China).

India baru saja meresmikan pangkalan udara Angkatan Laut di wilayah Kepulauan Andaman-Nikobar (Damn, 5 Agustus 2012)⁵⁶. Pangkalan itu terletak di Campbell Bay, Nikobar Besar dan diberi nama INS Baaz. Kehadiran pangkalan udara Angkatan Laut India itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan India mengendalikan wilayah perairan Samudera India di sekitar Kepulauan Andaman-Nikobar. Selain itu, pangkalan udara tersebut juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan India dalam turut mengamankan Selat Malaka. Manfaat lainnya yang tak kalah penting adalah untuk mengawasi manuver Cina di Samudera India. Sebelum kehadiran INS Baaz,

India telah mempunyai dua pangkalan udara Angkatan Laut di Kepulauan Andaman-Nikobar, yaitu di Port Blair dan Car Nicobar. Dengan bertambahnya jumlah pangkalan Angkatan Laut India di Kepulauan Andaman-Nikobar, hal itu semakin menegaskan kepentingan geopolitik India terkait dengan *Look East Policy*. Selain itu, India juga

⁵⁶ <http://damnthetorpedo-2.blogspot.com/2012/08/pangkalan-udara-angkatan-laut-india-di.html> Damn-the torpedoes. *Pangkalan Udara Angkatan Laut India Di Andaman-Nikobar*. diunduh tanggal 06 Agustus 2013, pukul 13.20 WIB.

semakin berkepentingan untuk mengawasi manuver Cina di Samudera India yang dianggap sebagai halaman India.

Meskipun India bukanlah ancaman bagi Indonesia, akan tetapi penguatan kehadiran Angkatan Laut India di Kepulauan Andaman-Nikobar sebaiknya direspon secara proporsional. Hal ini terkait dengan keinginan India untuk turut campur dalam pengamanan Selat Malaka, karena New Delhi menyebut dirinya *funnel state* Selat Malaka⁵⁷.

Interaksi baru antara India dan China dalam satu dekade terakhir menunjukkan arah kebijakan yang bergerak menuju normalisasi ikatan pada isu-isu tertentu seperti perdagangan bilateral, untuk mencairkan kebuntuan pada isu-isu tertentu seperti sengketa perbatasan, hubungan pertahanan. Pada kenyataannya jika dikaitkan dengan persaingan tersebut diatas maka India tidak sepenuhnya kooperatif dengan langsung melibatkan Cina dalam setiap pengaturan multilateral karena dominasinya.

Meskipun Presiden China Xi Jinping telah meyakinkan India bahwa China lebih mementingkan pengembangan hubungan bilateral dan mengharapkan untuk melaksanakan kerjasama yang erat dengan India untuk menciptakan masa depan yang cerah dari perdagangan bilateral mereka. Namun pada saat yang sama India tetap mengembangkan program pembangunan reaktor nuklir “Chashma 3” untuk Pakistan yang dikatakan India sentris. Untuk saat ini mereka mencoba untuk menghindari konfrontasi langsung, sebaliknya masing-masing berupaya menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan persahabatan.

4.1.3.1 Gelar kekuatan Angkatan Laut China dalam mendukung SLOCs dan SLOT di Kawasan Samudera Hindia dan di Perairan Andaman.

Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kemampuan dukungan logistik untuk armada-armada China baik komersial maupun angkatan lautnya, China memperluas pengaruhnya ke samudera Hindia untuk

⁵⁷Ibid.

mengamankan jalur perdagangan dan energi melalui pembentukan basis dan pelabuhan untuk dukungan logistik dan untuk pengawasan dan pengintaian. Basis-basis ini dianggap sebagai tulang punggung bagi armada komersial dan *People's Liberation Army Navy* (PLAN) khususnya dalam misi jauh dari pantai nasional China untuk tujuan pasokan dan dukungan logistik, misalnya dalam misi-misi anti pembajakan laut di Teluk Aden sejak tahun 2008. Serangkaian basis dan pelabuhan China terbentang mulai dari pantai China dan Pulau Hainan ke Laut China Selatan melalui Selat Malaka, dan sepanjang rute maritim di Samudera Hindia sampai Gwadar di Pakistan ke pantai-pantai di Laut Arab dan Teluk Persia⁵⁸, disebut sebagai Strategi China "*Pearl Necklace Strategy*" atau "*String of Pearl*". Konsep ini dipakai untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dalam studi tentang "Masa depan Energi di Asia" oleh kontraktor untuk Departemen Pertahanan AS, yang berargumentasi bahwa Beijing sedang membangun jaringan basis yang komprehensif yang membentang dari China Selatan sampai Pakistan⁵⁹. Basis-basis ini termasuk :

4.1.3.1.1 **Basis di Pulau Hainan** : merupakan basis Angkatan Laut untuk kapal selam nuklir. Basis ini mampu untuk bersembunyi sampai 20 kapal selam nuklir dari satelit mata-mata⁶⁰. Basis ini terdiri juga bandara militer dan dua bandara sipil serta fasilitas besar untuk sinyal intelijen untuk pemantauan kegiatan angkatan laut AS di Laut China Selatan⁶¹.

⁵⁸ Christina Y.Lin. *Militarisation of China's Energy Security Policy: Defence Cooperation and WMD Proliferation along its String of Pearls in the Indian Ocean*, Berlin: ISPSW Institute fur strategie-Politik-Sicherheits-und Wirtschaftberatung, Jun 2008, hal.3

⁵⁹http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?cHash=a82d537697&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37196, Daniel Kostecka. Hambantota, Chittagong, and the Maldives-Unlikely Pearls for the Chinese Navy, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 20.17 WIB.

⁶⁰ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/1917167/Chinese-nuclear-submarine-base.html> Chinese nuclear submarine base, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.15 WIB.

⁶¹ <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/lingshui.html> Lingshui Air Base, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.15 WIB.

4.1.3.1.2 **Basis di Woody Island di kepulauan Paracel:** terletak didalam kepulauan Paracel sekitar 300 mil laut dari Vietnam. Bandara militer China yang paling besar di Laut China Selatan terletak dalam pulau ini bersama stasiun pemantauan intelijen. Selain itu, Basis angkatan Laut di Woody Island juga telah ditingkatkan termasuk pembangunan tanggul anti gelombang baru⁶².

4.1.3.1.3 **Basis Sihanoukville dan Ream di Kamboja:** RRC telah menyediakan dana untuk memperbaharui untuk berlabuh kapal di Ream. Perusahaan-perusahaan China telah mengupgrade pelabuhan dekat Sihanoukville. Akses kedua pelabuhan Sihanoukville dan Ream dianggap sangat strategis bagi PLAN dimasa depan dimana dapat digunakan untuk menekan Hanoi selama masa ketegangan dan untuk mengamankan SLOC serta melindungi pasokan energi⁶³.

4.1.3.1.4 **Basis-basis di Myanmar:** China mulai membantu modernisasi Myanmar dengan membangun basis-basis angkatan lautnya sejak akhir tahun 1980 an untuk kepentingan strategis, sehingga memiliki akses ke basis-basis untuk mendukung kemampuan PLAN dalam memproyeksikan kekuatannya di Samudera Hindia. China memberikan bantuan kepada Myanmar untuk memodernisasi basis angkatan laut di Hanggyi, Pulau-pulau Coco, Sittwe atau "Akyab" dan Mergui⁶⁴. Basis angkatan laut didirikan di Pulau Hainggyi pada awal 1990-an dengan bantuan keuangan dan teknis China supaya mengamankan Pulau Great Coco dan Little Coco dimana stasiun intelijen elektronik berada⁶⁵. Basis ini termasuk bandara untuk mendukung semua jenis operasi termasuk perbaikan dan untuk

⁶² http://www.spacewar.com/reports/Analysis_Chinas_air-sea_buildup_999.html, Andrei Chang. Analysis:China's air-sea buildup, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.30 WIB.

⁶³ <http://www.rjkoehler.com/2010/01/31/is-chinas-fabled-string-of-pearls-becoming-a-reality/>Robert Neff. Is China's Fabled "String of Pearls" Becoming a Reality?, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.35 WIB.

⁶⁵ , http://www2.irrawady.org/article.php?art_id=12285, Min Lwin. Burma's Navy Suffers Strategic diakses pada 20 Juli 2013 pukul 21.45 WIB.

mendukung infrastruktur, bersama basis angkatan laut dengan infrastruktur lengkap untuk kapal selam nuklir dan beberapa jenis kapal. Selain itu, China membangun stasiun intelijen dengan radar dan fasilitas pemantauan, di Pulau Great Coco (Stasiun yang paling besar dan yang paling strategis), dan di Pulau Hainggyi, basis di Zadetkyi Kyun di ujung utara Selat Malaka, Man-Aung di Pulau Cheduba, dan stasiun di Ramree, dan stasiun di basis angkatan laut Monkey Point di Yangoon, juga termasuk stasiun Saganthit dekat Mergui di Myanmar Timur Laut⁶⁶.

4.1.3.1.5 Chittagong di Bangladesh: Pada tahun 2010 Bangladesh menyetujui dengan penawaran China untuk membantu mengembangkan pelabuhan Chittagong yang biayanya US\$ 8,7 Miliar dimana China akan membayar jumlah besar biaya tersebut. Kepentingan strategis China dalam proyek ini untuk membangun pipa minyak berjalan dari Bangladesh ke China dalam rangka menghadapi kekhawatiran China mengenai apa yang disebutkan oleh Presiden Hu Jiantao sebagai “Dilema Malaka” dimana ketergantungan China pada Selat Malaka dimana 80 % dari pasokan minyak transit di selat itu saat ini⁶⁷.

4.1.3.1.6 Hambantota di Sri Lanka: China menyediakan US\$ 477 juta untuk membantu Sri Lanka menyelesaikan tahap pertama pembangunan pelabuhan Hambantota. Hambantota terletak dekat dengan persimpangan utama jalur pelayaran internasional utama yang menghubungkan Eropa, Afrika dan Timur Tengah dengan Asia melalui Selat Malaka dan Singapura. Tahap pembangunan kedua akan selesai tahun 2014 dengan biaya sekitar US\$ 1,5 Miliar, Hambantota akan memiliki bunker bahan bakar yang besar, penanganan kargo, penyimpanan, gudang dan kapasitas transshipment serta zona industri dan bandara di dekatnya. Beberapa analis mengatakan

⁶⁶Andrew Selth. *Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth*, Regional Outlook Paper No. 10, Griffith Asia Institute, 2007, hal.12-14.

⁶⁷ <http://www.thehindu.com/news/international/article245961.ece>, Ananth Krishna. *China offers to develop Chittagong port*, diunduh tgl 20 Juli 2013 pkl 22.45 WIB.

bahwa akses ke pelabuhan dan bandara ini akan memungkinkan China untuk mendukung memposisikan PLAN di wilayah ini secara efektif⁶⁸.

4.1.3.1.7 Basis Pulau Marao di Maladewa: Pulau ini disewa oleh China pada tahun 1999 dari Maladewa untuk manajemen lalu lintas maritim, tapi China menggunakan pulau ini untuk memantau kapal-kapal perang India dan AS di Samudera Hindia, dan dapat dikembangkan menjadi basis kapal selam dimasa mendatang⁶⁹.

4.1.3.1.8 Basis di Gwadar di Pakistan: pelabuhan Gwadar sedang dibangun dalam dua tahap dengan investasi besar dari China. China memberikan kontribusi US \$ 198 juta dari jumlah biaya proyek ini yang diperkirakan US \$ 248 juta untuk tahap pertama. China juga investasi US \$ 200 juta untuk membangun jalan raya yang menghubungkan pelabuhan Gwadar dengan pelabuhan Karachi di Laut Arab. Tahap kedua, yang jumlah biayanya US \$ 932 juta dan terdiri atas sembilan tempat berlabuh, saluran dan terminal penyimpanan juga akan dibiayai oleh China. Selain kontribusi keuangan China telah mengirimkan sekitar 450 insinyur dan menyediakan teknis untuk proyek tersebut⁷⁰. Pada tahun 2011 Menhan Pakistan Chaudhary Ahmed Mukhtar meminta China untuk membangun basis angkatan laut di pelabuhan Gwadar, yang memungkinkan China untuk mendapatkan hak penggunaan termasuk pengisian bahan bakar biasa dan dukungan logistik, dan fasilitas perbaikan untuk kapal permukaan China dan mungkin untuk kapal selam juga. Bagi China, basis Gwadar memiliki nilai strategis yang berdasarkan pada kedekatannya dengan Selat Hormutz dimana sekitar 60% dari pasokan energi China dari Timur Tengah dan melindungi jalur energi dari AS yang bisa mematahkan pasokan energi

⁶⁸ Michael Richardson. *China's network of places, not bases*, Straits Times Newspaper, 16 Augustus 2010, hal.2

⁶⁹ <http://cautionindia.blogspot.com/2011/01/chinese-naval-base-in-maldives-pose.htm> Chinese naval base in the Maldives poses a greater threat to India, I, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.45 WIB.

⁷⁰ <http://www.cssexam.com/archive/index.php/t-2737.html> Gwadar Port, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.50 WIB.

China dengan kehadirannya yang sangat tinggi di wilayah itu, dan untuk pemantauan kegiatan angkatan laut AS di kawasan itu. Selain itu, pada bulan April 2004 mulai modernisasi dan pembangunan di Pelabuhan Karachi melalui Deep Water Container Port Project yang dilaksanakan oleh China International Water and Electric Corporation⁷¹

Selain basis-basis tersebut, China melalui China-ASEAN *Investment Cooperation Fund* (CAF) menginvestasi dalam pelabuhan Laem Chabang yang dianggap pelabuhan terbesar di Thailand⁷², disamping itu juga PLAN mendirikan stasiun medis terpencil pada bulan Oktober 2011 dekat Yongshu yang terletak di Kepulauan Nansha di Laut China Selatan. Saat ini “*String of Pearls*” China di Samudera Hindia semakin berkembang dan dilanjutkan sesuai dengan misi-misi baru dan jangkauannya yang semakin berkembang. Sejak awal tahun 2009, China mulai mengirimkan kapal-kapal PLAN dalam misi patroli anti pembajakan laut di Teluk Aden dan lepas pantai Tanduk Afrika untuk melindungi kapal dagang dan kapal perangnya. Hal ini memerlukan dukungan dan fasilitas logistik, untuk memecahkan masalah ini China menciptakan model diplomatik dan komersial. Model ini berdasarkan pada hubungan diplomatik China melalui perusahaan dan pabrik-pabrik untuk menyediakan cara alternatif bagi China menyelesaikan masalah logistik daripada membangun pelabuhan dan basis angkatan laut di luar wilayah nasional China. Untuk dukungan logistik, China menggunakan beberapa pelabuhan seperti Salalah di Oman Selatan, Aden di Yemen, Djibouti, Karachi dan Jeddah di Arab Saudi untuk mengisi bahan bakar, melengkapi dan memungkinkan kru untuk mengisi cuti pantai⁷³.

Disamping itu, China mengembangkan kerjasama militer dengan negara lain di Asia dan Afrika untuk meningkatkan jumlah basisnya di masa depan. Saat ini ada beberapa laporan yang berbicara tentang niat China

⁷¹ <http://pk2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200904/20090406186396.html> China CWE *inaugurates dredging work for Karachi Container Port Project*, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.50 WIB.

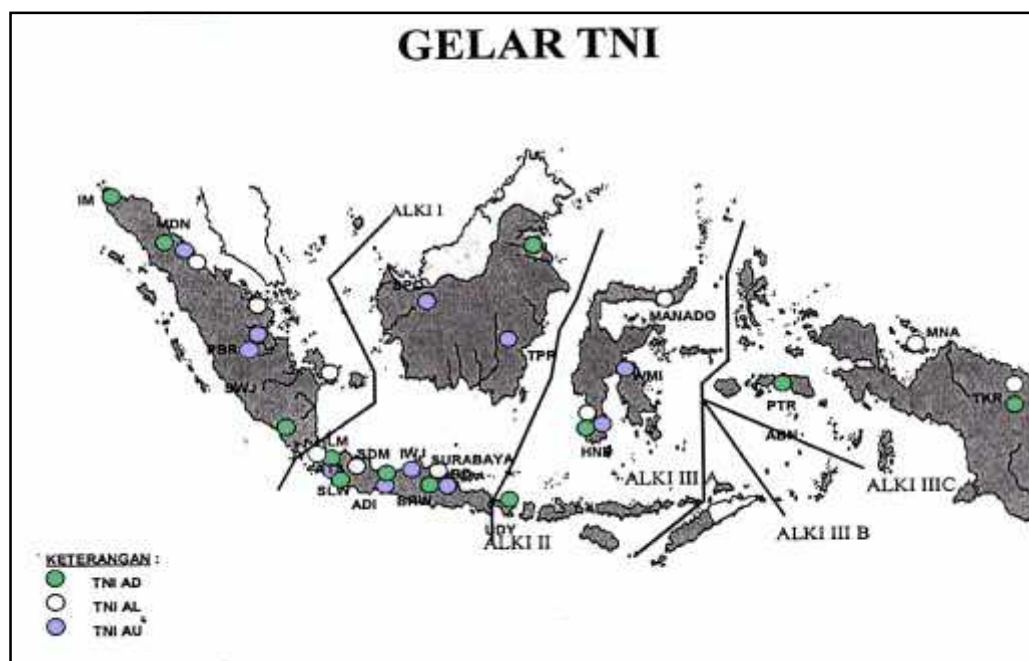
⁷²<http://www.china-asean-fund.com/news.php>, *CAF Invest in Thailand's Largest Port*, diunduh pada 23 Juli 2013 pukul 19.50 WIB.

⁷³Susanne Kamerling, Frans-Paul Van Der Putten, *An Overseas Naval Presence without Overseas Bases: China's Counter-piracy Operation in the Gulf of Aden*, *Journal of Current Chinese Affairs* Vol. 40, No. 4, April 2011, hal.119, 134, 139.

untuk membangun dua basis di Mauritius dan Seychelles dimana China baru-baru ini membahas kemungkinan membangun fasilitas angkatan laut di Kepulauan Seychelles di Samudera Hindia⁷⁴

4.1.3.2 Gelar kekuatan TNI AL di Perairan Andaman dan Selat Malaka.

Kekuatan negara dapat dibentuk melalui ekonomi dan militer, hubungan kedua sektor ini berbanding lurus. Artinya, baik ekonomi maupun militer yang dibangun terlebih dahulu akan saling memengaruhi. Meskipun, anggaran negara masih diprioritaskan pada sektor kesehatan dan pendidikan.



Gambar 10 : Gelar Kekuatan TNI di wilayah NKRI⁷⁵

Indonesia dengan Sishankamrata berusaha mengembangkan kekuatan militer melalui kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF). Saat ini ketiga matra sedang berbenah mengikuti kebijakan Presiden tahun 2005, yaitu : TNI AD melakukan pemantapan, TNI AL dan

⁷⁴ <http://blog.heritage.org/2011/12/23/china-may-ga-base-in-seychelles/> Dean Cheng. *China May Gain Base in Seychelles*, , diunduh pada 23 Juli 2013 pukul 20.50 WIB.

⁷⁵ Indonesia Defence, <http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/10/indonesia-macan-asia-pada-kompas-sabtu.html>)

TNI AU melakukan pengembangan dan modernisasi kekuatan, dengan konsep pembangunan pertahanan adalah berbasis kemampuan (*capability based defense*) bukan berbasis ancaman (*threat based defence*) dan menerapkan konsep trimatra terpadu yaitu memadukan seluruh kemampuan dan kekuatan di ketiga matra tersebut.

Dalam rangka menjaga yurisdiksi kedaulatan NKRI, TNI AL telah menggelar unsur –unsur KRI untuk melaksanakan operasi tempur dan keamanan yang terbagi dalam operasi di bagian barat dan timur wilayah NKRI. Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar) telah menggelar operasi yang dilaksanakan oleh komando pelaksana operasi yaitu Gugus Tempur Laut Koarmabar (Guspurlaarmabar) dan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Guskamlaarmabar) dengan melibatkan sejumlah unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum di perairan kawasan barat Indonesia yang menjadi wilayah kerja dan tanggung jawab Koarmabar.

Operasi yang digelar sepanjang tahun 2012, meliputi Operasi Alur Pari-12, Operasi Taring Pari-12, Operasi Arung Pari-12, Operasi Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)-12, Operasi Rakata Jaya di perairan Selat Sunda dan sekitarnya, Patkor Indonesia India (Indindo), Patkor Malaysia Indonesia (Malindo) dan Patkor Indonesia Singapura (Indosin) yang digelar di perairan perbatasan⁷⁶. Seluruh operasi yang digelar Koarmabar dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan guna mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan perairan yurisdiksi kawasan barat Indonesia diantaranya perairan Selat Malaka sampai dengan Sabang, Pantai Barat Sumatera di perairan Samudra Indonesia, Perairan Natuna, Perairan Riau, Selat Sunda dan sampai dengan perairan Teluk Cirebon. Wilayah perairan tersebut merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal -kapal niaga, kapal perang asing maupun para pengguna laut lainnya.

⁷⁶ <http://www.poskotanews.com/2012/12/27/koarmabar-gelar-operasi-tempur-dan-keamanan-laut/>

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam operasi tersebut diantaranya jenis Parchim, Angkut tipe Frosch, Patroli Cepat Rudal (PKR), Fast Patrol Boat (FPB) 57 dan jenis Patroli Cepat (PC) dan sejumlah unsur lainnya yang tergabung dalam operasi yang di gelar Komando Armada RI Kawasan Barat, sebagai berikut⁷⁷:

4.1.3.2.1 Patkor Indindo

Pelaksanaan : 120 Pers/60 hari

Unsur : 1 KRI (1 PK), 1 Patmar, 1 Pkl (SBG), 1 Lanudal (SBG)

4.1.3.2.1.1 Patkor Indindo-19/2012

Waktu : 7 April s.d. 01 Mei 2012

Unsur : KRI SRE

Pembukaan : Port Blair (7 s.d 9 April 2012)

Penutupan : Belawan (25 s.d 28 April 2012)

Unsur India : INS INDU & INS BITRA T-66

4.1.3.2.1.2 Patkor Indindo-20/2012

Waktu : 20 Sept s.d. 19 Okt 2012

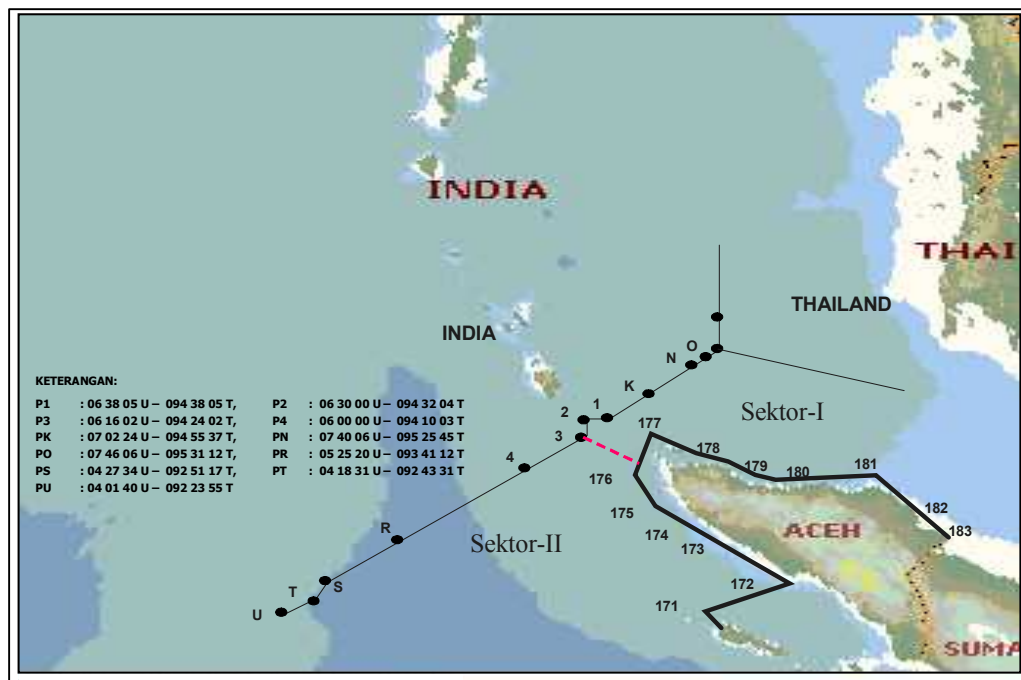
Pembukaan : Belawan (20 s.d 23 Sept 2012)

Penutupan : Port Blair (09 s.d 11 Okt 2012)

Unsur TNI AL : KRI STS

Unsur India : INS Kumbhir, INS Baratang

⁷⁷ Rekapitulasi data Sops Koarmabar, Giat Operasi wilayah barat TA 2012.



Gambar 11: Area Operasi Patkor Indindo 2012 (Sumber : Sops Koarmabar)

4.1.3.2.2 OPS MSSP

Pelaksanaan : 400 Pers/300 hari

Unsur : 7 KRI (2 PK, 1 ATF, 2 FPB, 3 PC), 2 Cassa, 1 BO-105, 2 Lant, 6 Lanal, 8 Posal, 2 Lanudal, 12 Satrad

Triwulan- I

Waktu : 1 Jan s.d 15 Jan 2012

Unsur : KRI STS, TDK, KLH, CLT, SBR, SDA, AKD, U-617

Waktu : 16 Jan s.d 31 Jan 2012

Unsur : KRI SRE, TDK, KLH, SGR, SBR, SLM, SDA, U-617

Waktu : 1 Feb s.d 15 Feb 2012

Unsur : KRI PTM, SCA, KLH, SRB, SKD, PRA, BOA, AKD, U-622

Waktu : 16 Feb s.d 29 Feb 2012

Unsur : KRI PTM, SCA, KLH, SRB, SKD, PRA, BOA, AKD, U-622

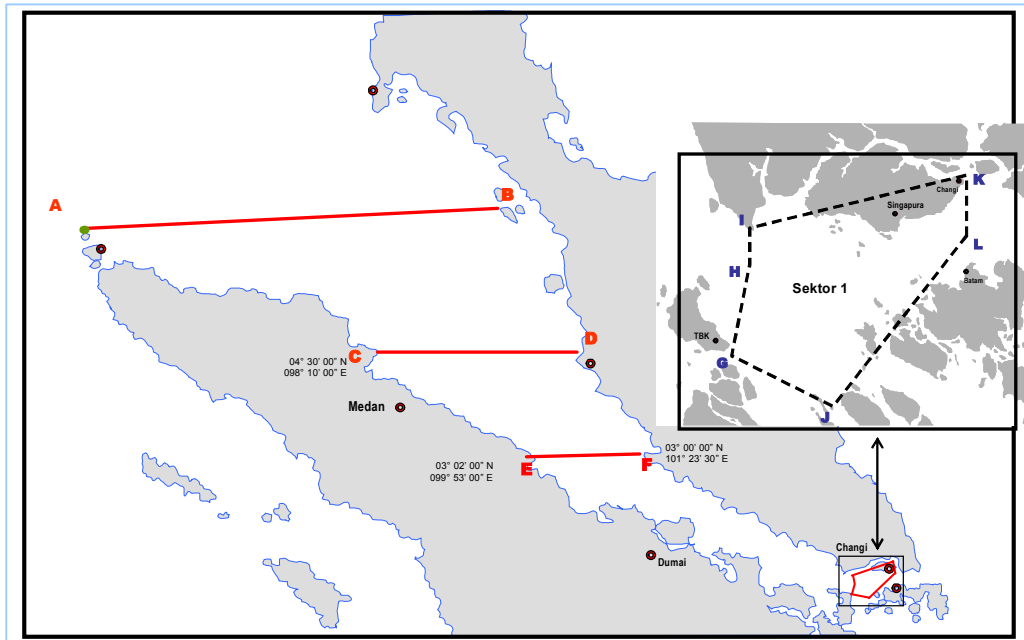
Waktu : 16 Mar s.d 31 Mar 2012

Unsur : KRI SRE, TCN, WLG, SLM, SKD, TGR, CCT, P-852

Triwulan-II

Waktu : 17 April s.d 30 April 2012
 Unsur : KRI TUM, PRA, SLM, SLA, TGR, BOA, SCA, P-852
 Waktu : 1 Mei s.d 15 Mei 2012
 Unsur : KRI PRA, PTM, KJG, PRG, KLH, SBR, SGU, U-621
 Waktu : 16 Mei s.d 31 Mei 2012
 Terlaksana : KRI AMY, MRA (Tmt 25 mei)
 Unsur : KRI AMY, PRG, KLB, MRA, SBR, SLA, U-621
 Waktu : 01 Juni s.d 15 Juni 2012
 Unsur : KRI PRG, KLB, MRA, SBR, SLA, U-621
 Waktu : 16 Juni s.d 30 Juni 2012
 Unsur : KRI CND, KJG, PRG, BOA, WLG, MRA, SBR, SLA, SDA,
 U-621
 Triwulan-III
 Waktu : 1 Juli s.d . 15 Juli 2012
 Unsur : KRI CND, BOA, PRG, VPR, KLB, KLH, SBR, CCT, P-852
 Waktu : 16 Juli s.d . 31 Juli 2012
 Unsur : KRI PTS, PRA, TDK, VPR, KRT, TRU, SBR, P-852
 Waktu : 1 Agust s.d 15 Agustus 2012
 Unsur : KRI PTS, PRA, TDK, WLG, KRT, TRU, SBR, SLA, P-852
 Waktu : 16 Agust s.d 31 Agustus 2012
 Unsur : KRI PTS, PRA, TDK, WLG, TRU, SBR, SGU, P-852
 Waktu : 1 Sept s.d 13 Sept 2012
 Unsur : KRI PTS, PRA, TDK, WLG, TRU, VPR, MRA, SBR, P-852
 Waktu : 18 Okt s.d 31 Okt 2012
 Unsur : KRI TPL, PRA, PRG, BOA, MRA
 Waktu : 01 Nov s.d. 15 Nov 2012
 Unsur : KRI CND, BKD, PRG, MRA, SRB, KJG, KLB
 Waktu : 16 Nov s.d. 30 Nov 2012
 Unsur : KRI TCN, KJG, PRG, SGU, MRA
 Waktu : 01 Des s.d. 15 Des 2012
 Unsur : KRI TCN, KJG, LDG, PRG, SGU, SRB, SCA, MRA
 Waktu : 01 Des s.d. 15 Des 2012

Unsur : KRI TCN, KJG, LDG, PRG, SGU, SRB, SCA, MRA
 Waktu : 16 Des s.d. 31 Des 2012
 Unsur : KRI TCN, SRE, LDG, PRG, VPR, MRA, SRB



Gambar 12: Area Operasi OPS MSSP 2012
 (Sumber : Sops Koarmabar)

4.1.3.2.3 Patkor Optima Malindo

Pelaksanaan : 150 Pers/60 hari
 Unsur : 3 KRI (3PC)

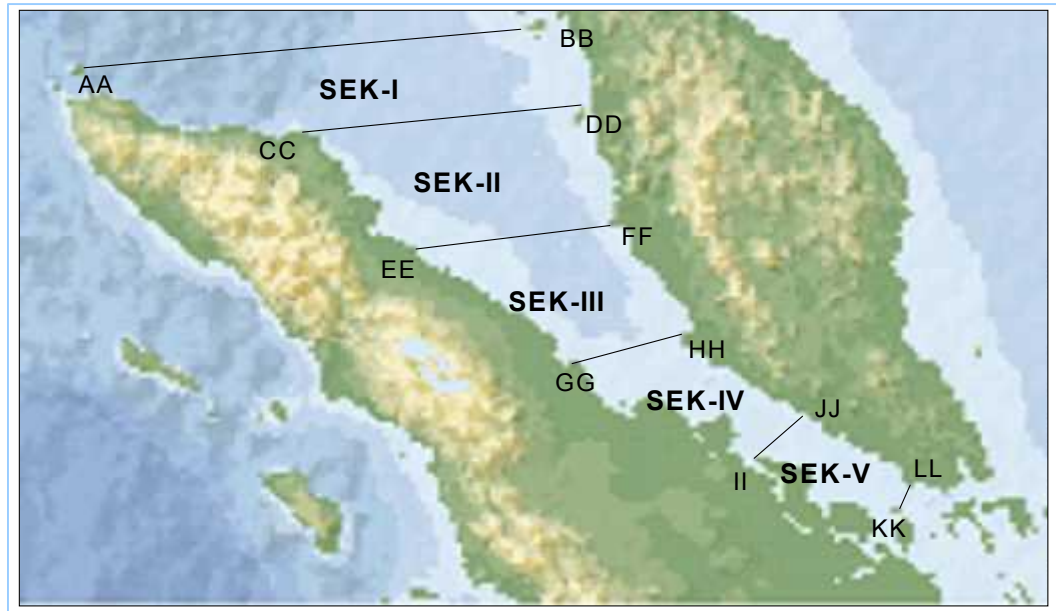
4.1.3.2.3.1 Patkor Optima-21 A /2012

Waktu : 3 Juli s.d. 2 Agust 2012
 Unsur Pelaks : KRI CLT , KRI SLA & U-621
 Unsur lainnya : KP. Manyar (Polri)
 KP. BC-5002 (Bea Cukai)
 KN. Clurit-203 (Hubla)
 KP. Hiu-009 (PSDKP)

4.1.3.2.3.2 Patkor Optima-21 B /2012

Waktu : 10 Okt s.d. 08 Nov 2012
 Unsur : KRI KLB & KRI KJG
 Unsur lainnya : KP. Antasena-7006 (Polri)

KP. BC-8005 (Bea Cukai)
 KN. Sarotama P-112 (Hubla)
 KP. Hiu-008 (PSDKP)
 Unsur Malaysia : KM. Gagah & KM. Marudu



Gambar 13.: Area Operasi Patkor Optima Malindo 2012
 (Sumber : Sops Koarmabar)

4.1.3.2.4 Patkor Indoithai

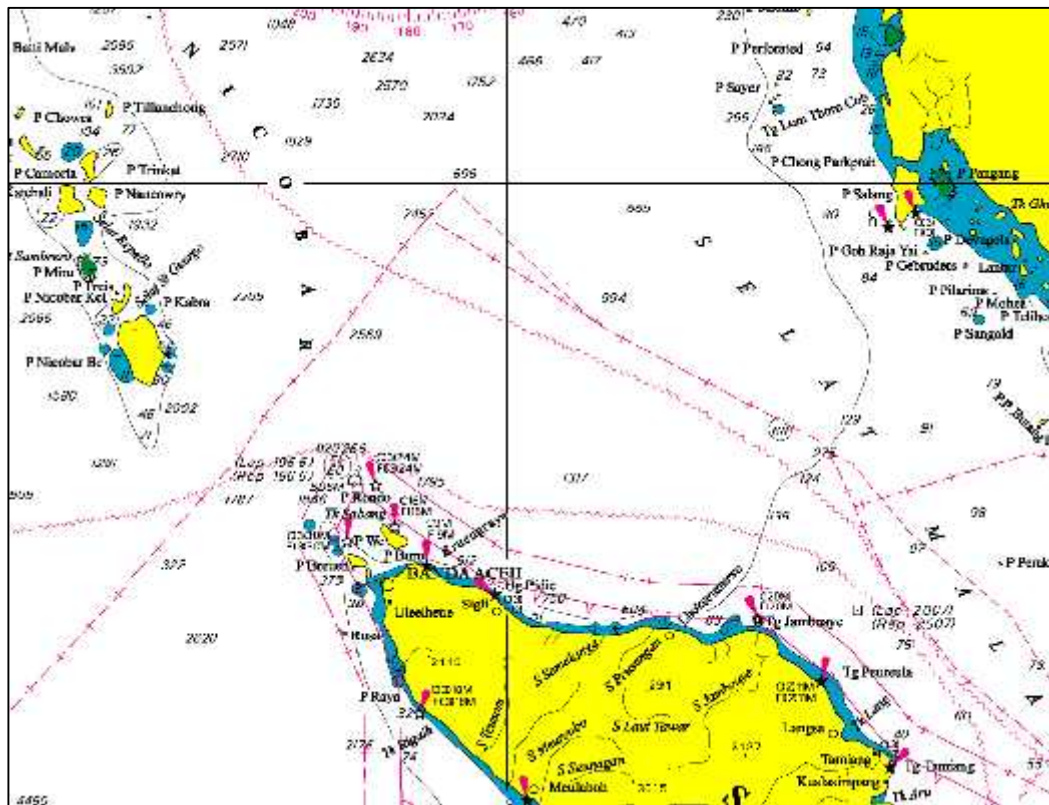
Pelaksanaan : 120 Pers/60 hari

Unsur : 2 KRI (1PK, 1 FPB), 1 Pkl, 1 lanudal

4.1.3.2.4.1 Patkor Indoithai-02/2012

Waktu : 01 April s.d 01 Mei 2012

Unsur : KRI PTM



Gambar 14: Area Operasi Patkor Indo-thai 2012
(Sumber : Sops Koarmabar)

4.1.3.2.5 Patkor Malindo

Pelaksanaan : 75 Pers/60 hari

Unsur : 2 KRI (1 FPB, 1PC), 1 PKI

4.1.3.2.5.1 Patkor Malindo-115/2012

Waktu : 19 Mar s.d 3 April 2012

Unsur TNI AL : KRI BOA, KRI SLA

Unsur TLDM : KD. Perdana-3501, KD. Perkasa-3512

4.1.3.2.5.2 Patkor Malindo-116/2012

Waktu : 18 s.d. 26 Juni 2012

Unsur : KRI SCA dan KRI SKD

Unsur TLDM : KD. Handalan, KD. Ganyang

4.1.3.2.5.3 Patkor Malindo-117/2012

Waktu : 1 Okt s.d. 15 Okt 2012

Unsur TNI AL : KRI SLM & KRI SGU

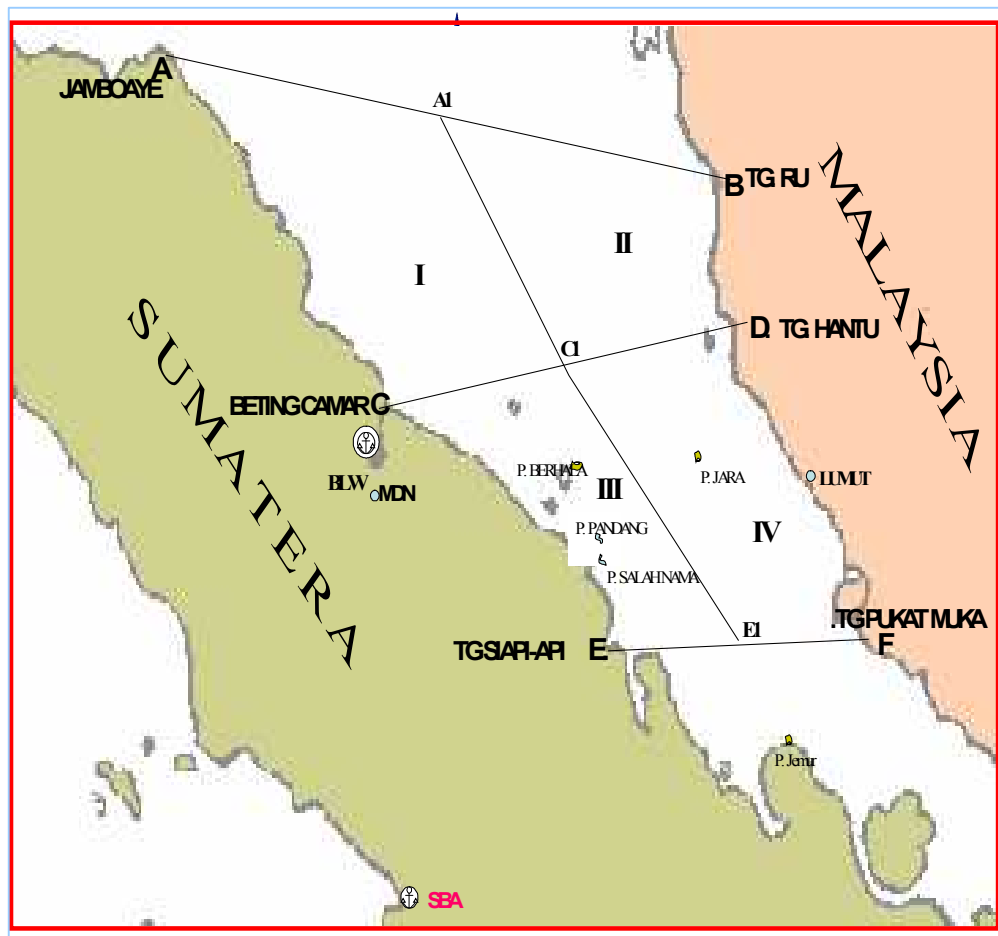
Unsur TLDM : KD. Pendekar dan KD. Ganyang

4.1.3.2.5.4 Patkor Malindo-118/2012

Waktu : 10 Des s.d. 25 Des 2012

Unsur TNI AL : KRI BOA & KRI SLA

Unsur TLDM : KD. Perkasa dan KD. Perdana



Gambar 15: Area Operasi Patkor Malindo 2012 (Sumber : Sops Koarmabar)

4.1.4 Kondisi Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang (Lanal Sabang) saat ini.

4.1.4.1 Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh)

Dermaga Operasional Lanal Sabang.



Gambar 16: .Dermaga Lanal Sabang (Sumber : dokumentasi langsung 09 Mei 2013)

Keterangan :

Panjang	: 180 m.
Lebar	: 7 m.
Daya dukung	: Ton/m.
Kedalaman air	: 11-12 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: Ton.
Kemampuan sandar	: 2 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatan penghubung	: 3 buah.
Kuat arus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Lanal Sabang

4.1.4.2 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan)

4.1.4.2.1 Dock Kapal. Memiliki fasilitas *sleep way* dengan panjang rel max 80 mtr dan kapasitas winch 500 ton (atas air 40 meter) untuk melaksanakan *docking* kapal dalam rangka repair sampai dengan 200 GT.

Disamping itu *docking* kapal yang dimiliki hanya mampu untuk mendukung kapal dengan ukuran yang kecil dan repair untuk kapal-kapal kayu dan fibreglass. Untuk kapal dengan ukuran besar Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki Pangkalan TNI AL Sabang masih belum mampu melaksanakannya.

4.1.4.2.2 Bengkel Perkapalan: Bengkel untuk perbaikan badan kapal (Bakap), memiliki 1 (satu) unit bengkel sarana perbaikan dan perawatan untuk badan kapal. Sarana peralatan penunjang bengkel yang dimiliki pangkalan Angkatan Laut Sabang sangat terbatas, hanya digunakan untuk perbaikan dan perawatan kapal-kapal dengan ukuran yang kecil.

4.1.4.2.3 Bengkel permesinan:

4.1.4.2.3.1 Mampu melaksanakan Overhoul mesin diesel sampai dengan 750 HP.

4.1.4.2.3.2 Mampu perbaikan pompa, kompressor, alat bantu sampai dengan tingkat menengah.

4.1.4.2.3.2 Mampu melaksanakan pembuatan as propeller dengan panjang sampai dengan 6 meter dan diameter 10 mm.

4.1.4.2.3.3 Bengkel listrik dan elektronika.

4.1.4.2.3.4 Mampu melaksanakan perbaikan seluruh instalasi listrik yang ada di KRI.

4.1.4.2.3.5 Mampu melaksanakan pemasangan instalasi listrik di kapal yang sedang diproduksi.

4.1.4.2.3.6 Alat bantu Harkan lainnya, meliputi: Crane 5 ton, Forklift 5 ton, Houshing crane 5 ton, Houshing crane 10 ton, Genset, 5 unit kapasitas

440 Volt, 488 Kva, 60 Hz non aktif (proses PUS), dan 3 unit kondisi 65 % untuk mendukung aliran listrik bagi KRI.

4.1.4.3 Fasilitas Perbekalan (Fasbek)

Fasilitas kemampuan bekal ulang bahan bakar Solar (HSD) dan dukungan minyak lincir. Untuk mendukung bahan bakar dilaksanakan dengan melalui sarana tangki timbun yang memiliki kapasitas hingga 30 ton. Serta dengan melalui sarana 2 unit tongkang, masing-masing tongkang memiliki kemampuan menampung bahan bakar sebanyak 360 meter kubik, yang didukung dengan kemampuan pompa untuk menstransfer bahan bakar 40 ton per jam. Dukungan dengan menggunakan tongkang ini sangat tergantung dengan kesiapan kapal penariknya. Fasilitas untuk perbekalan lain berupa kemampuan untuk mendukung kebutuhan minyak lincir.

4.1.4.4 Fasilitas Pergudangan.

Fasilitas pergudangan untuk mendukung sarana perbekalan memiliki 4 gudang perbekalan. Gudang untuk mendukung perbekalan logistik cair digunakan untuk menampung peralatan perbekalan dan menampung minyak lincir atau pelumas dalam kemasan drum.

4.1.4.5 Fasilitas Alat Apung (Alpung).

Alat apung yang dimiliki Lanal Sabang sangat minim dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dukungan pangkalan dan patroli keamanan laut di wilayah perairan sabang. Sebagian besar alpung dalam kondisi tidak siap operasi maupun rusak berat

Tabel 1.4: Data Alat Apung Lanal Sabang

NO	KESATUAN	NAMA KAPAL	JML	KONDISI
1.	Lanal Sabang	- KAL II.1.1-01 Seulaku - KAL II.1.1-02 Siemelue - Patkamla II.1.1-06 Teluk Sabang - Patkamla II.1.1-08 - Speed Boad Sea Reader400 PK	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	- Rusak Berat - Rusak Ringan - Rusak Ringan - Rusak Ringan - Rusak pada Hidrolik Mesin
2.	Posal Meulaboh	- Speed Boad Fiber Glass 6 Meter 25PK - Speed Boad Fiber Glass8 Meter 40 PK	1 Unit 1 Unit	- Rusak Berat - Baik
3.	Posal Malahayati	- Speed Boad Fiber Glass 8 Meter 40 PK	1 Unit	- Baik
4.	Posal Lhoknga	- Speed Boad Fiber Glass 8 Meter 25 PK - Perahu Karet 40 PK	2 Unit 1 Unit	- Rusak Ringan - Rusak Berat

(Sumber : Lanal Sabang 2013)

4.1.5 Gambaran umum Wilayah Kota Sabang

4.1.5.1 Kondisi geografis

Wilayah Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh (Sabang), P Rondo, P Rubiah, P Ceulako dan Pulau Klah. Adapun batas-batas wilayahnya, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Karena wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, maka secara geologis hampir seluruh daratannya (yaitu 87 persen) berupa batuan, baik berupa batuan vulkanis dan batuan sediment. Sedangkan sisanya, yaitu 13 persen daratannya terbentuk dari endapan alluvial.

Dengan keadaan geologis yang demikian, maka wajar jika Kota Sabang hampir tidak mempunyai lahan sawah. Lahan di Kota Sabang di dominasi oleh kebun yang luasnya mencapai 10.709,26 hektar. Dengan luas secara keseluruhan 153 km², Kota Sabang dibagi dalam 2 kecamatan dengan 18 Kelurahan secara keseluruhan, 7 mukim dan 72 lingkungan. Karena wilayah yang merupakan pulau kecil, pada tahun 2010, rata-rata tekanan udara di Kota Sabang mencapai 1.010,03 mb dan suhu udara 27,6°C tiap bulannya.

Tabel 2.4: Letak Geografis Sabang.

Letak Geografis/ <i>Geographical</i>	: - 05046'28"-05054'28" LU/ <i>North Latitude</i> - 95013'02"-95022'36" BT/ <i>East Longitude</i>
Luas Daerah/ <i>Land Area</i>	: 153 Km ²
Tinggi rata-rata/ <i>Average Of Altitude</i> :	± 28 M di atas permukaan laut
Batas-batas Daerah:	
Sebelah Utara	Selat Malaka/ <i>Malacca Strait</i>
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia/ <i>Indonesian Ocean</i>
Sebelah Timur	Selat Malaka/ <i>Malacca Strait</i>
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia/ <i>Indonesian Ocean</i>
Daerah Melingkupi	5 Pulau/ <i>Island</i> 5 Danau/ <i>Lakes</i>
Topografis Wilayah Terdiri dari:	± 3% Daratan Rendah/ <i>Low Land</i> ± 10% Daratan Bergelombang/ <i>Wavy Plain</i> ± 35% Bebukit/ <i>Hill</i> ± 52% Berbukit sampai Bergunung/ <i>Hill to Mountainous</i>
Geologis Wilayah Terdiri dari:	± 70% Batuan Vulkanis/ <i>Vulcanic Rock</i> ± 17% Batuan Sedimen/ <i>Sidementary Rock</i> ± 13% Endapan Aluvial/ <i>Igneous Rock</i>
Kecamatan:	2
Kelurahan:	18

Sumber: Data Kantor Walikota Sabang tahun 2010.

4.1.5.2 Dukungan sumber tenaga listrik dan logistik cair (air bersih)

Seluruh wilayah sabang telah menikmati adanya listrik, dengan kapasitas daya yang dibangkitkan sebesar 21.867.994 kwh dengan 86 gardu sebagai sarana distribusinya. Rincian kemampuan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting sabang dalam membangkitkan dan menyalurkan listrik (tabel 4.2.).

Tabel 3.4: Jumlah Daya Tersambung, Langganan, Kwh Terjual dan Pendapatan Menurut Golongan Tarif PLN Ranting Sabang Tahun 2010.

Unit Pelayanan/ <i>Unit Services</i>	Pelanggan/ <i>Consumers</i>	Daya Tersambung/ <i>Power connected (kwh)</i>
1. Sabang	7.606	10.495.920
2. Balohan	1.189	1.123.550
3. Keuneukai	538	496.050
Jumlah/ <i>Total</i>	9.333	12.115.520

Sumber : PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Kota Sabang

Tabel 4.4: Perkembangan Bidang Pembangkitan Dan Distribusi Pada PT. (PERSERO) PLN Di Kota Sabang Tahun 2001-2010

Tahun/ <i>Years</i>	Pembangkitan (KWH)/ <i>Generated</i>	Distribusi/ <i>Distribute</i>
2001	8.475.323	9 Gardu Kios 37 Gardu Tiang
2002	9.403.701	9 Gardu Kios 37 Gardu Tiang
2003	9.988.825	9 Gardu Kios 42 Gardu Tiang
2004	11.643.724	9 Gardu Kios 42 Gardu Tiang
2005	11.821.567	8 Gardu Kios 48 Gardu Tiang
2006	13.568.230	9 Gardu Kios 47 Gardu Tiang
2007	14.833.110	9 Gardu Kios 59 Gardu Tiang
2008	17.423.383	74 Gardu, 7.352 KVA
2009	18.841.408	80 Gardu
2010	21.867.994	86 Gardu

Sumber : PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Kota Sabang Tahun 2010

Sedangkan dari sektor dukungan air bersih, selain punya pembangkit listrik sendiri, di Kota Sabang juga terdapat perusahaan daerah air minum (PDAM) yang menyalurkan air bersih ke seluruh wilayah Kota Sabang. PDAM tirta Aneuk Laot Kota Sabang pada tahun 2010 menyalurkan 1.303.781 meter kubik air bersih kepada 4.948 pelanggan/pengguna air bersih di seluruh Kota Sabang. Adapun keadaan PDAM dalam usahanya menyalurkan air bersih kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.4, sedangkan pada tabel 6.4. menggambarkan banyaknya air bersih yang disalurkan PDAM tirta Aneuk Laot kepada pelanggannya pada setiap bulan di Kota Sabang pada tahun 2010.

Tabel 5.4: Keadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sabang Tahun 2010

Uraian/ Item	Satuan	Jumlah/ Total
[1]	[2]	[3]
1. Panjang Pipa Induk	Meter	43.746
2. Panjang Pipa Distribusi	Meter	97.243
3. Besar Kapasitas Bak Penampungan	M ³	7.750
4. Banyaknya Air Minum yang dihasilkan	M ³	1.958.414
5. Banyaknya Langganan (aktif)	Orang	4.948
6. Banyaknya Air yang terjual	M ³	1.303.781
7. Banyaknya air yang terpakai sendiri	M ³	16.000
8. Rata-rata tarif per M2	Rupiah	1.500
9. Jumlah Karyawan	Orang	50
10. Penerimaan penjualan air	Rupiah	2.552.430.115,00
11. Penerimaan non operasional	Rupiah	-
12. Pendapatan Lain-lain	Rupiah	1.889.256.914,00
13. Struktur biaya		
a. Biaya Langsung Usaha	Rupiah	-
- Biaya Operasi Sumber Air	Rupiah	2.115.116.987,00
- Biaya Pemeliharaan Sumber Air	Rupiah	284.224.900
- Biaya Operasi Pengolahan Air	Rupiah	156.392.500
- Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	Rupiah	-
- Biaya Operasi Trandis	Rupiah	392.348.022
- Biaya Pengolahan Trandis	Rupiah	135.541.420
b. Biaya Umum dan Administrasi	Rupiah	1.630.925.754,85
c. Biaya Lainnya	Rupiah	26.194.000
14. Penyusutan	Rupiah	1.993.917.230,30
15. Surplus Usaha / Defisit	Rupiah	2.130.322.785,15

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sabang

Tabel 6.4: Jumlah Air Minum Yang Disalurkan Oleh PDAM Kota Sabang Tahun 2010

Bulan/ <i>Month</i>	Produksi/ <i>Production</i> (M3)	Air Minum yang Disalurkan/ <i>Running water to consumers</i> (M ³)
[1]	[2]	[3]
Januari/ <i>January</i>	156.722	101.387
Pebruari/ <i>February</i>	165.370	100.452
Maret/ <i>March</i>	155.754	118.848
April/ <i>April</i>	169.648	100.985
Mei/ <i>May</i>	165.886	115.225
1	2	3
Juni/ <i>June</i>	158.878	102.215
Juli/ <i>July</i>	166.212	106.564
Agustus/ <i>August</i>	165.202	113.948
September/ <i>September</i>	158.805	100.045
Oktober/ <i>October</i>	159.979	119.075
Nopember/ <i>November</i>	168.740	114.292
Desember/ <i>December</i>	167.218	110.745
Jumlah/ <i>Total</i>	1.958.414	1.303.781
Tahun 2009	1.679.654	1.090.781
2008	1.665.654	1.066.281
2007	1.273.739	997.585
2006	1.197.449	859.935
2005	1.213.736	970.07
2004	887.040	476.045

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sabang

4.1.5.3 Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang

Kawasan Sabang merupakan bagian dari Propinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), terdiri dari wilayah Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), serta sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya) dengan luas wilayah \pm 394 km². Berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai kawasan

perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas. Kawasan ini juga terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2/2000 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 37/2000 untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun.

Penetapan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan Provinsi NAD sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Khusus bagi Kawasan Sabang, hal tersebut dalam rangka lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

4.1.5.3.1 Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu,

4.1.5.3.2 Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya. Fasilitas pelabuhan umum (non pelabuhan/dermaga TNI AL) beserta spesifikasinya yang terdapat di wilayah Sabang adalah sebagai berikut:

4.1.5.3.3 **Dermaga "G" Sabang**

4.1.5.3.3.1 Kondisi alam :

Geografis	: 050° 53' 00"LU - 950° 19' 00" BT
Pelabuhan	: BPKS
Status pengoperasian	: BPKS
Kelas pelabuhan adpel	: Kelas V Sabang
Kepanduan	: Bebas pandu
Rata-rata curah hujan	: 244,3 milimeter/musim
4.1.5.3.3.2 Alur pelayaran	:
Panjang	: 1.400 m
Lebar	: 800 m
Kedalaman	: Sampai dengan 53 m
Dasar tanah	: Karang berpasir
4.1.5.3.3.3 Kolam pelabuhan :	
Luas	: 177 ha
Kedalaman min	: 8 m
Kedalaman max	: 35 m
Port state control	: Adpel Sabang
Gelombang max	: 0,5 m
Gelombang min	: 0,2 m



Gambar 17: Dermaga Umum Sabang (Sumber : dokumentasi tgl 09 Mei 2013)

4.1.5.3.4 Dermaga Umum Sabang

Keterangan :

Panjang	: 180 m.
Lebar	: 25 m.
Dayadukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 11 - 12 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 2 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatan penghubung	: 3 buah.
Kuat arus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: BPKS

4.1.5.3.5 Dermaga BPKS Baru



Gambar 18: Dermaga BPKS Baru (Sumber : dokumentasi tgl 10 Mei 2013)

Keterangan :

Panjang	: 800 M.
Lebar	: 43,6 M.
Kedalaman air	: 16 M.

Konstruksi	: BETON.
Kondisi	: Tahap pembangunan
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Kuat arus	: 1 – 3 KNOTS.
Pemilik	: BPKS

4.1.5.3.6 Dermaga Pertamina Sabang



Gambar 19: Dermaga Pertamina Sabang (Sumber: dokumentasi tgl 10 Mei 2013)

Keterangan:

Panjang	: 75 m.
Lebar	: 7 m.
Dayadukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 11-12 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 1 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatanpenghubung	: 3 buah.
Kuat arus	: 1 – 3 knots.

Pemilik : Pertamina



Gambar 20.:Dermaga Distrik Navigasi Sabang (Sumber: dokumentasi tgl 10 Mei 2013)

4.1.5.3.7 Dermaga Distrik Navigasi Sabang

Keterangan :

Panjang	: 40 m.
Lebar	: 8 m.
Daya dukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 7 - 9 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 1 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatan penghubung	: 1 buah.
Kuat arus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Navigasi

4.1.5.3.8 Dermaga PT. Psb Pasiran Sabang



Gambar 21: Dermaga PSB Pasiran Sabang (Sumber : dokumentasi langsung 11 Mei 2013)

Keterangan :

Panjang	: 200 m.
Lebar	: 6 m.
Dayadukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 7 - 8 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 3 kapal.
Keadaandasarlaut	: Lumpur.
Jembatanpenghubung	: 2 buah.
Kuatarus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Pelindo

4.1.5.3.9 Dermaga Khusus Dinas Kelautan & Perikanan



Gambar 22: Dermaga Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Sabang (Sumber : dokumentasi langsung 11 Mei 2013)

Keterangan :

Konstruksi	: Beton
Panjang	: 10 m
Lebar	: 5 m
Kedalaman	: 2 - 5 m
Kondisi	: Baik
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatan penghubung	: 2 buah.
Kuatarus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Pelindo

4.1.5.3.10 Dermaga Satuan Radar TNI AU



Gambar 23: Dermaga Satuan radar TNI AU Sabang

(Sumber : dokumentasi langsung 11 Mei 2013)

Keterangan :

Konstruksi : Beton
Panjang : 5 m
Lebar : 10 m
Kedalaman : 7 m
Keadaan dasar laut: Batu karang
Kuat arus : 1- 2 knot

4.1.5.3.11 Dermaga Gapang Sabang



Gambar 24: Dermaga Gapang, Sabang
(Sumber : dokumentasi langsung 20 Mei 2013)

Keterangan :

Panjang	: 6 m.
Lebar	: 3 m.
Dayadukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 2 - 3 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 1 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatan penghubung	: Tidak ada.
Kuatarus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: PemdaSabang

4.1.5.3.12 Dermaga Balohan Sabang Gang Away Dan Dholpin



Gambar 25: Dermaga Balohan Sabang Gang Away Dan Dholpin
(Sumber : dokumentasi langsung 20 Mei 2013)

Keterangan :

Konstruksi	: Beton
Gang away	: 155 m
3 unit dholpin	: 40 m
Gedung opsional	: 400 m ²

Kondisi	: 85 %
Tahun pembangunan	: 2001
Pembangunan kembali	: 2006
Kapasitas dermaga	: 1500 grt
Kedalaman	: ± 6 m
Fasilitas Laut :	
Konstruksi abutment	: 1buah
Mooring dolphin	: 2buah
Breasting dolphin	: 3buah
Catwalk	: 66,12 m ²
Talud pelindung lereng	: 3,588.90 m
Breakwater	: 1paket
Rambu suar laut	: 1unit
Pengerukan kolam pel	: 202,80 m ²
Fasilitas Sisi Darat:	
Gedung operasional	: 60,00 m ²
Pos periksa tiket	: 800,00 m ²
Tower air + instalasi	: 9,00 m ²
Sumur bor/deep well	: 1unit
Tangki bbm + r.pompa	: 32titik
Gang way	: 1paket
Jalan dan lap parkir	: 145,80 m
Pagar dan pintu	: 3731,00 m ²
Terminal taksi	: 1paket
Terminal umum	: 320,00 m ²
Rambu suar darat T45	: 6 unit
Pos jaga	: 6unit
Landscape	: 9,00 m ²
Mushalla	: 1paket
Drainase	: 1unit

4.1.5.3.13 Dermaga Airud Jaboi



Gambar 26: Dermaga Airud Jaboi

(Sumber : dokumentasi langsung 20 Mei 2013)

Keterangan :

Panjang	: 5 m.
Lebar	: 20 m.
Dayadukung	: 2,5 ton/m.
Kedalaman air	: 2 - 4 m.
Konstruksi	: Beton.
Kondisi	: Baik.
Kapasitas b/m	: 13.000ton.
Kemampuan sandar	: 1 kapal.
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatanpenghubung	: 1 buah.
Kuatarus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Airud Polda Aceh

4.1.5.3.14 Dermaga TPI Jaboi



Gambar 27: Dermaga TPI Jaboi
(Sumber : dokumentasi langsung 20 Mei 2013)

Keterangan :

Konstruksi	: Beton
Panjang	: 4 m
Lebar	: 15 m
Kedalaman	: 2 - 4 m
Kondisi	: Baik
Keadaan dasar laut	: Lumpur.
Jembatanpenghubung	: 1 buah.
Kuatarus	: 1 – 3 knots.
Pemilik	: Pelindo

4.1.5.3.15 Dermaga Iboh



Gambar 28: Dermaga Iboh
(Sumber : dokumentasi langsung 20 Mei 2013)

Keterangan :

Konstruksi	: Kayu
Panjang	: 15 m
Lebar	: 5 m
Kedalaman	: 2 - 4 m
Kondisi	: Baik
Keadaandasarlaut	: Pasir
Jembatanpenghubung	: Tidakada.
Kuatarus	: 1 – 2 knots.
Pemilik	: Pemda Sabang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XXII Bagian Ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, telah mengukuhkan kapasitas Sabang sebagai suatu kawasan yang bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penetapan ini juga memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan serta kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS (Dewan Kawasan Sabang). Sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah bersama Pemerintah Aceh telah mengamanatkan agar Kawasan Sabang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan penekanan bagi pembangunan pelabuhan utama (hub-port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (*transshipment*) nasional.

Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang I - 2 Dengan adanya kedua UU yang telah mengamanatkan untuk pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang kepada BPKS melalui DKS; maka BPKS, sebagai sebuah “organisasi usaha” perlu menjalankan prinsip prinsip *good corporate governance*, serta harus mempunyai sebuah bisnis plan yang memuat visi, misi, strategi, sektor prioritas dan unggulan serta analisis kelayakan investasi dan penerimaan bagi BPKS, yang mampu menjadi “indikator kinerja” bagi seluruh pimpinan

dan lapisan karyawan, sesuai dengan amanat dari UU. 37/2000 dan No. 11/2006 tersebut di atas. Sehubungan dengan adanya fungsi-fungsi pengembangan ini mensyaratkan Kawasan Sabang untuk dikembangkan secara terencana, terukur, dan komersil agar dapat menarik investor.

Persyaratan pengembangan ini telah diantisipasi dengan upaya penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007 – 2021. Berdasarkan Master Plan ini akan dijabarkan dalam bentuk rencana-rencana pengembangan kawasan, sektoral dan kelembagaan. Salah satu penjabaran utama dari Master Plan ini adalah Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tabel 7.4: Jumlah kunjungan kapal dan kegiatan bongkar muat barang per bulan pada pelabuhan di Kota Sabang Tahun 2010

Bulan/ Month	Kapal/Ship			Barang dan BBM (Ton)/ Good and oil
	Tiba/Arrive	Berangkat/ Depart	Bongkar/ Unload	Muat/ Load
Januari/January	117	116	5.443	1.385
Pebruari/February	111	108	7.285	778
Maret/March	113	113	6.733	1.169
April/April	108	112	5.595	1.030
Mei/May	111	110	10.160	1.238
Juni/June	104	108	6.119	968
Juli/July	113	112	4.379	1.074
Agustus/August	123	118	5.160	953
September/September	130	125	5.912	2.109
Oktober/October	120	125	8.450	2.317
Nopember/November	107	111	11.439	1.301
Desember/December	120	120	4.755	1.306
Jumlah/Total	1.377	1.378	81.430	15.628

Sumber : PT. SAL Rondo

4.1.5.4 Tata ruang Wilayah Sabang

Kota Sabang termasuk ke dalam jalur pelayaran internasional sehingga lokasinya sangat strategis. Adapun tujuan RTRW Kota Sabang sendiri ini adalah “Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”. Dalam upaya mendukung perwujudan tujuan RTRW Kota tersebut, maka kemudian ditetapkan 4 kebijakan. Rencana pola ruang Kota Sabang terdiri dari kawasan budidaya dengan proporsi 56% serta kawasan lindung dengan proporsi 44%.⁷⁸

RTRW Kota Sabang diarahkan agar dapat secara komprehensif melihat dan bersinergi dengan berbagai peraturan lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, RTR Pulau, peraturan teknis dari Kementerian yang bersifat sektoral, serta kebijakan dari kementerian pusat yang ada pada wilayah Kota Sabang tersebut. Penataan RTRW Kota Sabang menjadi krusial mengingat bahwa Kota Sabang merupakan salah satu Kota yang memiliki posisi geografis serta peran yang strategis karena berkedudukan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) sekaligus PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Dari sudut pertumbuhan ekonomi, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang merupakan Kawasan Strategis Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang telah ditetapkan dengan UU No. 37/2000. Secara geografis, kawasan Sabang, yang terletak di Pulau Weh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),

⁷⁸ Bahan Paparan Kepala Bappeda Kota Sabang, rapat koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam pembahasan Rancangan Qanun (Raqanun) Kota Sabang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam di Gedung Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang Lt. 3, Kementerian Pekerjaan Umum, 23 Mei 2012.

berada di jalur lintasan kapal internasional. Pantai-pantai di Sabang juga memiliki laut pesisir yang dalam dan memenuhi syarat untuk kapal-kapal besar berlabuh. Provinsi Aceh itu sendiri juga berada pada jalur perdagangan negara-negara di benua Asia, seperti India, Srilanka, Pakistan, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Oman Yaman, dan Mesir. Begitu pula, jalur perdagangan Afrika, semisal Tanzania, Kenya, Kepulauan Madagaskar, juga melalui wilayah ini.

Arah berikutnya adalah sebagai zona yang berkembang menjadi kawasan internasional, dengan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kelengkapan fasilitas infrastruktur, keamanan, residensial dan komersial, pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang mendukung. Pengembangan Sabang bertujuan mendorong dan memacu pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi daerah dengan mensinergikan kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan global. Tujuan berikutnya adalah mengembangkan New Economic Development (Socio Economic Development Plan). Namun demikian, terdapat tantangan pengembangan kawasan Sabang, antara lain adalah terbatasnya daya dukung kawasan (lahan), lantaran Pulau Weh sebagian besar merupakan daerah pegunungan (48%), perbukitan (39%), bergelombang (10%). Penggunaan lahan masih didominasi oleh hutan (53,8%), sisanya perkebunan sawah dan ladang, sementara itu untuk kawasan khusus KPBPB hanya tersedia 0,7%.⁷⁹. Tantangan berikutnya adalah kapasitas industri daerah juga terbatas. Umumnya industri berskala kecil dengan kapasitas produksi yang rendah; pengelolaan tradisional belum profesional; terbatasnya akses modal, sarana produksi dan pasar. Masalah lain adalah infrastruktur belum memadai, misalnya pelabuhan nasional bila ditinjau dari aspek pertumbuhan ekspor-impor, bongkar-muat barang, jumlah penumpang, posisi dan perannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan perannya dalam pengembangan ekonomi regional. Pelabuhan internasional juga belum memadai bila ditinjau dari aspek

⁷⁹ Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas

pengelolaan potensi wilayah hinterland, pertumbuhan ekspor-impor, bongkar-muat barang, jumlah penumpang, posisi dan perannya dalam RTRW, dan perannya dalam pengembangan ekonomi regional, nasional dan internasional. Kondisi investasi pun masih tertinggal, mengingat sektor riil kurang berkembang. Begitu pula peran profesional kelembagaan pengelola kawasan masih perlu ditingkatkan; serta diperlukan pelimpahan kewenangan pusat ke daerah.

4.1.5.5 Rencana Pengembangan Kawasan Pelabuhan Sabang

Pengembangan kawasan dan sektoral yang direncanakan berdasarkan kepada ketentuan dalam Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang Tahun 2007-2021, yang telah menentukan secara jelas arah pembangunan yang ingin dicapai pada Kawasan Sabang, juga telah menetapkan sasaran dan tujuan pengembangan Kawasan Sabang, yang nantinya diharapkan mampu memberi kejelasan pengembangan dalam pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan di Kawasan Sabang.

Rencana pengembangan Kawasan Sabang mengacu kepada ketentuan rencana kerja master plan dan bisnis plan Kawasan Sabang yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), untuk itu dalam perencanaan pengembangan kedepannya harus dilakukan peninjauan langsung terhadap kawasan agar diketahui kondisi mendesak yang harus dibenahi terhadap kawasan yang direncanakan, sehingga dapat dilakukan pengembangan pada bidang sektoral lebih lanjut yang sesuai dengan potensi yang dimiliki agar mampu memberikan dampak pengembangan dan pembangunan kearah yang lebih baik bagi kawasan tersebut.

Berdasarkan kepada Master Plan dan Bisnis Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021, saat ini terdapat 5 (lima) lokasi pusat kegiatan yang berkembang di Kawasan Sabang, dengan potensi dan kegiatan yang berkembang di sektor yang berbeda, yaitu;

4.1.5.5.1 Tiga pusat kegiatan di Pulau Weh (Kota Sabang): Pusat Kota Sabang, Pusat Kawasan Balohan, dan Pusat Kawasan Iboih – Gapang.

4.1.5.5.2 Dua (2) pusat kegiatan di Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar): Pusat Kawasan Lampuyang di Pulau Breuh dan Pusat Kawasan Lamteng-Nipah di Pulau Nasi.

Untuk mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam master plan dan bisnis plan, diharapkan kegiatan – kegiatan pembangunan fisik saling berhubungan dan saling mendukung. Area kegiatan sering kali berdekatan atau berhimpit batas lingkup pekerjaannya. Didalam pelaksanaannya seringkali daerah yang saling berhubungan tidak terakomodasi dalam rencana dan tidak terorganisir dalam perencanaan masing-masing kegiatan, yang disebabkan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Oleh karena itu daerah yang seharusnya berhubungan ini dalam implementasinya akan dituangkan dalam rencana-rencana bantuan teknis lapangan. Selain itu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian area lingkup pekerjaan terhadap beberapa kendala seperti kondisi eksisting alam, infrastruktur kawasan dan penyesuaian dengan beberapa produk kegiatan dan rencana dari stakeholder (BPKS, Pemerintah kota dan dinas-dinas terkait), yang selanjutnya keadaan ini dianggap sebagai permasalahan/deviasi dalam implementasi master plan dan bisnis plan.

Diidentifikasi beberapa deviasi dalam implementasi pelaksanaan pembangunan oleh BPKS yang diprogramkan dalam tahun anggaran 2007, yaitu :

4.1.5.5.3 Daerah kerja Master Plan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang yang mencakup daerah kerja Master Plan Kawasan Pangkalan Kapal Nelayan di Krueng Raya dan reklamasinya.

4.1.5.5.4 Daerah kerja Master Plan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang mencakup daerah wisata historis dan tidak adanya dukungan teknis perencanaan kawasan yang terkena area kegiatan pembangunan sector prioritas (pembangunan pelabuhan).

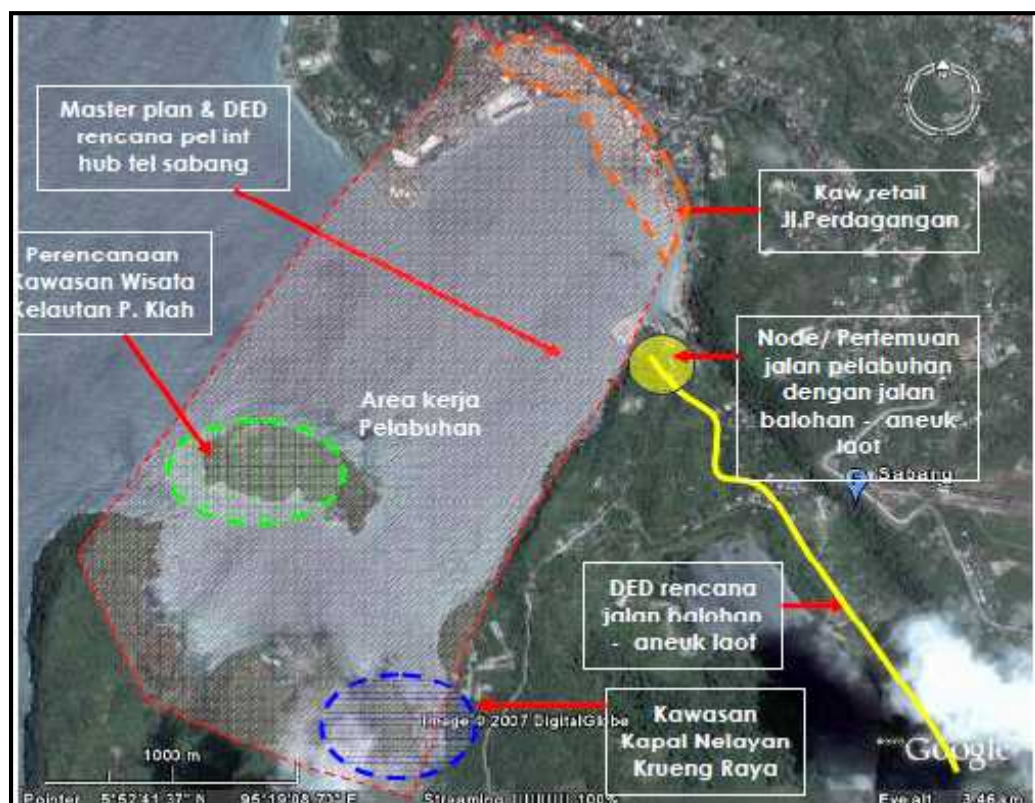
4.1.5.5.5 Daerah kerja Master Plan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang mencakup daerah terminal PPI kapal nelayan di Pasiran.

4.1.5.5.6 Daerah kerja Master Plan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang mencakup daerah rencana kawasan wisata kelautan di Pulau Klah.

4.1.5.5.7 Terdapatnya kondisi topografi daerah kerja yang sangat sulit untuk dikondisikan karena berbukit.

4.1.5.5.8 Terdapatnya rencana peningkatan jalan yang menghubungkan Balohan dengan Pelabuhan Hub Internasional Teluk Sabang melalui jalan Aneuk Laot yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana anggaran tahun 2007.

4.1.5.5.9 Terdapatnya perencanaan DED peningkatan jalan yang menghubungkan Cot Damar Keneukei Lhong Angen yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana anggaran tahun 2007.



Gambar 29: Area kawasan yang terkena area pembangunan pelabuhan (Sumber : BPKS-2010)

Dengan adanya beberapa deviasi dalam pelaksanaan implementasi yang berada diluar rencana kerja BPKS maka diperlukan beberapa tindak lanjut yang dibutuhkan untuk implementasi pada tahun-tahun mendatang. Adapun rencana-rencana tindak lanjut yang dibutuhkan untuk pembangunan tahun mendatang adalah :

4.1.5.5.10 Pemindahan area kerja penyusunan Master Plan Kawasan Pangkalan Kapal Nelayan di Krueng Raya dan reklamasinya ke daerah lain. Tujuan pemindahan lokasi agar area kerja pelabuhan Internasional Teluk Sabang dapat memenuhi standard internasional, yaitu tidak bergabung dengan pelabuhan nelayan dan untuk mempersiapkan percepatan pembangunan yang diharapkan dari sektor perikanan. Fungsi daerah Krueng Raya sebagai pangkalan pendaratan ikan untuk sementara/selama pembangunan pelabuhan internasional Teluk Sabang, tidak dikembangkan lebih lanjut. Fasilitas yang disediakan hanya berupa pemanfaatan dan perbaikan fasilitas eksisting yang ada. Selain itu tujuan pemindahan lokasi Kawasan Pangkalan Nelayan ke lokasi lain agar diikuti dengan perpindahan pemukiman nelayan ke daerah lain. Mengingat daerah tersebut juga tidak akan cocok lagi menjadi pemukiman nelayan disebabkan daerah tersebut akan menjadi daerah penumpukan kontainer (*Container Yard*) dan daerah fasilitas pelabuhan.

4.1.5.5.11 Pemindahan area kerja penyusunan Master Plan Kawasan Pangkalan Kapal Nelayan di Krueng Raya dan reklamasinya ke daerah lain. Tujuan pemindahan lokasi agar area kerja pelabuhan Internasional Teluk Sabang dapat memenuhi standard internasional, yaitu tidak bergabung dengan pelabuhan nelayan dan untuk mempersiapkan percepatan pembangunan yang diharapkan dari sektor perikanan.

4.1.5.5.12 Tata batas kawasan. Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah tertuang dalam Master Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2007-2021

dan Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Arah kemajuan pembangunan misi pembangunan BPKS sendiri tertuang dalam Renstra BPKS 2007-2011. Oleh karena itu BPKS perlu menentukan kawasan pengusahaan sebagai tindak lanjut untuk mendukung rencana pembangunan, untuk mencapai tingkat kemajuan seperti yang telah ditetapkan pada indikator tingkat kemajuan dan langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan Sabang sesuai dengan kewenangannya.

4.1.6 Deskripsi Tata Ruang

4.1.6.1 Tata Ruang Wilayah Pertahanan

Wilayah pertahanan bersifat dinamis artinya bahwa wilayah pertahanan penggunaannya bersifat sementara, tidak bersifat permanen, dan atau bersifat darurat dimana sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara baik pada masa damai maupun dalam masa perang. Pada masa damai, wilayah pertahanan negara dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Dalam keadaan perang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang.

Penataan ruang wilayah pertahanan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional, propinsi, atau kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah⁸⁰ pertahanan merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penataan ruang nasional, propinsi, dan kabupaten/kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan penataan ruang wilayah pertahanan diselenggarakan terintegrasi dengan pelaksanaan penataan ruang untuk fungsi yang lain di luar fungsi pertahanan negara.

⁸⁰ Disarikan dari draf Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan, 2012

Dalam rangka mengintegrasikan penataan ruang wilayah pertahanan dengan penataan fungsi kawasan yang lain, pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan budi daya, kawasan lindung atau kawasan lain di daerahnya wajib mewadahi kepentingan pertahanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Statis dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dinamis.

4.1.6.1.1 Tata Ruang Wilayah Pertahanan Statis meliputi lokasi untuk : Pangkalan dan/atau kesatrian, Daerah latihan militer, Instalasi militer, Kepentingan pertahanan udara meliputi: daerah terbatas (*restricted area*), daerah terlarang (*prohibited area*) dan daerah berbahaya (*danger area*) serta zona pengenalan pertahanan udara (*air defence identification zone/ADIZ*), Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, Daerah penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya, Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau Aset pertahanan lainnya.

4.1.6.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dinamis meliputi lokasi untuk: Daerah latihan militer, Medan pertahanan penyanggah, Medan pertahanan utama, Daerah perlawanan, Daerah pertempuran, Daerah komunikasi dari suatu mandala perang, Daerah belakang dari suatu mandala perang; dan Daerah pangkal perlawanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dinamis ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan, Kebijakan dan strategi pertahanan negara; pengembangan sistem pertahanan negara; ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana nasional; kesejahteraan dan kepentingan masyarakat; dan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang

wilayah Propinsi, rencana tata ruang Kabupaten/Kota, dan kawasan strategis.

Pemerintah menetapkan wilayah pertahanan untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan wilayah pertahanan. Penetapan wilayah pertahanan meliputi penetapan wilayah pertahanan darat, laut, dan udara. Dalam menetapkan wilayah pertahanan memperhatikan kepentingan daerah. Wilayah pertahanan ditetapkan berdasarkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang terdiri dari wilayah pertahanan yang bersifat statis dan wilayah pertahanan yang bersifat dinamis.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menyediakan wilayah atau bagian wilayah yang berfungsi sebagai ruang bagi pembangunan pangkalan, kesatريان, dan/atau instalasi militer atas usul Menteri Pertahanan. Wilayah atau bagian wilayah disesuaikan dengan fungsi dan kegiatan pangkalan, kesatريان, dan/atau instalasi militer.

Untuk itu penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperhatikan keberadaan wilayah pertahanan statis dan dinamis. Dalam penetapan lokasi wilayah pertahanan statis dan dinamis, pemerintah daerah⁸¹ berkoordinasi dengan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dan memperhatikan pertimbangan komando kewilayahan TNI di daerah.

4.1.6.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara⁸². Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

⁸¹ Ibid

⁸² Peraturan Pemerintah RI No 26 Tahun 2008

Wilayah nasional seluruh wilayah NKRI yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun yang terkait dengan kebijakan⁸³ pengembangan kawasan strategis nasional meliputi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya

⁸³ ibid

nasional; peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

Strategi⁸⁴ peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi: menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

Kriteria Kawasan Strategis Nasional. Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan; pertumbuhan ekonomi; sosial dan budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau merupakan wilayah kedaulatan

⁸⁴ ibid

negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa RTRWN merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

4.2 Analisis

4.2.1 Pengembangan kekuatan Pangkalan TNI AL Sabang

Mengacu pada Postur Pertahanan 2010-2029, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hingga 20 tahun mendatang pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut tidak akan meningkatkan kekuatan TNI Angkatan Laut

secara drastis dibandingkan dengan kondisi saat ini. Artinya hingga 20 tahun mendatang fokus utama operasi TNI Angkatan Laut masih tetap pada pengamanan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Dalam kondisi keterbatasan itu, tantangan terhadap TNI Angkatan Laut akan bertambah satu dengan lalu lalangnya kekuatan laut India. Sebagai kekuatan laut yang naik status menjadi *blue water navy*, dapat dipastikan bahwa suatu saat nanti Angkatan Laut India akan “tinggi hati” terhadap Angkatan Laut di kawasan yang statusnya di bawah *blue water navy*. Kondisi seperti ini yang perlu diantisipasi sejak dini oleh Indonesia apalagi dalam konsep penggelaran kekuatan TNI AL di wilayah perairan Selat Malaka dan perairan laut sekitar Andaman masih sangat minim dan belum memberikan efek deterrence yang berarti yang menunjukkan eksistensi kekuatan TNI AL di wilayah-wilayah tersebut.

Kegiatan operasi melibatkan unsur TNI AL di perairan Andaman pada TA 2012 tergabung dalam Patkor Indindo, hanya dilaksanakan dalam 2 periode yakni Patkor Indindo-19/2012 pada 7 April s.d 01 Mei 2012 melibatkan 1 KRI SRE, dan Patkor Indindo-20/2012 periode 20 September s.d 19 Oktober 2012 melibatkan KRI STS. Sementara dukungan pangkalan yang dilibatkan adalah Pangkalan TNI AL Sabang dan Lanudal Sabang⁸⁵. Sementara itu, dalam kurun waktu satu bulan (mulai tanggal 1 April s.d 1 Mei 2012) digelar operasi bersama antara TNI AL dengan Angkatan laut Thailand dalam Patkor Indo-thai-02/2012 hanya dilaksanakan dalam satu periode melibatkan 2 (dua) KRI yakni KRI PTM dan KRI kelas FPB dengan dukungan pangkalan aju di Lanal Sabang dan Lanudal Sabang⁸⁶.

Memperhatikan sikap politik India, besar kemungkinan ke depan India tidak ingin dianggap menjadi “*Deputy Sheriff*: Amerika Serikat di kawasan seperti yang disandang Australia saat ini, namun sebagai India yang independen. Namun hal itu bukan berarti India akan bersikap oposisi terhadap kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan

⁸⁵ Data Operasi Sops TNI AL TA 2012.

⁸⁶ Ibid

Samudera India. Perairan yurisdiksi Indonesia yang akan bernilai vital bagi India diantaranya adalah Selat Malaka, yang merupakan penghubung bagi India untuk menyebarkan kekuatan laut dari Samudera India ke Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik dan sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran unsur-unsur kapal perang TNI Angkatan Laut di wilayah Barat bukan saja suatu keharusan sebagai bagian dari *naval presence*, namun juga mesti dirasakan dampaknya oleh semua pengguna laut. Untuk itu, dalam penyusunan Postur TNI Angkatan Laut 2010-2029 yang mengacu pada Postur Pertahanan 2010-2029, lebih diarahkan pada pengadaan kapal perang yang lebih menitik beratkan pada kapal patroli dibandingkan kapal fregat. Maksudnya, jumlah pengadaan kapal patroli jauh lebih besar daripada kapal fregat. Hal itu perlu dirancang sebab dalam 10-15 tahun ke depan, sebagian kekuatan kapal patroli TNI Angkatan Laut akan memasuki masa pensiun.

Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Tri Wahyudi S menyatakan, keterbatasan armada kapal perang TNI AL juga dialami dan dirasakan oleh aparat keamanan laut di wilayah perairan Aceh khususnya wilayah Sabang. Dengan luas perairan mencapai 295.370 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.660 kilometer (terpanjang di Sumatera), kepolisian di Aceh hanya dilengkapi satu kapal yang hanya mampu berlayar hingga 12 mil laut (sekitar 21,6 kilometer)⁸⁷. Sementara itu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nawan menyebutkan bahwa kapal-kapal Thailand yang mencuri ikan di perairan Aceh umumnya berada di 12 mil laut ke atas. Kapal tak mampu mengejarnya. Dibutuhkan tiga kapal besar untuk patroli perairan di Aceh yang berada di pertemuan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Selat Malaka.⁸⁸

⁸⁷ Sesuai hasil wawancara dengan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat tanggal 12 juni 2013.

⁸⁸ Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bina Operasi Direktorat Airud Polda Aceh tanggal 5 Juli 2013.

Selain itu, sangat sulit untuk mengandalkan terciptanya efek dari *naval presence* apabila unsur yang di dispersikan adalah kapal perang generasi lama. Salah satu kekhawatiran yang muncul dengan kemampuan proyeksi yang akan dimiliki oleh Angkatan Laut India di masa depan adalah turut campurnya India dalam berbagai masalah keamanan di kawasan, khususnya masalah keamanan internal di negara-negara sekitar Samudera India termasuk di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Mengacu pada pengalaman masa lalu, terdapat preseden India untuk ikut campur masalah negara-negara lain di sekitar Samudera India, misalnya “diundang” oleh pemerintah Sri Lanka pada 1988-1989 untuk menghadapi pemberontakan Tamil dan penyebaran militer India ke Maladewa untuk merespon kudeta militer di sana.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan lingkungan strategis di wilayah Barat sekitar perairan laut Andaman dan Selat Malaka perlu pula untuk diantisipasi. Terciptanya instabilitas di wilayah perairan Andaman dan *littoral* Selat Malaka akan mengundang kekuatan laut asing, termasuk India, untuk masuk dengan alasan guna mengamankan SLOC, yang merupakan bagian dari kepentingan nasionalnya. Dari sini perlu dipertimbangkan bagaimana gelar kekuatan TNI Angkatan Laut ke depan di sekitar perairan laut Andaman dan Selat Malaka.

Persaingan India-Cina di masa depan, termasuk dalam konteks kekuatan laut, perlu pula diantisipasi oleh Indonesia. Sebagai negara yang berada pada posisi strategis di kawasan, terdapat kekhawatiran bahwa Indonesia akan dihadapkan pada pilihan yang sulit berada di tengah dua kekuatan besar. India berambisi menyebarkan kekuatan lautnya hingga Laut Cina Selatan, sebaliknya Cina berambisi menyebarkan Angkatan Laut-nya sampai ke Samudera India untuk mengamankan garis perhubungan lautnya (SLOCs dan SLOT) dalam strategi *string of pearls*.

Cina berambisi untuk mempunyai empat sampai enam kapal induk dalam dekade mendatang. Kapal induk tersebut dikembangkan di dalam negeri dengan mempelajari rancang bangun dua eks kapal induk Angkatan Laut Uni Soviet yang dibelinya, yaitu Varyag dan Minsk.

Meskipun kedua bekas kapal induk tidak dimasukkan dalam armada Angkatan Laut Cina, namun sangat jelas Cina mempelajari rancang bangunnya agar dapat mengembangkan kapal induk sendiri⁸⁹.

Sementara itu, terbentuknya *Quadilateral Security Partnership* di mana India tergabung di dalamnya, menjadikan sulit untuk menepis adanya skenario pembendungan Cina oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia. Kaitannya dengan Indonesia adalah wilayah perairan Indonesia di masa depan besar kemungkinan jadi ajang pertarungan kepentingan negara-negara itu, khususnya dalam konteks kekuatan laut. Menghadapi konstelasi tersebut, TNI Angkatan Laut harus mempunyai kekuatan yang kredibel dan itu merupakan satu-satunya pilihan. Hanya dengan kekuatan yang kredibel maka pihak-pihak Angkatan Laut asing yang menggunakan perairan yurisdiksi Indonesia akan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya.

Selain itu, dibutuhkan pemahaman ulang terhadap konsep penangkalan itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan keilmuan militer, bentuk-bentuk penangkalan bukan lagi sebatas multilateral (*multilateral deterrence*) yang ditujukan kepada semua pihak, namun telah berkembang pula menjadi unilateral (*unilateral deterrence*) dan bilateral (*bilateral deterrence*). Apabila Indonesia belum sanggup untuk melaksanakan penangkalan multilateral, masih tersedia dua pilihan lain. Hal ini penting untuk dipahami karena untuk membangun kekuatan pertahanan yang mampu menciptakan penangkalan multilateral, dibutuhkan waktu yang panjang karena keterbatasan anggaran pertahanan. Dikaitkan dengan India, perlu dipertimbangkan dengan seksama apakah India layak atau tidak untuk dimasukkan dalam skenario sebagai kekuatan laut di masa depan, yang probabilitasnya tinggi untuk berbenturan dengan Indonesia dalam 10 tahun ke depan.

⁸⁹ <http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>

4.2.2 Sinergitas Tata Ruang Kota Sabang dengan pengembangan kemampuan Pangkalan TNI AL Sabang dalam mendukung kampanye Militer di perairan Andaman dan Corong Selat Malaka

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan.⁹⁰

- a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- c. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.

Dari penjelasan diatas, mengandung arti bahwa penataan ruang berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, hal ini yang menguatkan bahwa pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Dengan demikian, berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah,

⁹⁰ Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc, *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum* Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008.

pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Selain itu, rencana tata ruang diklasifikasikan berdasarkan hierarki rencana mulai dari rencana di tingkat pusat (RTRWN), di tingkat provinsi (RTRWP), dan di tingkat kabupaten/kota (RTRW Kabupaten/Kota). Penyusunan rencana tata ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, artinya rencana tata ruang mulai dari tingkat pusat hingga rencana tata ruang kabupaten/kota harus saling melengkapi satu dengan lainnya, tidak boleh saling bertentangan, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Hal ini berhubungan dengan pandangan bahwa penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya undang-undang tentang Otonomi Daerah, implementasi rencana tata ruang harus melibatkan semua pelaku pembangunan (*stakeholders*) pada setiap tahap pembangunan dan tercipta sinergitas antara pengembangan wilayah dan penataan ruang. Rencana tata ruang yang disusun dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan akan meminimalkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang akan menciptakan keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah.

Dari sisi Kepentingan Nasional dan Tujuan Nasional, jelas bahwa Pertahanan negara tidak hanya merupakan tugas dari TNI, termasuk pertahanan untuk matra laut bukan semata-mata tugas TNI AL, namun diperlukan kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya termasuk dalam

mensinergikan Tata Ruang Wilayah dengan kepentingan pertahanan negara matra laut. Sebagaimana diketahui, keberadaan Pangkalan Angkatan Laut adalah salah satu alat pertahanan negara, peran dan fungsinya tidak akan terwujud apabila tidak adanya sinergi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan) seperti halnya Pemerintah Daerah, Adpel, Otoritas Pelabuhan atau Pelindo dan Industri jasa maritim lainnya.

Keberadaan pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, yang berawal dari aset peninggalan Belanda yang kemudian dikelola oleh TNI AL, berada di dalam area pelabuhan, dimana secara hukum wilayah sekitar pelabuhan adalah dalam Otoritas Pelabuhan sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa pelabuhan difungsikan hanya untuk kegiatan komersial. Pemanfaatan dan pengaturan fasilitas yang berada di Sabang sepenuhnya diatur oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan pasal 1 ayat 26, "*Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial*". Karena Pelabuhan Umum yang ada di Sabang sebagian besar merupakan pelabuhan komersial, sehingga bila mengacu pada isi sesuai dengan Undang Undang Pelayaran maka penggunaan fasilitas yang ada diutamakan untuk kepentingan komersial.

Keberadaan pangkalan TNI AL secara umum, serta arti pentingnya bagi tata kehidupan maritim nasional dalam Undang Undang Pelayaran masih belum dinyatakan secara tegas, sangat kontradiktif dengan realita bahwa meskipun memiliki peran untuk kepentingan pertahanan negara keberadaan sarana pangkalan TNI AL (khususnya dermaga dan fasilitas labuh lainnya) sampai saat ini masih diakomodir oleh sarana milik Otoritas Pelabuhan. Sehingga Pangkalan TNI AL sebagai alat pertahanan negara dalam menjalankan fungsi dan perannya memiliki keterbatasan dan tidak secara maksimal untuk dapat mendukung satuan / unsur TNI AL yang digelar. Dalam pembahasan sub bab ini peneliti membatasi sinergitas hanya ditinjau dari aspek fasilitas pangkalan, penyelenggaraan fungsi dan

dukungan pangkalan yang antara lain fasilitas tempat sandar dermaga, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, Fasilitas bekal ulang serta fasilitas dukungan pangkalan dikaitkan dengan kepentingan pertahanan negara matra laut yang menjadi tanggung jawab pangkalan TNI AL di Sabang.

4.2.3 Sinergitas kepentingan sarana labuh dan dermaga di Sabang.

Kepentingan labuh dan dermaga adalah sarana utama unsur KRI dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan untuk mendukung kesiapan dalam operasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti kemampuan dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang masih sangat terbatas, kapasitas kemampuan dermaga tidak sebanding dengan jumlah unsur KRI yang di gelar di wilayahnya. Hal ini juga berdampak pada tercapainya efektifitas kesiapan unsur KRI dan terutama dari sisi taktis bila KRI yang akan berlabuh lebih dari satu, sehingga harus melabuh jangkar di tengah teluk Sabang dan tidak merapat ke dermaga.

Dari aspek geografis, Pangkalan TNI AL Sabang sebagai pangkalan TNI Angkatan Laut yang berada di Pulau Weh yang memiliki posisi sangat strategis di Perairan Laut Andaman dan berada di muka titik corong (*Choke Point*) alur masuk ke Selat Malaka memiliki nilai strategis bagi kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas TNI AL dalam mengakkan kedaulatan dan keamanan di laut. Sabang juga merupakan pelabuhan alam, dengan kedalaman yang relatif cukup dalam sehingga mampu mendukung operasional kapal selam, akan tetapi karena kapasitas dermaga yang dimiliki TNI AL sangat terbatas selain juga lokasinya yang berdekatan langsung dengan dermaga pelabuhan umum sehingga memiliki keterbatasan ruang gerak aman bagi manuver unsur KRI.

Untuk pengembangan kemampuan dukungan fasilitas labuh yang dimiliki Angkatan Laut di Sabang, dihadapkan dengan kondisi tata ruang yang ada perlu untuk disinergikan dengan rencana tataruang yang dilaksanakan di dermaga umum oleh pemerintah daerah terutama bila dihadapkan dengan rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, dimana pihak Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS)

berencana untuk membangun beberapa dermaga bongkar muat kontainer di sepanjang sisi barat Teluk Sabang dan perluasan dermaga umum yang telah ada. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pemanfaatan secara optimal dermaga Lanal Sabang sebagai sarana utama dukungan operasional unsur KRI di wilayah perairan Corong Selat Malaka dan Laut Andaman.

Keterbatasan kemampuan operasional, khususnya dari aspek penyiapan dermaga Pangkalan TNI AL Sabang seperti yang dikemukakan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang (Danlanal Sabang) Kolonel Laut (P) Imam Musani, SE yang menyampaikan bahwa, "*kondisi kemampuan Dermaga Lanal Sabang yang seharusnya dapat menampung sesuai jumlah KRI yang ada secara maksimal (34 KRI pembinaan Koarmabar) belum dapat dilaksanakan secara optimal, dengan kendala antara lain berupa kemampuan dermaga yang tidak sebanding dengan jumlah unsur (KRI) yang ada, kedalaman dermaga kurang memadai (\pm 11 meter), belum ada fasilitas pipa bahan bakar minyak, fasilitas air tawar/air bersih yang memadai, dan kemampuan saluran listrik darat yang mencukupi untuk mendukung KRI yang sandar*"⁹¹. Kondisi kemampuan dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang saat ini hanya memiliki panjang 180 meter dan lebar 7 meter. Dengan kapasitas kemampuan beban sandar 600 ton, sehingga hanya mampu disandari oleh 2 KRI jenis *Patrol Craft*.

Disisi lain disampaikan juga bahwa, keterbatasan fasilitas dermaga yang sampai dengan saat ini masih menjadi kendala, masih belum dapat terpecahkan dengan baik, meskipun sebenarnya dapat terlihat mudah bila dihadapkan dengan lokasinya yang bersebelahan dengan dermaga umum yang frekuensi penggunaannya masih rendah,. Meskipun demikian, dalam memenuhi kebutuhan tempat sandar unsur TNI AL, pihak Lanal Sabang senantiasa berkoordinasi dan mengajukan permohonan ijin kepada pihak Administrator Pelabuhan (Adpel saat ini Syahbandar), Otoritas Pelabuhan dan PT. Pelindo Sabang, dan jika tidak mendapatkan alokasi waktu untuk

⁹¹ Wawancara dengan Komandan Lanal Sabang, tanggal 21 Juli 2013

dapat sandar di pelabuhan umum, tindakan selanjutnya adalah mengarahkan unsur KRI untuk lego jangkar di Perairan Teluk Sabang, dan bila unsur KRI yang datang ada lebih dari satu, kesempatan untuk sandar di dermaga dilaksanakan secara bergantian disesuaikan dengan keperluan unsur secara prioritas, sedangkan unsur yang mendapatkan prioritas untuk dapat sandar di dermaga adalah unsur yang melaksanakan perbaikan atau siap untuk melaksanakan tugas operasi⁹².

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala syahbandaran Angkatan Laut (Kasyahal Sabang), bahwa pihaknya selalu berupaya berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mendapatkan tempat sandar di pelabuhan umum, tentunya mekanisme ini memerlukan waktu dan tidak serta merta dapat langsung mendapatkan keputusan untuk dapat memperoleh ijin sandar di dermaga umum Sabang. Karena pengoperasian dermaga umum ditujukan untuk keperluan komersial, sehingga tiap sektor dermaga telah dikerjasamakan atau dikontrak kerjakan dengan pihak penyewa atau PT-PT perusahaan pengguna baik yang dioperasikan oleh perusahaan dalam ataupun perusahaan luar negeri, sehingga seringkali karena padatnya jadwal penggunaan dermaga umum, sehingga unsur KRI terpaksa tidak sandar di dermaga pelabuhan..

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Tata Usaha Syahbandar Kota Sabang yang menyampaikan bahwa, "*Dermaga yang berada di pelabuhan umum Sabang dimanfaatkan untuk komersial, tiap-tiap sektor dermaga telah dikerjasamakan atau dikontrakkan dengan perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Kalau mau dipakai untuk sandar kapal-kapal Angkatan Laut, maka tidak bisa langsung mendapat persetujuan karena harus koordinasi dengan perusahaan yang telah menyewa. Perusahaan tersebut telah membayar kepada Otoritas atau Pelindo*"⁹³.

Bila di tinjau dari sisi Undang Undang Pelayaran dalam pasal 1 disampaikan secara jelas yang dimaksud Pelayaran adalah "satu

⁹² Ibid

⁹³ Wawancara dengan Kabid Usaha Syahbandar Sabang, Juli 2013

*kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim*⁹⁴. Akan tetapi jika dilihat dari asas manfaat dalam Undang Undang Pelayaran yang tertuang dalam Pasal 2 (huruf a), dimana yang dimaksud asas manfaat adalah *"Pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara"*⁹⁵. Meskipun demikian, karena lingkup pernyataan dalam undang-undang relatif tidak spesifik menjelaskan tentang upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara, sehingga implementasi dari asas manfaat terkait dengan upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara secara relatif memiliki kendala untuk dapat diwujudkan untuk mendukung upaya pertahanan matra laut yang sebagian dari amanahnya dilaksanakan oleh pangkalan TNI Angkatan Laut.

Unsur KRI yang mendapatkan sandar di pelabuhan umum harus mentaati jadwal yang telah diberikan dari pihak pelabuhan. Aktifitas unsur KRI di dermaga umum hanyalah numpang bersandar sementara yang sewaktu-waktu dapat diperintahkan bergerak oleh pihak pelabuhan. Unsur KRI yang sandar di dermaga umum jika ada aktifitas atau kegiatan untuk tugas operasi seperti bongkar dan muat; melaksanakan pemantapan kondisi teknis atau perbaikan harus diketahui dan seijin dari pihak pelabuhan. Ketentuan unsur KRI yang akan melaksanakan sandar di dermaga baik dermaga Angkatan Laut maupun dermaga umum, menggunakan fasilitas dermaga atau melaksanakan kegiatan agar memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Panglima Armada Barat nomor: SE/5/IV/2012, tanggal 12 April 2012 dapat dilihat pada lampiran 6 yang berisi: *"Unsur KRI yang sandar didermaga umum sifatnya pinjam fasilitas labuh dari pihak-pihak yang telah memiliki kontrak kerja dengan Otoritas*

⁹⁴ Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008

⁹⁵ Ibid

ataupun Pelindo". Unsur KRI yang melaksanakan sandar di dermaga umum tetap menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pelabuhan, bahwa telah diberikan ijin sesuai hasil koordinasi dengan pihak pelabuhan untuk sandar di dermaga umum waktu yang diberikan hanya 8 jam. Lewat dari batas tersebut unsur KRI harus bergeser untuk pindah atau lego jangkar⁹⁶.

Sedangkan unsur KRI yang sandar di dermaga TNI Angkatan Laut Sabang, untuk kepentingan keselamatan dan keamanan bersama lalu lintas pelabuhan, unsur yang sandar dibatasi maksimal hanya sampai dua badan kapal. Pembatasan ini yang menjadi kendala dalam pengaturan penempatan kapal untuk sandar baik untuk aktifitas penyiapan tugas operasi atau perbaikan maupun mendukung kesiap-siagaan unsur KRI sebagai alat pertahanan negara dilaut. Ketidakmampuan dermaga Pangkalan Angkatan Laut Sabang menampung unsur KRI yang sandar, membawa pengaruh terhadap kesiapan unsur KRI dalam kesiapsiagaan pertahanan pangkalan⁹⁷.

Ketidakmampuan dermaga pangkalan Angkatan Laut Sabang juga membawa pengaruh terhadap biaya penggunaan bahan bakar. Sesuai dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, nomor: Perkasal/6/I/2008 tentang Petunjuk Administrasi Norma Bekal Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Laut. Penggunaan bahan bakar Solar per-etmal (per 24 jam) untuk kapal lego jangkar atau sandar, kapal Jenis *Frosch* penggunaan bahan bakar 3.000 liter per-etmal; kapal jenis Perusak Kawal *Parchim* penggunaan bahan bakar 1.800 liter per-etmal; dan kapal jenis LST Amerika penggunaan bahan bakar 3.800 liter per-etmal. Dari ketiga jenis kapal tersebut diambil rata-rata penggunaan bahan bakar 2.800 liter per-etmal untuk kapal yang sandar dan lego jangkar.

Pelabuhan yang berada di sekitar Kota Sabang ada 13 pelabuhan dengan berbagai tipe dari yang memiliki kemampuan besar sampai kecil.

⁹⁶ Surat Edaran Panglima Armada Barat no SE/5/IV/2012.

⁹⁷ Ibid

Dari ketiga belas pelabuhan tersebut memiliki sarana prasarana yang cukup memadai, khususnya guna menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk sarana penunjang wilayah pertahanan laut, hanya berupa dermaga TNI Angkatan Laut Sabang dengan panjang 180 meter. Kondisi seperti ini menurut Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Lefrand Tuelah, dapat dijelaskan sebagai berikut : “ *Faktor penyebab diantaranya belum adanya persepsi yang sama dalam RUTR pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan umum dan sebagai kawasan strategis pertahanan matra laut (dermaga militer), sehingga pembangunan dilokasi tersebut masih belum terkonsentrasi* ”⁹⁸.

Dermaga Angkatan Laut memiliki kemampuan terbatas, letak posisi dermaga berada ditikungan atau belokan alur pelayaran lalulintas yang sempit dari atau ke pelabuhan Nusantara. Adanya aturan hasil kesepakatan dari pihak pelabuhan, untuk keselamatan dan keamanan lalulintas pelabuhan dengan pembatasan unsur KRI yang sandar di dermaga Angkatan Laut maksimal sampai dengan 2 (dua) badan kapal⁹⁹. Sebagai Pangkalan Pertahanan kondisi ini tidak sesuai dengan Standarisasi Pangkalan¹⁰⁰ TNI Angkatan Laut yang seharusnya ada Dermaga Operasional, Dermaga *Beaching*, Dermaga Bongkar Muat dan Dermaga Bekal Ulang. Kondisi seperti ini menurut Panglima Armada Barat, disampaikan sebagai berikut¹⁰¹ : “ *Sebagai alat pertahanan negara di wilayah Sabang untuk mendukung operasional masih belum memadai, apalagi apabila dikaitkan dengan spektrum penugasan dan tuntutan tugas/fungsi yang lebih luas memang harus memiliki sarana dan prasarana yang feasibel. TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara sebaiknya mempunyai dermaga dan fasilitas labuh sendiri untuk memudahkan kesiapan tempurnya* “.

⁹⁸ Wawancara dengan Kadis faslanal, tanggal 15 Juli 2013

⁹⁹ Surat Edaran Panglima Armada barat nomor SE/5/IV/2012

¹⁰⁰ Standarisasi Pangkalan TNI AL, Skep Kasal nomor: Skep/372/III/2007

¹⁰¹ Wawancara dengan Panglima Armada Barat, tanggal 21 Juli 2013

Sebagai daerah yang memiliki nilai strategis bagi pelayaran niaga dan internasional, tentunya cara pandangnya akan berbeda dengan perspektif tataruang wilayah pertahanan laut, dari perspektif dukungan pelayaran niaga, keberadaan pangkalan Angkatan Laut yang posisi dan kondisinya tidak tepat berada di wilayah pelabuhan umum, selain karena dalam pengembangannya akan mengalami keterbatasan bila lokasinya menjadi satu dengan kawasan pelabuhan umum, dari sisi tata ekonomi juga ada persepsi bahwa keberadaan pangkalan militer disekitar pelabuhan umum dapat memberikan dampak resiko terhadap aktifitas pelayaran niaga baik dari aspek navigasi maupun hal lainnya terkait dengan batasan keamanan pangkalan militer. Hal ini tersirat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok, bapak Capten Arifin Sunaryo¹⁰². “ *Pangkalan Angkatan Laut sebagai pangkalan pertahanan perlu untuk memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi sebagai daerah pangkalan pertahanan, sehingga perlu tempat sendiri, yang tidak campur dengan kegiatan aktifitas secara umum seperti keberadaannya saat ini* “.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa antara Pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah di pelabuhan dengan TNI Angkatan Laut belum terlihat adanya sinergitas yang saling berimbang khususnya dalam pemanfaatan sarana prasarana di pelabuhan, terutama dalam mendukung peran pangkalan sebagai pelaksana dukungan operasional serta mengemban fungsi pengelolaan wilayah pertahanan.

Pola sinergitas yang terlihat dalam konteks sinergitas tata ruang di wilayah Sabang, bila ditinjau dari aspek teoritis bila mengacu pada pendapat James A.F Stoner, R edward Freeman dan Daniel Gilbert Jr, lebih cenderung level sinergitas *defensif*, yaitu tingkat kerjasama dan komunikasi yang rendah sehingga mengakibatkan pola hubungan yang bersifat pasif/defensif.

Hal lain yang menggambarkan sisi kontradiktif dalam perencanaan tata ruang wilayah pertahanan bila kita tinjau dari aspek pencapaian

¹⁰² Wawancara dengan Kepala Syahbandar Tanjung Priok, 15 Juli 2013

tujuan nasional dari konteks penyelenggaraan tata ruang wilayah dalam mendukung Fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Wilayah Nasional¹⁰³ (pasal 2): “*penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pertahanan keamanan negara*”. Pendekatan perencanaan pembangunan masih terpaku pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi, meskipun memiliki benang merah yang cukup jelas, dalam mendukung upaya pertahanan keamanan masih belum terlihat adanya suatu perencanaan yang berkesinambungan dan melalui proses yang sinergistik sehingga secara proporsional mampu mendukung aspek kesejahteraan maupun upaya penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara.

Bila mengacu pada kondisi belum terwujudnya sinergi ini antara lain dapat terjadi dikarenakan masih adanya pendekatan perencanaan yang bersifat ego sektoral khususnya dalam menetapkan rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang oleh pihak BPKS, yang sifat dan kedudukan kelembagaannya langsung menerima otorisasi penuh (Badan Otorita) dari Presiden, sehingga dalam perencanaannya seringkali mengabaikan mekanisme perencanaan ‘*bottom up*’ dengan mengakomodasikan aspirasi daerah dan kelembagaan terkait lainnya, serta belum adanya kesamaan persepsi tentang RUTR, kawasan Sabang sebagai pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, dan pelabuhan Sabang sebagai kawasan strategis nasional. Hal tersebut masih diikuti dengan lemahnya pemahaman tentang pentingnya penyiapan suatu tata ruang wilayah guna mendukung penyelenggaraan pertahanan oleh setiap instansi baik pemerintah maupun swasta di Sabang.

4.2.4 Sinergitas peningkatan sarana perbaikan

Tugas pokok unsur KRI dalam pengamanan wilayah akan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan apabila unsur KRI telah memiliki kesiapan tempur. Kesiapan tempur ini terdiri dari kesiapan badan

¹⁰³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008

kapal sebagai daya apung; kesiapan daya dorong permesinan pokok dan mesin bantu sebagai penggerak; kesiapan sensor dan senjata sebagai sarana deteksi dan pendukung tempur. Untuk mendukung kesiapan tempur unsur KRI sarana fasilitas pemeliharaan dan perbaikan memegang peranan penting. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang telah memiliki sarana berupa dock kapal (*Slipway*); bengkel bangunan kapal; bengkel mesin; bengkel listrik dan elektronika namun dengan kemampuan dan kondisi yang sangat terbatas.

Sarana fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Pangkalan Angkatan Laut Sabang hanya memiliki kemampuan untuk mendukung kapal-kapal dengan ukuran tonase kecil atau tonase dibawah 200 GT¹⁰⁴. Untuk mendukung perawatan dan perbaikan kapal dengan bobot diatas 200 GT sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung belum dimiliki oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, kondisi saat ini hanya mampu untuk perawatan dan perbaikan kapal-kapal kelas patroli / KAL bahan kayu dan fibreglass. Sedangkan Armada Barat memiliki unsur¹⁰⁵ KRI sebanyak 34 kapal yang rata-rata memiliki bobot diatas 1000 ton. Sehingga secara nyata Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan yang dimiliki TNI Angkatan Laut di Sabang tidak mampu untuk mendukung unsur KRI yang beroperasi di wilayah Barat Indonesia untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan.

Pemeliharaan dan perbaikan unsur KRI Armada Barat selama ini hanya dilaksanakan di dock galangan kapal swasta baik di Jakarta maupun di luar Jakarta¹⁰⁶. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sangat tergantung dari ketersediaan sarana *docking* serta disesuaikan dengan jadwal kepadatan di galangan kapal. Penyesuaian ketersediaan jadwal di galangan akan berpengaruh terhadap perencanaan operasi unsur KRI, pergeseran atau penundaan jadwal perbaikan berakibat terhadap kesiapsiagaan dan akan menggeser perencanaan perbaikan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Danlanal Sabang

¹⁰⁵ Data kesiapan Unsur KRI Armada Barat, tahun 2012

¹⁰⁶ JOP, Jadwal Olah Perbaikan Armada Barat, tahun 2012

serta perencanaan operasi yang membawa dampak terhadap kesiapan tempur unsur KRI. (JOG-JOP¹⁰⁷, Jadwal Olah Guna – Jadwal Olah Perbaikan).

Fasilitas bengkel yang dimiliki Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang sarana prasarana baik peralatan ataupun tenaga ahli belum mampu untuk memperbaiki jenis kapal dengan ukuran besar. Bengkel badan kapal dan bengkel permesinan serta bengkel listrik dan elektronika tersedia di Fasharkan pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang namun sarana peralatan penunjang bengkel sangat terbatas, hanya digunakan untuk perbaikan dan perawatan kapal dengan ukuran kecil.

Fasilitas perbaikan berupa dock dan bengkel permesinan, bengkel listrik dan elektronika dengan kemampuan perbaikan kapal hingga bobot 50.000 ton adalah milik PT Dock Koja Bahari Sabang. Fasilitas yang dimiliki berupa 4 (empat) galangan kapal dengan fasilitas bengkel yang memadai. Pelaksanaan perbaikan dan perawatan Unsur KRI sering dilaksanakan di galangan Dock Koja Bahari. Namun TNI Angkatan Laut belum ada kerjasama dengan pihak PT Koja Bahari dikarenakan dalam pelaksanaan perbaikan masih menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan administrasi dan pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh Komandan Lantamal sebagai berikut¹⁰⁸: “ *Untuk pelaksanaan perbaikan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Sehingga selama ini belum ada yang secara langsung berupa kerjasama antara TNI AL dengan pihak galangan di pelabuhan*”.

Perbaikan unsur KRI merupakan hal yang rutin dilaksanakan baik dalam perbaikan tingkat menengah (Harmen) maupun dalam pelaksanaan perbaikan tingkat depo (Hardepo). Sesuai dengan prosedur perencanaan tiap tahun unsur KRI melaksanakan perbaikan tingkat menengah baik perbaikan alat bantu, alat utama ataupun sistem komando kendali dan navigasi, sedangkan tiap dua tahun unsur KRI memiliki jadwal untuk melaksanakan pemeliharaan tingkat depo (Hardepo), dengan demikian

¹⁰⁷ Perencanaan penggunaan operasi dan perbaikan Armada Barat, tahun 2012

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Komandan Lantamal I Belawan, tanggal 21 Juli 2013

perencanaan jadwal perbaikan tidak pernah berhenti. Kerjasama dengan galangan kapal di Jakarta sesuai dengan yang disampaikan oleh Danlantamal bahwa kerjasama dengan galangan di pelabuhan belum terjalin, keadaan ini tentunya membawa dampak pada kegiatan dukungan operasional yang lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dari kepentingan sarana perbaikan antara instansi pemerintah di pelabuhan dok galangan kapal Sabang dengan TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Sabang belum terlihat adanya sinergitas dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki yang berwujud kerjasama sarana prasarana, sehingga fungsi Pangkalan TNI Angkatan Laut sebagai pangkalan atau sarana pertahanan atau fasilitas pendukung gelar operasional TNI AL untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan unsur KRI masih mengalami kendala. Pendekatan kerjasama terbentuk masih jauh dari pola ideal yang merupakan hubungan sebab akibat dalam pola sinergitas *Respectful* dimana tingkat kerjasama yang berlandaskan pada suatu kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai untuk dapat menghasilkan suatu pola komunikasi dan interaksi yang saling menguntungkan (*simbiose mutualisma*) masih belum terbentuk, meskipun interaksi tetap dapat berlangsung dengan pola komunikasi dan interaksi yang bersifat *defensif*. Diperlukan adanya jalinan komunikasi kerjasama yang dijembatani oleh kebijakan pada tingkat pusat untuk dapat mencairkan kondisi ini menjadi lebih interaktif dan sinergi antara potensi yang satu dengan lainnya baik dari sisi kemampuan swasta dan industri maritim yang ada dengan pangkalan TNI AL Sabang khususnya.

4.2.5 Sinergitas peningkatan Dukungan Logistik

Dukungan logistik merupakan kebutuhan yang setiap harinya digunakan untuk mendukung unsur KRI, dukungan logistik untuk keperluan setiap hari berupa bahan bakar, minyak lincir dan air tawar. Sesuai adagium *Baron Von Clausewitz* tentang pentingnya logistik dinyatakan bahwa: "*Logistik tidak memenangkan pertempuran, akan tetapi*

tanpa logistik pertempuran tidak akan dapat dimenangkan". Sehingga Pangkalan TNI Angkatan Laut memiliki fungsi dukungan bekal ulang baik berupa logistik personel, logistik cair (bahan bakar, air dan lainnya) maupun bekal ulang untuk amunisi.

Dermaga Lanal Sabang hanya mampu mendukung fasilitas logistik air tawar secara terbatas karena sifat sumber air daerah yang mengandalkan tadah hujan dan logistik cair terbatas bagi KRI yang beroperasi dalam jumlah besar, karena sarana penyimpanan bekal bahan bakar pertamina yang terbatas. Akan tetapi, dari sisi alur pendekat secara relatif alur pelabuhan Sabang cukup lebar dan memiliki area lego jangkar yang cukup memadai bagi unsur KRI di sekitar area pelabuhan. Dari sisi radius jangkauan dukungan, Lanal Sabang memiliki potensi dikembangkan untuk dapat lebih optimal mendukung operasional unsur KRI untuk dapat menjangkau gelar hingga sisi terluar perbatasan wilayah NKRI dengan India di utara Pulau Weh (Sabang)/Laut Andaman, dan sisi Selatan Samudra Hindia karena secara geografis lokasinya cukup dekat dari wilayah tersebut.

Sarana bekal ulang yang tersedia di pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang masih jauh dari kondisi ideal sebagai pangkalan terdepan ujung barat wilayah NKRI dalam mendukung kebutuhan unsur KRI yang akan dan telah melaksanakan tugas operasi. Seperti kemampuan dermaga dan sarana dukungan vital pangkalan lainnya seperti Fasilitas labuh dan Harkan bagi unsur KRI yang membutuhkan.

Belum terpasangnya sarana bekal ulang berupa tangki timbun dan sistem pipa yang memadai di dermaga. Pelaksanaan bekal ulang bahan bakar menggunakan sarana tongkang yang disandarkan di samping kapal yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan sarana tongkang memiliki keterbatasan jumlah bahan bakar yang diangkut dan kecepatan dalam mentransfer bahan bakar ke unsur. Kapal atau unsur KRI yang akan melaksanakan bekal ulang disandarkan pada badan terluar diantara unsur KRI yang sandar, dengan tujuan untuk keamanan memudahkan keluar dari unsur lain jika terjadi kebakaran dan kemudahan penyalurannya.

Penggunaan sarana tongkang dalam pelaksanaan bekal ulang sangat tergantung dengan kapal penariknya. Kapal penarik adalah kapal jenis tunda yang memiliki khusus untuk menarik kapal ataupun tongkang. Sedangkan kapal tunda ini tidak dimiliki oleh pangkalan TNI Angkatan Laut, sehingga harus melaksanakan peminjaman ke pihak pelabuhan yang prosedurnya harus melalui permohonan yang dilaksanakan oleh Lantamal dalam hal ini Kadis Syahal. Proses untuk mendapatkan pinjaman kapal tunda sangat tergantung dari persetujuan dari pihak pelabuhan Otoritas Pelabuhan atau Pelindo dan jadwal kepadatan keluar masuk kapal di pelabuhan, sehingga masih memerlukan waktu.

Dukungan logistik untuk air bersih atau air tawar telah tersedia di dermaga Angkatan Laut dengan sarana pemasangan pipa yang disalurkan dari penampungan air dengan kapasitas tampungan hanya 30 ton. Kecuali dengan sarana pipa di dermaga juga tersedia untuk bekal ulang air tawar menggunakan tongkang yang dimiliki Lantamal. Namun proses dukungan untuk penarikan tongkang air tawar sama dengan proses penarikan tongkang bahan bakar, yaitu dengan peminjaman kapal tunda ke pihak pelabuhan yang masih membutuhkan proses waktu yang cukup lama.

Ketersediaan dukungan bahan bakar dan air tawar telah dimiliki oleh pelabuhan umum, disetiap dermaga di pelabuhan telah terpasang secara langsung sarana bekal ulang sistem pipa baik untuk bahan bakar maupun untuk air tawar. Dermaga "G" Sabang yang dioperasikan BPKS merupakan pelabuhan Adpel Kelas V Sabang yang Bebas pandu karena Kedalaman di alur pelayaran mencapai 53 m, sehingga kapal-kapal yang sandar di dermaga umum telah memiliki kemudahan untuk mendapatkan bekal ulang baik bahan bakar maupun air tawar.

Bahwa dari kepentingan sarana bekal ulang antara instansi pemerintah di pelabuhan dengan TNI Angkatan Laut belum terlihat adanya sinergitas dalam pemanfaatan kerjasama sarana prasarana. Pangkalan TNI Angkatan Laut sebagai pangkalan pertahanan namun

fasilitas untuk melaksanakan bekal ulang unsur KRI masih mengalami kendala.

Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa keberadaan pangkalan TNI AL Sabang masih belum dapat memenuhi persyaratan standar pangkalan Angkatan Laut sebagaimana seharusnya, hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya keterbatasan sarana dermaga dan fasilitas labuh, fasilitas perbaikan dan bekal ulang. Dalam pengembangan kemampuannya, tentu sangat dipengaruhi oleh sinergi antar instansi pemerintah di pelabuhan dan TNI Angkatan Laut yang berlandaskan pada kesatuan pemahaman dari aspek tata ruang dan pengelolaan potensi sumberdaya wilayah untuk kepentingan pertahanan nasional. Faktor ketersediaan lahan sebenarnya tidak menjadi salah satu kendala pangkalan TNI Angkatan Laut di Sabang dalam merumuskan upaya pembangunan serta peningkatan kemampuan guna mendukung strategi pertahanan laut yang ditetapkan, akan tetapi dengan adanya upaya klaim dari berbagai pihak terhadap lahan yang telah dimiliki oleh Pangkalan TNI AL Sabang, baik oleh perorangan maupun oleh pemerintah daerah dengan argumen historis maupun *local heritage* menjadikan aspek ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang dapat berpotensi menjadi kendala.

Rencana pembangunan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sangat mendominasi motif ekonomi dalam upaya pengambil alihan hak kepemilikan tanah milik Pangkalan TNI AL Sabang, dimana dalam upaya klaim tersebut diwarnai dengan upaya politis (hampir seluruh perangkat daerah dan propinsi adalah mantan GAM) sehingga cukup menyita perhatian serta berpotensi menghambat tercapainya sinergitas positif dalam mencapai kesepakatan perencanaan tata ruang di wilayah Pangkalan TNI AL Sabang. Pola interaksi yang berjalan bersifat defensif yang terbentuk sebagai dampak dari rendahnya kepercayaan dan kerjasama dari kedua pihak, baik dari sisi TNI AL maupun perangkat pemerintah daerah.

Di sisi lain, keberadaan pangkalan TNI Angkatan Laut dan Pelabuhan umum di Sabang masing-masing memiliki tugas dan tujuan yang berbeda, akan tetapi dari aspek tata ruang wilayah keduanya memiliki tujuan lain yang harus diemban secara bersama yaitu penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, masih belum ada wujud kebijakan yang dapat mengatur secara berimbang pendekatan tujuan fungsi ini, sehingga yang berjalan saat ini, sarana Pangkalan Angkatan Laut untuk melaksanakan pengamanan dan sebagai pangkalan pertahanan, sedangkan sarana yang dimiliki Pelabuhan umum dan Galangan Dock hanya untuk melaksanakan upaya kesejahteraan dan pembangunan wilayah dengan orientasi komersial. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara peneliti dengan Walikota Sabang Zulkifli Adam (Juli 2013) bahwa Kawasan Sabang yang strategis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran (*International Shipping Line*) dan penerbangan internasional menjadikan posisinya begitu potensial sebagai sentral atau sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri khususnya bagi propinsi Aceh. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah adanya wacana pembangunan Terusan Kra (Canal Kra) di Thailand, yang akan semakin dapat memposisikan Sabang sebagai *Buffer Zone* bagi kapal-kapal *cargo container* atau kapal-kapal kargo lainnya yang akan melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia. Dari wawancara tersebut, tergambar bahwa tidak ada pertimbangan serta pandangan yang terkait dengan prioritas pembangunan sarana serta kebijakan tata ruang yang mengarah kepada manfaat ganda sebagai sarana dukungan penyelenggaraan pertahanan, khususnya pertahanan di laut. Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan pangkalan TNI Angkatan Laut di Sabang masih belum didukung dengan adanya sinergitas perencanaan tata ruang pertahanan berupa kerjasama antara Pelabuhan, Galangan/Dok dan TNI Angkatan Laut guna mendukung kepentingan pertahanan negara di laut.

Bila ditinjau dari aspek sinergitas, dimana sinergi merupakan tingkat kinerja yang dihasilkan oleh perpaduan kelompok yang terpisah,

dimana masing-masing melakukan tindakan-tindakan yang independen di dalam mencapai sesuatu yang dituju. Suatu kegiatan yang disinergikan akan mampu mendatangkan hasil yang baik untuk semua pihak. Hubungan dua pihak akan menghasilkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi. Dengan demikian perlu dikembangkan suatu terobosan baru dari aspek koordinasi dan komunikasi agar dapat tercapai suatu kesadaran untuk meningkatkan pola kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai yang pada akhirnya akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (*simbiosis mutualisme*), yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan *output* (keluaran) yang jauh lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

4.2.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian adalah suatu penegasan sekaligus menjadi penguat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bila ditinjau dari sisi regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang Wilayah Pertahanan di Sabang, sampai saat ini rencana tata ruang wilayah Sabang masih mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan tahun 1994, adapun regulasi ini dibuat sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan nomor Skep 012/ VIII / 1988 tanggal 31 Agustus 1988. Adapun yang menjadi acuan dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan ini adalah Undang Undang Penataan Ruang nomor 24 tahun 1992.

Selain itu, regulasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan ini secara eksplisit tidak menjelaskan dengan lengkap bagaimana suatu daerah pertahanan atau pangkalan pertahanan di atur ruang wilayahnya, seperti halnya untuk ruang wilayah pertahanan laut di wilayah Lantamal I Belawan khususnya perairan laut sekitar Andaman dan Sabang , Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan tahun 1994 hanya mengatur pertahanan yang bersifat dinamis¹⁰⁹ dalam kondisi

¹⁰⁹ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan, tahun 1994

darurat dalam keadaan perang. Pernyataan yang menguatkan pendapat ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) Belawan “*bahwa kondisi ini menjadikan TNI AL tidak dapat memanfaatkan ruang wilayah pertahanan khususnya sekitar laut secara permanen untuk kepentingan pertahanan laut dan walaupun bisa hanya bersifat sementara*”

Dari aspek implementasi kebijakan, dapat dicermati bahwa dengan belum jelasnya pengaturan tentang ruang wilayah pertahanan laut, maka pemahaman akan isi kebijakan menjadi tidak pasti, hal ini menimbulkan kegamangan dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang, khususnya untuk pelaksana kebijakan tata ruang wilayah pertahanan matra laut. Sehingga seperti yang telah dikemukakan oleh Komandan Lantamal I Belawan, bahwa adanya kegamangan tersebut akan berdampak terhadap penerapan strategi pertahanan laut di sekitar selat Malaka khususnya perairan Sabang yang tidak kondusif, padahal seperti kita ketahui bahwa idealnya tata ruang pertahanan terbagi menjadi 3 (tiga) lapis wilayah pertahanan¹¹⁰. **Lapisan pertama** merupakan medan pertahanan penyanggah, berada di luar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atas nya; **Lapisan kedua** merupakan medan pertahanan utama sebagai medan operasi, dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atas nya; Sedangkan **lapisan ketiga** merupakan daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya yang meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktur Wilayah Pertahanan yang di wakili oleh Kasubdit Tata Ruang Pertahanan Kolonel Infantri Soebagyo, menyatakan bahwa “*regulasi rencana tata ruang wilayah pertahanan mengalami ketidak selarasan dengan Tata Ruang Nasional*”, hal yang krusial lebih lanjut dikatakannya dapat terlihat

¹¹⁰ ibid

dimana¹¹¹ *“tata ruang yang terbit pada tahun 1994 hanya mengatur tentang aspek dinamis, sedangkan aspek statis tidak dijelaskan secara mendetail”*, sehingga dikhawatirkan jika terjadi sengketa lahan dengan pihak lain, TNI tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Selanjutnya pernyataan dari Walikota Sabang patut menjadi bahan pemikiran yang dapat dipahami bahwa *“kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang ada dan digunakan sebagai acuan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat karena hanya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, oleh karena itu tidak terakomodir dalam rencana tata ruang wilayah Sabang”*.

Menurut pendapat peneliti, hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar dalam implementasi kebijakan dimana *faktor komunikasi tidak menjadi faktor yang diperhatikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga pada tataran praktis sebagai dampak adanya kegagalan komunikasi dari sisi kebijakan antara aspek pertahanan dan aspek yang lain, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah pertahanan laut di Sabang*.

Kondisi ini masih terus berlangsung sampai saat ini dan belum terlihat adanya trend dan indikasi adanya pola interaksi yang terintegrasi diantara komponen pengambil kebijakan dalam penyusunan Tata Ruang Wilayah. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa *“masih terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya termasuk aspek pertahanan”*. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan meskipun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya¹¹².

¹¹¹ Kasubdit tata ruang Pertahanan, Dirwilhan, tanggal 11 Juni 2013

¹¹² Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc, journal : Kebijakan penataan ruang berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum.

Dihadapkan dengan kondisi ini, patut disimak pernyataan Komandan Pangkalan TNI AL Sabang (Danlanal Sabang) yang menyampaikan pendapatnya bahwa, *“idealnya konsep rencana tata ruang itu sejak awal perumusannya di Badan Koordinator Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) maupun peranan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) seyogyanya melibatkan unsur Wilayah TNI, sebagai pelaksanaan asas koordinasi dalam perumusan kebijakan”*¹¹³.

Bila ditinjau dari aspek teori kebijakan publik, pendapat Komandan Lanal Sabang ini memiliki relevansi dengan yang dikemukakan oleh Thomas R Dye (1957:17) bahwa *“kebijakan ada untuk menyelesaikan persoalan dan mewadahi kepentingan publik”*, meskipun pada kenyataannya dalam perencanaan tata ruang wilayah pertahanan, unsur TNI maupun Kementerian pertahanan masih belum dilibatkan secara utuh dalam proses perencanaannya, padahal keterlibatan perwakilan kalangan TNI dan Kementerian pertahanan seperti halnya adalah Komando Wilayah TNI, yang saat ini berada di Kodam atau Lantamal sangat krusial dalam memberikan informasi tentang kepentingan dan rencana ruang wilayah pertahanan baik dalam matra darat, laut maupun udara.

Peran serta instansi TNI dan Kementrian Pertahanan dalam perencanaan tata ruang pada hakekatnya telah dinyatakan dan menjadi amanat dari undang-undang tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa *“dalam perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan”* seperti yang termaktub dalam isi pasal berikut ini:

4.2.6.1 Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang, pada Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; (3)

¹¹³ Wawancara dengan Kasubdit tata Ruang Wilayah Pertahanan, tanggal 11 Juli 2013

Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, yang meliputi tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

4.2.6.2 Mengalir dari uraian pada Undang-undang no 24 Tahun 1992, ditegaskan kembali pada amanat Undang Undang No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pada Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Pasal 17 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan Rencana Tata Ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, amanat Undang Undang tentang Penataan Ruang baik UU nomor 24 tahun 1992 dan UU nomor 26 tahun 2007 secara jelas sudah menyatakan, Rencana Tata Ruang yang terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Amanat kedua peraturan perundangan ini hingga tahun 2012 terkait dengan kepentingan ruang wilayah pertahanan keamanan atau Tata Ruang Wilayah Pertahanan belum juga ada, padahal sebenarnya keberadaan peraturan pemerintah yang mengatur tata ruang wilayah pertahanan sangat penting untuk strategi pertahanan baik pada matra darat, laut maupun udara.

Dengan belum adanya peraturan pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang pertahanan dan keamanan atau dalam tata Ruang Wilayah Pertahanan menjadi *titik lemah* dalam pengelolaan ruang wilayah pertahanan terutama dalam penentuan strategi termasuk pengelolaan tata ruang untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara di laut.

Hasil observasi pendalaman oleh peneliti, secara langsung kepada beberapa responden utama, menghasilkan keterangan yang memperlihatkan bahwa implementasi, pengaturan wilayah pertahanan di Sabang hingga saat ini belum dapat mewujudkan suatu sistem pertahanan yang memadai, seperti halnya untuk kepentingan pertahanan matra laut yang dikelola oleh TNI AL dimana Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang sebagai penyangga Pertahanan terdepan bagian barat wilayah NKRI belum dapat optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya secara utuh untuk mendukung operasional logistik dan perbaikan unsur KRI. dari aspek penyediaan fasilitas dan sarana labuh maupun aspek pertahanan matra laut lainnya. Hal yang cukup signifikan membatasi adalah pengembangan serta pembagunan dari area sekitar Teluk Sabang untuk dijadikan sebagai bagian dari perluasan dermaga Pelabuhan Kawasan Bebas Sabang yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak (*manuver*) yang tersisa dalam pengoperasian dermaga Pangkalan TNI AL Sabang.

4.2.7. Pengujian Hipotesa

Dari hasil proses analisa serta pendalaman oleh peneliti, baik terhadap aspek legal formal implementasi peraturan dan perundangan tata ruang yang ada serta kendala yang dihadapi oleh Pangkalan TNI AL Sabang terutama dari aspek implementasi tata ruang wilayah pertahanan, fasilitas labuh dan dermaga, serta permasalahan aset lainnya, belum tercapai suatu interaksi kesepakatan pada tatanan implementasi fungsi dan otoritas masing-masing melalui suatu pola yang *synergistic* yaitu dalam bentuk kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai sehingga

dapat menghasilkan suatu pedoman implementasi kebijakan tata ruang yang optimal. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pernyataan hipotesis penelitian pada bab terdahulu yaitu “Bahwa kondisi implementasi tata ruang wilayah pertahanan sangat signifikan mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan fungsi pangkalan TNI AL dalam mendukung kampanye militer TNI AL.” Masih dapat diterima kebenarannya karena memiliki relevansi dengan analisa hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai dasar serta hasil analisis tanggapan responden dan wawancara penelitian, maupun interaksi langsung, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini adalah :

5.1.1. Bahwa ditinjau dari aspek sinergitas antar lembaga, ditemukan proses perencanaan tata ruang pertahanan sebagai landasan pemanfaatan serta pembangunan potensi kekuatan pertahanan wilayah khususnya guna mendukung gelar kampanye militer, bersifat parsial oleh pemerintah daerah dengan tanpa melibatkan fungsi kelembagaan pertahanan wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergitas tata ruang wilayah pertahanan masih belum tercapai secara optimal.

5.1.2 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) masih minim mempertimbangkan aspek Tata Ruang Wilayah Pertahanan maupun sebagai bagian dari Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu, proses perencanaan Tata Ruang Daerah masih dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta belum menyentuh pertimbangan pemanfaatan serta penyiapan potensi pertahanan wilayah untuk kepentingan pertahanan nasional terutama dihadapkan dengan dinamika lingkungan strategis di wilayah perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka.

5.1.3 Bila ditinjau berdasarkan teori sinergitas dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa pola interaksi sinergitas yang ditemukan dalam konteks perencanaan dan penyelenggaraan tata ruang pertahanan di Wilayah kerja Pangkalan TNI AL Sabang untuk meghadapi ancaman dari Laut Andaman dan Corong Selat Malaka

dominan bersifat *Defensif/Pasif*, atau dengan kata lain tingkat pola kerjasama dan kepercayaan yang terjalin masih rendah antar *stake holder*, dalam hal ini antara pemerintahan daerah dengan TNI khususnya Pangkalan TNI AL Sabang, sehingga berdampak kepada kesiapan kemampuan dukungan sesuai peran dan fungsinya.

5.1.3 Dari aspek regulasi dan perundangan, dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab adalah masih kurangnya kesatuan pemahaman dari aspek Implementasi Undang-Undang no 24 tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2006 tentang Tata ruang wilayah Nasional serta Peraturan Menteri dalam Negeri no. 28 Tahun 2008 tentang tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah serta tidak selarasnya antara Rencana Tata Ruang Pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

5.2.1 Perlu adanya Penelitian lanjutan yang di fokuskan pada Implementasi dari Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2006 tentang Tata ruang wilayah Nasional serta Peraturan Menteri dalam Negeri no. 28 Tahun 2008 tentang tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, untuk dapat dijadikan sebagai dasar penegasan dari Pemerintah Pusat dalam upaya optimalisasi implementasi peraturan perundangan yang mengatur tentang tata ruang wilayah pertahanan, dan sebagai pedoman perencanaan tata ruang pada tingkat Propinsi (RTRWP), Kabupaten/Kota. Dihadapkan dengan arti penting Perencanaan,

pemanfaatan serta pengendalian Tata ruang wilayah pertahanan untuk kepentingan nasional.

5.2.2 Perlu dipertimbangkan percepatan penempatan perwakilan pemerintah pusat di daerah-daerah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan sinergi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang pertahanan nasional (RTRWN) dengan pemerintah daerah propinsi (RTRWP). Kehadiran perwakilan pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memacu keseragaman kesepakatan serta pemahaman tujuan dalam pengaturan tata ruang pertahanan untuk kepentingan nasional secara proporsional dan berimbang selaras dengan prioritas perencanaan kebijakan pembangunan pemerintah daerah

5.2.3 Perlu adanya peninjauan kembali terhadap kelayakan lokasi dermaga, serta kemampuan peran dan fungsi pangkalan TNI Angkatan Laut di Sabang dari aspek ketersediaan sarana prasarana Labuh, Sandar, Perbaikan, Bekal Ulang dan sarana Pergudangan, dengan diikuti upaya penyempurnaan dengan memanfaatkan lahan yang telah dimiliki untuk dapat mencapai kemampuan fungsi Pangkalan yang memadai dalam mendukung gelar kampanye militer khususnya dari aspek penyelenggaraan Pertahanan Laut guna mengantisipasi potensi ancaman dari berkembannya konflik kepentingan antara kekuatan negara besar seperti India, Cina dan Amerika. Mengingat bahwa posisi geografis pangkalan Sabang sangat strategis yaitu berada di dekat perairan Laut Andaman dan Corong Selat Malaka yang juga merupakan jalur pelayaran perdagangan Internasional serta alur perlintasan utama untuk memasuki wilayah barat kepulauan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adi, Sumardiman. (1982). *Wawasan Nusantara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Surya Indah.
- Agoes, Etty R. (1991). *Konvensi Hukum Laut 1982*. Bandung: CV Abardin.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. Ke- 9
- Ernawi, Imam S. (2008), "*Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum*".
- Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Navy). (2006). *The Indian Navy's Vision Document*.
- The International Institute for Strategic Studies. 2007. *The Military Balance 2007*. London
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Chistine S.T. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta: Edisi Revisi,
- Kariso, Max. (1987). *Pangkalan Angkatan Laut*. Jakarta: Seskoal.
- Kim W, Chan. Mauborgne, Renee. (2005). *Blue Ocean Strategy*. Harvard: Harvard Business School Publishing Corpration.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian-Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Parapat, F.M. (2003). *Suatu Catatan Pengalaman, Profesionalisme, Pengabdian dan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Yayasan Marga Parapat.

Peters, John.E. *et all.* Project US Air Force, RAND, 2006, "War and Escalation in South Asia".

Kusumaatmaja, Mochtar. (1985). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan

Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

W.,Wihelminus. (1994). *Manajemen James A.F. Stoner, R. Edward Freeman*. Jakarta: Intermedia.

Y.Lin, Christina. (2008). *Militarisation of China's Energy Security Policy: Defence Cooperation and WMD Proliferation along its String of Pearls in the Indian Ocean*, Berlin: ISPSW Institute fur strategie-Politik-Sicherheits-und Wirtschaftberatung.

JURNAL DAN MEDIA CETAK

David. Scott. "India's Drive for a Blue Water Navy", *Journal of Military and Strategic Studies*, Winter 2007-2008, Vol.10, Issue 2

Djoko Said, Budiman. (2012). *Konflik di Kawasan Asia selatan – Studi tentang Sino-India*, Jakarta: Quarterdeck, Vol 5.

Kemhan RI. (2011), *Workshop Sinergitas Tata Ruang Wilayah Pertahanan dengan Sistem Tata Ruang Nasional*, Jakarta.

Richardson , Michael. *China's network of places, not bases*, Straits Times Newspaper, 16 Augustus 2010.

Rosenfield, M. Julia. (2010). *Exploring The China-India Relationship, Roundtable Report*, Center for US Naval Analysis.

S.K, Wahyono. (2001). *Wilayah Laut*. Jakarta: Jurnal Ketahanan Nasional, No. VI (2).

Selth, Andrew. *Chinese Military Bases in Burma: The Explosion of a Myth*, Regional Outlook Paper No. 10, Griffith Asia Institute, 2007.

Kamerling, Susanne. Frans-Paul Van Der Putten. *An Overseas Naval Presence without Overseas Bases: China's Counter-piracy Operation in the Gulf of Aden*, Journal of Current Chinese Affairs Vol. 40, No. 4, April 2011.

Quarterdeck, vol.5, No. 10, April 2012.

NASKAH YANG TIDAK DITERBITKAN (UNPUBLISH DOCUMENTS)

Bahan Paparan Kepala Bappeda Kota Sabang, rapat koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam pembahasan Rancangan Qanun (Raqaun) Kota Sabang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Gedung Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang Lt. 3, Kementerian Pekerjaan Umum, 23 Mei 2012.

Dishidros TNI AL. (2013). Makalah Pengajak. Sarasehan Hari Hidrografi Dunia 2013, "*Hydrography-Underpinning The Blue Economy*".

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. (2007). *Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut*. Surat Keputusan Nomor SKEP/ 372/ II/ 2007 tanggal 14 Maret 2007.

Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. (2002). *Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut (KAMLA)*, Nomor: Kep/09/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002, Jakarta: Markas Besar TNI AL 2002.

Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut, Jakarta, 2007.

Koarmabar. Rekapitulasi data Sops Koarmabar, Giat Operasi wilayah barat TA 2012.

Koarmabar. Data Kesiapan Operasi TA 2012.

Koarmabar. Jadwal Olah Perbaikan (JOP) Koarmabar TA 2012.

Koarmabar. Perencanaan dan Penggunaan Operasi Unsur-unsur Koarmabar TA 2012.

Mabas TNI AL. (2003). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, (2000), *Buku Petunjuk Induk Pembinaan Logistik TNI AL* . Jakarta.

Markas Besar Angkatan Laut. (2009). *Data Rekapitulasi Pangkalan*.

Markas Besar Angkatan Laut. (2012). Data Operasi Sops TNI AL TA 2012.

Sesko TNI, Naskah Departemen.(2012), *Teori Kampanye Militer*.Bandung.

Undang-undang Dasar RI tahun 1945, amandemen IV.

Surat Edaran Panglima Armada Barat No. SE/5/IV/2012.

PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Republik Indonesia, (1945), *Undang-undang Dasar RI Tahun 1945*.

Republik Indonesia, (2002). *Undang-undang Nomor 3 tentang, Pertahanan Indonesia*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang*

Republik Indonesia (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.

Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional*.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Tahun 1994.

WEBSITE

<http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen> Hargo, Dody Usodo, Brigjen TNI., S.IP. *Perubahan Pola Pembinaan Latihan TNI AD Dihadapkan Kepada Tantangan Tugas Masa Kini Dan Masa Depan*. Diunduh pada tanggal 18 Februari 2013.

http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/03/teknik_pemeriksaan_keabsahan_data.html Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif - Pemeriksaan Data*. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2011

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/default_en.asp *Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/ Regional Planning (CEMAT)*. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2013.

<http://www.scribd.com/doc/72932026/Kajian-2007> Dadang. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. *Kajian Pengembangan Industri Budaya dan Olahraga dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata*. Diunduh pada tanggal 21 Juli 2013.

<http://www.scribd.com/doc/72932026/Kajian-2007>. Diunduh pada tanggal 23 Juli 2013.

<http://www.coe.int/CEMAT>. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2013.

<http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen>. Diunduh pada tanggal 21 Agustus 2013.

www.themaritimealliance.org, *The Maritime Alliance based on The National report: State of the US , Ocean and Coastal Economies, 2009* dalam Suratirektur IHO Nomor 13/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Persiapan Hari Hidrografi Dunia 2013. Diunduh pada tanggal 28 Juli 2013.

www.kompasiana.com/raflihasan. Rafli Hasan, Opini, *Ada Bau Busuk di Tengah Upaya Go Internasional Aceh*. Diunduh tanggal 10 Juli 2013 pukul 12.25 Wib

<http://india-defence-com/reports-3880> *Russia Valuing INS Vikramaditya Aircraft Carrier Deal At US\$ 2.7 billion*". Diunduh pada tanggal 10 Juli 2013.

<http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2013.

<http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/print/departments/voice/2013/04/01/feature-pr-17>, Brig. Purn. D S Sarao / Angkatan Darat India. *Perairan Rumit: Sengketa Laut China Selatan dan India*. Forum, asia Defence, Diunduh pada tanggal 27 Juli 2013 pukul 19.30 WIB.

<http://damnthetorpedo-2.blogspot.com/2012/08/pangkalan-udara-angkatan-laut-india-di.html> Damn-the torpedoes. *Pangkalan Udara Angkatan Laut India Di Andaman-Nikobar*. diunduh tanggal 06 Agustus 2013, pukul 13.20 WIB.

http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?cHash=a82d537697&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37196, Daniel Kostecka. *Hambantota, Chittagong, and the Maldives-Unlikely Pearls for the Chinese Navy*, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 20.17 WIB.

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/1917167/Chinese-nuclear-submarine-base.html> Chinese nuclear submarine base, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.15 WIB.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/china/lingshui.html> Lingshui Air Base, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.15 WIB.

http://www.spacewar.com/reports/Analysis_Chinas_air-sea_buildup_999.html, Andrei Chang. *Analysis:China's air-sea buildup*, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.30 WIB.

<http://www.rjkoehler.com/2010/01/31/is-chinas-fabled-string-of-pearls-becoming-a-reality/>Robert Neff. *Is China's Fabled "String of Pearls" Becoming a Reality?*, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.35 WIB.

http://www2.irrawady.org/article.php?art_id=12285, Min Lwin. Burma's Navy Suffers Strategic. Diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 21.45 WIB.

<http://www.thehindu.com/news/international/article245961.ece>, Ananth Krishna. *China offers to develop Chittagong port*, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.45 WIB.

<http://cautionindia.blogspot.com/2011/01/chinese-naval-base-in-maldives-pose.htm> Chinese naval base in the Maldives poses a greater threat to India, diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.45 WIB.

<http://www.cssexam.com/archive/index.php/t-2737.html> Gwadar Port, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.50 WIB.

<http://pk2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200904/20090406186396.html> China CWE *inaugurates dredging work for Karachi Container Port Project*, , diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.50 WIB.

<http://www.china-asean-fund.com/news.php>, *CAF Invest in Thailand's Largest Port*, diunduh pada 23 Juli 2013 pukul 19.50 WIB.

<http://blog.heritage.org/2011/12/23/china-may-ga-base-in-seychelles/> Dean Cheng. *China May Gain Base in Seychelles*, , diunduh pada 23 Juli 2013 pukul 20.50 WIB.

<http://www.poskotanews.com/2012/12/27/koarmabar-gelar-operasi-tempur-dan-keamanan-laut/>. Diunduh pada tanggal 23 Juli 2013.

<http://chaurahha.wordpress.com/tag/necklace-of-diamond/>. diunduh pada 20 Juli 2013 pukul 22.50 WIB

WAWANCARA

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar). Tanggal 21 Juli 2013.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) 1 Belawan. Tanggal 21 Juli 2013.

Komandan Gugus Tempur Laut (Dan Guspurla) Koarmabar. Tanggal 12 Juni 2013.

Kepala Bagian Bina Operasi Direktorat Airud Polda Aceh. Tanggal 5 Juli 2013.

Komandan Lanal Sabang. Tanggal 21 Juli 2013.

Walikota Sabang, Tanggal

Kepala Bidang Usaha Syahbandar Sabang. Tanggal 21 Juli 2013.

Kepala Dinas Faslanal. Tanggal 15 Juli 2013.

Kepala Syahbandar Tanjung Priok. Tanggal 15 Juli 2013.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tata Ruang Pertahanan, Ditwilhan.

Tanggal 11 Juni 2013.